

TESIS – DA185401

**KONSEP KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR BEBAS
KUMUH BERBASIS *SUSTAINABLE SETTLEMENT*
(STUDI KASUS KAMPUNG TAMBAK CEMANDI
SEDATI SIDOARJO)**

**LAILI MAULIDIYAH
08111850010003**

**Dosen Pembimbing
Dr. Dewi Septanti, S.Pd, ST,MT.
Prof. Ir. Happy Ratna S, M.Sc, Ph.D.**

**Dapartemen Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Arsitektur (M.Ars.)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

LAILI MAULIDIYAH

NRP: 08111850010003

Tanggal Ujian: 26 Juni 2020

Periode Wisuda: September 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing:

DR. Dewi Septanti, S.Pd., S.T., M.T.

NIP: 19460202 197603 2 001

Prof. Ir. Happy Ratna S, M.Sc., Ph.D.

NIP: 19690907 199702 2 001

Penguji:

Siti Nurlaela, S.T, M.Com., Ph.D.

NIP: 19780411 200312 2 001

Sarah Cahyadini, S.T., M.T., Ph.D.

NIP: 19800523 200812 2 003

Kepala Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumihan



Dr. Dewi Septanti, S.Pd, ST., MT

NIP: 19690907 199702 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Permukiman Kumuh.....	14
2.2 Peraturan Terkait Permukiman Kumuh	15
2.3 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.....	17
2.4 Sustainable Settlements	18
2.5 Permukiman Nelayan.....	19
2.6 Teori Analisa Persepsi.....	20
2.7 Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
2.8 Sintesa Kajian Pustaka.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Paradigma Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian.....	34
3.3 Strategi Penelitian.....	34
3.4 Teknik Penelitian.....	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	42
3.6 Pengambilan Data.....	42
3.7 Lokasi Penelitian.....	42
3.8 Teknik Analisa Data.....	45
3.9 Alur Analisa Penelitian.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	51
4.1 Wilayah Administratif	51

4.2	Penggunaan Lahan.....	52
4.3	Kondisi Lingkungan Sekitar Kawasan Penelitian	52
4.4.	Kondisi Kependudukan.....	54
4.5	Kondisi Fisik Rumah di Permukiman	56
4.6	Ketidakteraturan Bangunan.....	59
4.7	Tingkat Kepadatan Bangunan.....	60
4.8	Sarana dan Prasarana Pendukung Permukiman.....	60
BAB V	FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN PADA PERMUKIMAN NELAYAN	70
5.1	Analisa Penyebab Kekumuhan Permukiman Nelayan.....	71
5.2	Faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman Nelayan	86
BAB VI	IDENTIFIKASI KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT...	90
6.1	Analisa Aspek Perbaikan	90
6.2	Analisa Aspek Program	93
6.3	Analisa Aspek Partisipatif.....	95
6.4.	Kesimpulan Identifikasi.....	98
BAB VII	PERUMUSAN KONSEP PERMUKIMAN NELAYAN BEBAS KUMUH...	101
7.1	Analisa Perumusan Kriteria	101
7.2	Konsep Permukiman Nelayan	102
7.3	Prioritas Penanganan dalam Konsep Permukiman Nelayan	127
BAB VIII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
8.1	Kesimpulan	131
8.2	Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136

ABSTRAK

Kekumuhan di permukiman nelayan tambak tidak hanya didasarkan pada kondisi permukiman yang tidak layak huni, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan lingkungan yang kotor, namun warga di kampung tersebut juga diindikasikan memiliki standar penilaian yang berbeda mengenai kriteria kumuh. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan di kampung nelayan lebih buruk dari kampung kumuh pada umumnya. Studi ini berfokus pada penilaian kekumuhan kampung berdasarkan perspektif masyarakat dengan cara mencari faktor – faktor penyebab, mencari kriteria kampung bebas kumuh berdasarkan persepsi masyarakat, serta menemukan dan mengimplementasikan konsep permukiman pesisir bebas kumuh sesuai dengan persepsi masyarakat berbasis *Sustainable Settlements*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan post-positivism, dengan cara mengumpulkan data melalui literature review, observasi dan wawancara. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan forum group discussion untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep perbaikan yang sesuai dengan karakteristik penghuni kampung kumuh nelayan.

Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah konsep permukiman nelayan bebas kumuh berbasis *Sustainable Settlements*. Terdiri dari prinsip kriteria bebas kumuh dan prinsip dari *Sustainable Settlements* yang telah dianalisis dan disusun dalam menentukan langkah perbaikan yang tepat pada kampung nelayan. Sehingga konsep ini dapat diterima dan diaplikasikan dengan kondisi persepsi masyarakat setempat.

Kata kunci : Permukiman Nelayan Tambak, Permukiman kumuh, Persepsi Masyarakat, *Sustainable Settlement*.

ABSTRACT

Slum in coastal fishing settlements is not only based on the condition of the settlement that is not suitable for habitation, facilities and infrastructure that do not meet the requirements and the dirty environment, but residents in the village are also indicated by different assessment standards according to the slum criteria. This causes the environmental conditions in the fishing villages to be worse than slum villages in general. This study is based on community perceptions, based on community perceptions by looking for causal factors, determining the criteria for slum-free villages based on community perceptions, and finding and implementing the concept of slum-free coastal settlements in accordance with community perceptions based on Sustainable Settlements.

The method used in this research uses post-positivism, by collecting data through literature review, observation and interviews. The research strategy used in this research is using case studies (case studies). This study used a group discussion forum to have a deeper look at how the concept of improvement was suitable for the slum dwellers of fishermen.

The result of this research is a slum-free fishing settlement concept based on Sustainable Settlements. It consists of the principles of slum-free criteria and the principles of Sustainable Settlements that have been analyzed and compiled in determining the appropriate remedial steps for fishing villages. So that this concept can be accepted and applied to the conditions of the local community.

Keywords: Coastal Fishing Settlements, Slum Settlements, Community Perceptions, Sustainable Settlements.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sustainable Settlement merupakan gagasan dari perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi permukiman kumuh. Beberapa poin penting pada *Sustainable Settlement* menjadi acuan dalam perbaikan permukiman kumuh, diantaranya: transformasi spasial fisik, penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup, fungsional, responsif dan desain yang inovatif, akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas, kehidupan kota yang terjangkau, kelangsungan finansial, manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan, kelestarian lingkungan, ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal (UN-Habitat, 2016).

New urban Agenda Indonesia yang merupakan bagian dari agenda global, telah disusun sejak mengikuti United Nation Conference on Settlements, Habitat II yang diadakan di Istanbul, Turki pada tahun 1996. Konferensi tersebut merupakan bentuk dari komitmen dari negara-negara anggota untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sebagai bagian dari masyarakat Internasional. *Indonesian New Urban Agenda* berfokus untuk mewujudkan hunian yang layak untuk semua dan permukiman yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi agenda tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan Nasionalnya. Untuk itu, Komite Nasional telah dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 69/2001 untuk membantu pelaksanaan Habitat Agenda di Indonesia, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasilnya (PU Cipta Karya, 2016).

Dalam mengatasi permukiman kumuh di Indonesia, telah disusun indikator penilaian permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 2 / 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator yang menjadi acuan dalam perbaikan permukiman tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi permukiman yang ada di Indonesia dan disejajarkan dengan prinsip-prinsip perbaikan permukiman bebas kumuh yang diakui oleh dunia, yakni dengan berbasis *Sustainable Settlements*.

Daerah pesisir di Indonesia memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai penopang perekonomian masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana besar warga memanfaatkan sumber mata pencaharian dari laut. Potensi daerah pesisir ini menyebabkan tingginya keinginan warga untuk tinggal di daerah tersebut, sehingga menyebabkan kepadatan yang tinggi di permukiman tersebut. Kurangnya kesadaran warga dan rendahnya tingkat pendidikan dalam hal tersebut juga memberikan dampak kekumuhan pada permukiman nelayan pesisir. (Hajrah, 2016)

Kondisi lingkungan permukiman nelayan yang kotor ditandai dengan banyaknya sampah yang berserakan pada sekitar permukiman dan saluran air, hal tersebut disebabkan karena masyarakat langsung membuang sampah di sekitar permukiman maupun badan air (sungai dan laut). Rumah warga nelayan pesisir mayoritas tergolong rumah dengan kondisi di bawah standart, baik kondisi fisik bangunan, material yang digunakan dan kebersihannya (Prasti, 2015). Hal tersebut sangat disayangkan mengingat bahwa mayoritas penduduk di kampung pesisir mengelola dan menjual hasil laut atau olahan laut di rumah mereka (Christiawan, 2017).

Salah satu permukiman nelayan yang memiliki kondisi kurang baik adalah kampung nelayan tambak Cemandi Sidoarjo. Lokasi kampung ini berada di Kabupaten Sidoarjo dan dekat dari bandara udara Juanda Surabaya. Kampung ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan melihat lokasinya yang strategis berada di dekat bandara, serta merupakan daerah pesisir yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, hal ini tentunya dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat warga kampung nelayan dan masyarakat sekitarnya. Namun, sangat disayangkan saat ini kampung nelayan Tambak Cemandi terlihat kumuh, baik dilihat dari kondisi rumah warga yang tidak layak dibandingkan dengan standar SNI dari segi konstruksi, material, bukaan, dsb.

Kondisi bangunan tempat tinggal warga yang belum memenuhi standar dan kriteria rumah sehat yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman Indonesia, menyebabkan disematkannya label sebagai permukiman kumuh untuk kawasan permukiman nelayan tersebut (Septanti, 2017).

Selain itu fenomena yang ada pada daerah study kasus adalah warga juga menggabungkan penggunaan ruang pada rumah atau tempat tinggal mereka dengan kegiatan perekonomian. Mayoritas warga kampung nelayan yang memanfaatkan hasil laut dan tambak yang ada di sekitar tempat tinggal mereka sebagai mata pencaharian mereka (Wardono, 2015). Kegiatan perekonomian warga kampung pesisir yang dilakukan di rumah mereka (di ruang tamu dan teras) seperti: berjualan ikan, mengelola hasil tangkapan ikan, mangawetkan ikan, dsb. yang membuat rumah atau tempat tinggal mereka menjadi semakin kumuh.

Kondisi kumuh ini juga disebabkan karena rendahnya persepsi warga akan kriteria atau standar rumah dan lingkungan yang bersih dan layak huni untuk lingkungan permukiman dan tempat tinggal mereka (Arifiani, 2016). Warga kampung nelayan mengaku lebih memilih membuang sampah di sungai dan di laut daripada membuang di tempat pembuangan akhir jika harus membayar iuran. Hal inilah yang menjadi salah satu akar dari permasalahan kekumuhan di kampung nelayan pesisir. Standar kumuh yang diyakini warga di kampung nelayan berbeda dengan standar kumuh yang digunakan oleh sebagian besar warga.

Kesadaran akan kebersihan lingkungan permukiman yang rendah ini menjadikan kondisi kampung nelayan menjadi kampung yang kumuh. Pasalnya masyarakat setempat merupakan pelaku atau penghuni dari permukiman. Sehingga kesadaran akan kebersihan ini harusnya ditanamkan pada masyarakat permukiman kumuh nelayan agar dapat memahami dan menerima saran serta masukan konsep untuk perbaikan kampung kumuh yang mereka tinggali menjadi kampung yang terbebas dari kekumuhan (Sulistyarso, 2016).

Kegiatan perekonomian mayoritas para warga di kampung nelayan yang memiliki mata pencaharian yang sama, menjadikan kegiatan social mereka cenderung sama dalam melakukan aktivitas sehari-hari menjadikan budaya yang timbul akibat aktifitas atau kegiatan warga sehari – hari mencari menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari luar kampung nelayan (Dimitra, 2012).

Oleh karena itu diperlukannya sebuah konsep perbaikan permukiman pesisir bebas kumuh yang dapat diterima dan diterapkan oleh warga di permukiman pesisir yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tempat tinggal dan lingkungan permukiman pesisir di Indonesia dapat menjadi lingkungan permukiman yang bebas kumuh, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan *Sustainable Settlement* yang diakui secara global.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya untuk memperbaiki kualitas permukiman untuk mengidentifikasi kriteria kampung pesisir tambak untuk menjadi kampung yang bebas kumuh dan menjadi kampung yang berkelanjutan. Dimana dibutuhkan suatu konsep yang dapat diaplikasikan berdasarkan karakteristik wilayah dan penghuni dari kampung nelayan. Upaya perbaikan pada aspek penyebab terjadinya kekumuhan yang ada di kampung daerah pesisir di Indonesia ini

diharapkan dapat memperbaiki kualitas permukiman dengan cara menganalisa kaitan faktor kekumuhan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan acuan aspek yang ada pada *Sustainable Settlement* dan dipertajam dengan identifikasi penyebab kekumuhan kampung nelayan pada studi kasus baik dari faktor fisik dan non fisik yakni penghuni kampung nelayan. Diharapkan dari hasil analisa tersebut mendapat kriteria yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menghasilkan rumusan konsep yang dapat diaplikasikan dalam melakukan perbaikan kampung nelayan pesisir tambak agar terbebas dari kekumuhan dan menjadi kampung yang sustainable.

Secara lebih rinci, pertanyaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut ini :

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang disepakati Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan berpengaruh terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman mereka?
3. Bagaimana konsep kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Settlement* yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karakteristik masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui apakah karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan berpengaruh terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman nelayan.
3. Menghasilkan konsep kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Settlement* yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam tesis ini, peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi kriteria kampung pesisir tambak untuk menjadi kampung yang bebas kumuh dan berkelanjutan. Dimana kriteria itu sendiri akan digali dari sumber literatur. Selanjutnya hasil kriteria yang dirangkum akan dianalisis secara konsisten dalam penelitian ini guna menghasilkan rumusan konsep yang sesuai dan aplikatif dalam merealisasikan kampung pesisir tambak

untuk menjadi kampung berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik warga kampung. Harapannya, melalui penelitian ini dapat menghasilkan sumbangan konsep yang dapat diaplikasikan guna menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi saat ini dalam kondisi permukiman masyarakat pesisir tambak. Namun, bukan tidak mungkin hasil penelitian juga memiliki perbedaan tergantung pada karakteristik dari tiap-tiap lokasi studi kasus. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu bidang ilmu perumahan dan permukiman, pemerintah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Jika dilihat dari bidang ilmu perumahan dan permukiman, maka penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui seberapa besar peran teori-teori yang dipelajari dalam penerapan dilapangan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi literatur yang berkaitan dengan permukiman kumuh khususnya di kawasan pesisir.
2. Manfaat untuk pemerintah yaitu agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo untuk merencanakan perbaikan atau pemeliharaan lingkungan di permukiman kumuh khususnya di pesisir Kampung Tambak Cemandi.
3. Manfaat bagi masyarakat adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi masyarakat agar peduli akan pentingnya pemeliharaan lingkungan permukiman. Cara memotivasi masyarakat dilakukan dengan pengungkapan permasalahan lingkungan yang ada, pengulasan harapan masyarakat tentang perbaikan permukiman agar tercipta keberlangsungan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

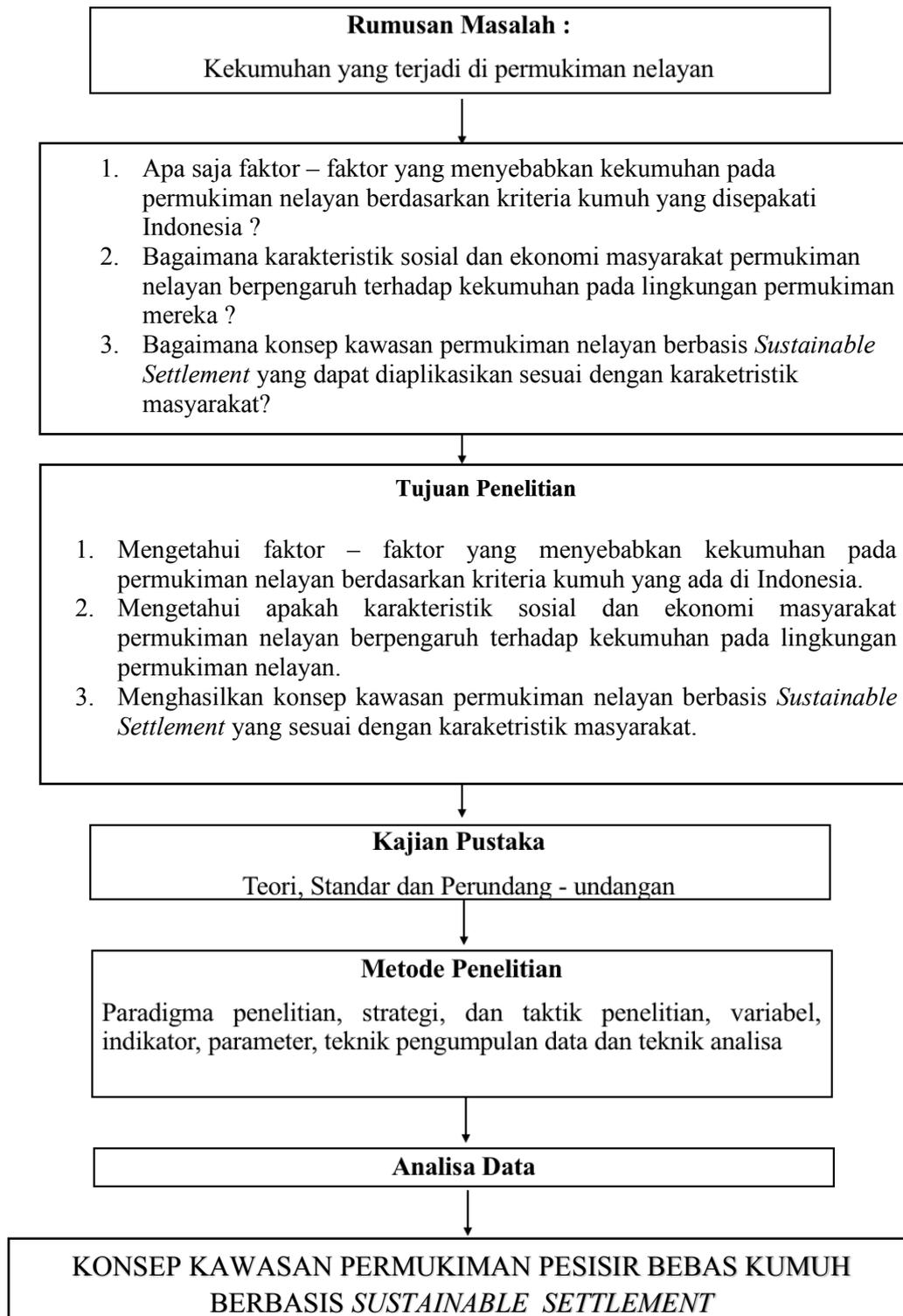


Diagram 1.1 Alur Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dengan judul “Konsep Kawasan Permukiman Kumuh dengan Berbasis *Sustainable Settlement* (Studi Kasus Kampung Tambak Cemandi Sidoarjo)” ini berhubungan dengan permukiman kumuh, permukiman nelayan, permukiman berkelanjutan, dengan studi kasus di kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Pembahasan pada bab kajian pustaka terdiri dari beberapa sub bab yang membahas: tinjauan atas permukiman kumuh, permukiman berkelanjutan, mengenai *Sustainable Settlements*, mengenai konsep dan pengembangan permukiman, mengenai permukiman nelayan tambak, mengenai konsep permukiman kumuh nelayan tambak rangkuman kajian pustaka dan di akhiri dengan sintesa kajian pustaka.

2.1. Permukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut: (Khomarudin, 1997) Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha), Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah, Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standart, Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundangundangan yang berlaku. Gambaran lingkungan kumuh adalah : Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakkan, Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni, Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan, Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan), Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal, Pendidikan masyarakat rendah.

Sedangkan sebab adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat (Nawagamuwa, 2003). Karakter lingkungan: tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga; kepadatan penduduk yang tinggi; sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

Menurut mereka keadaan kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan

kumuh dapat tercermin dari: penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun tanpa perawatan, pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antar bangunan maupun siteplan yang tidak tersencana, kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen, Sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik, kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal, banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari, 1999) untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu : kondisi bangunan atau rumah, ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status penduduk, dan berdasarkan aspek pendukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat.

2.2. Peraturan Terkait Permukiman Kumuh

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRTM/2016” tentang kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh dijelaskan pada ayat pertama meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari beberapa aspek: bangunan gedung, lalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Kriteria kekumuhan juga ditinjau dari kondisi bangunan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2. Poin dari kriteria kekumuhan tersebut mencakup:

- Ketidakteraturan bangunan yang dilihat dari kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman. Pertama, bangunan tersebut tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam “Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)”, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Kedua bangunan tersebut tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan kondisi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Adapun persyaratan teknis bangunan gedung yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR 02/PRTM/2016 meliputi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- c. Keselamatan bangunan gedung;
- d. Kesehatan bangunan gedung;
- e. Kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. Kemudahan bangunan gedung.

2.3. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

Terdapat beberapa bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan beberapa bentuk antara lain: pengertian perbaikan permukiman. Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya, (Moris, 1977).

Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu: Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai housing adjustment (Moris, 1977). Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai housing adaptation.

Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman berdasarkan PU. Cipta Karya tahun 2015, terdapat beberapa bentuk usaha pelaksanaan perbaikan permukiman. Pola penanganan permukiman kumuh berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan antara lain:

- Pencegahan

Pola penanganan pencegahan terdiri atas:

- Pengawasan dan pengendalian : kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pemberdayaan masyarakat : pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

- Peningkatan kualitas

Pola penanganan peningkatan kualitas terdiri atas:

- Pemugaran : Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

- Peremajaan : Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
- Pemukiman kembali : Pemandahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.

2.4. Sustainable Settlements

Environmental Sustainability atau lingkungan keberlanjutan yang berfokus pada kelangsungan hidup secara keseluruhan dan sistem kehidupan. Ide-ide ini berlaku untuk alam dan dikelola di permukiman baik di daerah padang, gurun, pedesaan serta perkotaan. Ketahanan adalah potensi keadaan sistem untuk mempertahankan struktur dan fungsi dalam menghadapi gangguan. Petersen berpendapat bahwa ketahanan ekosistem yang diberikan tergantung pada kelangsungan proses ekologi yang terkait pada kedua skala spasial yang lebih besar dan lebih kecil.

Sustainable settlements yang dapat diartikan sebagai Pemukiman Manusia Berkelanjutan memiliki pendekatan pada beberapa poin diantaranya : (Co-operative Settlements & Traditional Affairs, 2018) dijelaskan dalam gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 Prinsip *Sustainable Settlement*

Prinsip-prinsip *Sustainable Settlement* merupakan gagasan dari beberapa komunitas tersebut merupakan bagian dari sebuah perusahaan ataupun perserikatan negara-negara di dunia.

1. Transformasi spasial fisik
Perubahan bentuk ruang dan fisik bangunan tempat tinggal mengarah ke desain yang lebih baik dan layak untuk dihuni.
2. Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup
Penyediaan infrastruktur pendukung sebuah permukiman yang layak dan memiliki manajemen pengaturan sebuah permukiman.
3. Fungsional, responsif dan desain yang inovatif
Memiliki desain yang fungsional, responsif dan desain yang juga inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang.
4. Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.
Memiliki aksesibilitas yang jelas dan dapat dijangkau dan menjangkau layanan fasilitas yang ada di setiap permukiman.
5. Kehidupan kota yang terjangkau
Memiliki kehidupan kota yang dapat dijangkau di setiap permukiman.
6. Kelangsungan finansial
Memiliki kehidupan dalam sebuah permukiman yang dapat melangsungkan aktifitas finansial atau yang biasa disebut *home based enterprise* dalam sebuah permukiman.
7. Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan
Menjadikan sebuah permukiman di dalam atau bagian dari suatu kota yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
8. Kelestarian lingkungan
Menjadikan sebuah permukiman yang di dalamnya melakukan secara disiplin bagian dari kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
9. Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal
Menjadikan sebuah permukiman yang di dalamnya melakukan secara disiplin bagian dari kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam : *environment, social, economy and cultural sustainability*. Dalam thesis ini lebih focus dalam membahas *environmental sustainability*, berkaitan dengan lingkungan sebagai aspek utama pada tema *sustainable architecture* sebagai bagian dari *ecology architecture*. Penerapan aspek *Sustainable Settlements* pada sebuah rancangan arsitektur yang terpenting harus memperlihatkan keberlangsungan ekosistem alam.

Penggunaan material ramah lingkungan, serta meminimalisir eksploitasi alam dalam proses pembangunan dapat mengurangi dampak kerusakan alam secara global. Penggunaan material daur ulang serta pemanfaatan sumber energi alternative juga merupakan bagian dari aspek ini.

2.5. Permukiman Nelayan

Masyarakat desa nelayan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kaya dan kaya sekali serta kelompok ekonomi sedang, miskin sekali yang memiliki ciri-ciri sendiri dan bertempat tinggal ditepi pantai atau dapat juga disebut sebagai bagian dari masyarakat yang membentuk suatu perkampungan yang sering dikenal dengan perkampungan nelayan, yang menjadikan usaha perikanan sebagai mata pencaharian terpenting. Secara umum berdasarkan besarnya bagian yang diterima dalam usaha penangkapan ikan, maka nelayan dapat dibagi atas lima kelompok (Hermanto, 1986), yakni:

- Juragan darat, yaitu orang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Juragan darat hanya menerima bagi hasil penangkapannya yang diusahakan oleh orang lain. Pada umumnya juragan darat menanggung seluruh biaya operasi penangkapannya.
- Juragan laut, yaitu orang yang tidak memiliki perahu, alat penangkapan tetapi dia bertanggung jawab dalam operasi penangkapan di laut.
- Juragan darat-laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap dan dia ikut dalam operasi penangkapan, dia juga menerima bagi hasil sebagai nelayan dan bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan.
- Buruh atau pandega, yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega umumnya menerima bagi hasil dari hasil penangkapan, dan jarang yang diberi upah harian. Buruh atau pandega memperoleh uang makan jika mereka berhasil menangkap ikan.
- Anggota kelompok, yaitu orang yang berusaha pada suatu unit penangkapan secara berkelompok. Ini merupakan suatu system kelembagaan baru dalam usaha penangkapan. Perahu yang diusahakan adalah perahu hasil pembelian dari modal yang dikumpulkan oleh tiap-tiap anggota kelompok.
- Pemimpin kelompok umumnya berfungsi sebagai juragan laut, sedangkan anggota kelompok berfungsi sebagai anak buah kapal. Perkampungan nelayan itu terdiri dari beberapa keluarga nelayan yang hidup bersama dan menjadikan usaha perikanan sebagai mata pencaharian terpenting.

Definisi keluarga nelayan itu sendiri adalah dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan yang memiliki ikatan, perasaan. Selain itu sumber lain juga menyebutkan bahwa keluarga nelayan memiliki arti sebagai sekumpulan manusia yang ada hubungan antara satu sama lain akibat perkawinan, pertalian darah ataupun satu susuan. Keluarga-keluarga nelayan itu ada yang terdiri dari keluarga inti maupun keluarga luas berdasarkan strukturnya, (Rahardjo, 2002).

2.6. Teori Analisa Persepsi

Persepsi sebagai salah satu pendekatan arsitektur perilaku

2.6.1 Pengertian persepsi

Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses mengetahui suatu hal melalui pancainderanya. (Surayin, 2001)

Persepsi manusia dipengaruhi oleh persepsi lingkungannya dan juga lingkungan yang dibentuk oleh ruang dengan warna, tekstur dan perubahan bentuk. Dalam hal ini ruang yang dimaksud adalah ruang spasial.

2.6.2 Arsitektur Perilaku

Arsitektur perilaku adalah Arsitektur yang penerapannya selalu mempertimbangkan perilaku dalam merancang desain arsitektur (sebagai lingkungan fisik) yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya sebagai penghalang terjadinya perilaku. (JB. Watson 1878).

Menurut Rapoport (Haryadi, 1995) kajian arsitektur perilaku - lingkungan salah satunya berkaitan tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku manusia didalamnya dan unsur - unsur fisik yang menyebabkan manusia berperilaku berbeda dalam suatu setting (ruang). Menurut Rapoport (Haryadi, 1995), bahwa perancangan arsitektur menyangkut pengorganisasian dari ruang (space), waktu (time), arti (meaning), serta komunikasi. Jadi aplikasinya ke dalam Arsitektur Perilaku – Lingkungan adalah pengorganisasian ruang, waktu, makna atau kesan, warna, tekstur dan bentuk.

Beberapa konsep penting dalam pengkajian arsitektur perilaku lingkungan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah setting perilaku dan persepsi lingkungan.

2.6.3 Behaviour setting

Behaviour setting adalah “tata perilaku” yaitu pola perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungan fisiknya. Sama halnya dengan pernyataan dalam bahwa tata perilaku sama dengan “ruang aktivitas” untuk menggambarkan suatu hubungan antara perilaku dan lingkungan dalam perancangan arsitektur (Laurens, 2004). Behaviorisme adalah teori yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia ketika dikendalikan oleh faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan setting yang disesuaikan dengan suatu kegiatan, maka akan ada hasil atau pengaruh terhadap perilaku manusia.

Variabel yang berpengaruh terhadap perilaku manusia (Setiawan, 1995), antara lain :

- Ruang. Hal terpenting dari pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah fungsi dan pemakaian ruang tersebut. Perancangan fisik ruang memiliki variabel yang berpengaruh terhadap perilaku pemakainya.
- Ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk ruang harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahi, ukuran yang terlalu besar atau kecil akan mempengaruhi psikologis pemakainya.
- Perabot dan penataannya. Bentuk penataan perabot harus disesuaikan dengan sifat dari kegiatan yang ada di ruang tersebut. Penataan yang simetris memberi kesan kaku, dan resmi. Sedangkan penataan asimetris lebih berkesan dinamis dan kurang resmi.
- Warna. Warna memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang dan mendukung terwujudnya perilaku- perilaku tertentu. Pada ruang, pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut
- Suara, Temperatur dan Pencahayaan. Suara diukur dengan desibel, akan berpengaruh buruk bila terlalu keras. Demikian pula dengan temperatur dan pencahayaan yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang.

2.6.4 Environmental perception (persepsi tentang lingkungan)

Persepsi lingkungan adalah interpretasi tentang suatu setting oleh individu, didasarkan latar belakang budaya, nalar, dan pengalaman individu tersebut. Peran persepsi lingkungan sangat penting dalam perancangan lingkungan karena keputusan perancangan akan di tentukan oleh persepsi lingkungan perancang (Rapoport 1977). Yang dimaksud disini adalah seorang harus memahami persepsi masyarakat tentang lingkungan nya terlebih dahulu maka akan terciptalah lingkungan yang sesuai dengan masyarakat.

- Ruang publik dan privat

Pengertian ruang publik secara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya (Darmawan, 2009). Sedangkan ruang privat yang dimaksud pada penelitian ini adalah penggunaan ruang publik yang beralih fungsi menjadi ruang privat.

Ruang publik tidak memiliki unsur- unsur privat, karena yang diutamakan adalah fungsi -fungsi publik dan interaksi, ini yang membedakannya dengan ruang privat yang tidak memiliki interaksi. Menurut faktor pembentuk ruang ada 3 yaitu;

- a. Fisik, terdiri dari jalan dan massa bangunan (Krier, 1979; Carr, 1992) atau bangunan yang terbuka untuk publik.
- b. Fungsi, meliputi fungsi sosial, komersial, rekreasi, sirkulasi/pergerakan.
- c. Kepemilikan, bersifat publik, privat atau merupakan kombinasi dari keduanya.

2.7.Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut kajian dari penelitian terdahulu terangkum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Qurrotul A'yun 2016	Evaluasi Tingkat Kualitas Hidup dengan Kriteria Eco-Settlement pada Permukiman Nelayan di Desa Pesisir Tambak Wedi	Tingkat kualitas hidup (<i>liveability</i>) dengan kriteria eco-settlement pada permukiman nelayan di desa pesisir Tambak Wedi untuk mengidentifikasi kemungkinan restrukturisasi agar permukiman tersebut menjadi area yang layak huni dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.	Menggunakan kriteria Eco-Settlement
Hilma Tamiami Fachrudin, Fadila Rahmadani 2019	Penataan Kampung Nelayan dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan	Penerapan konsep ekologi pada penataan ini dapat dilihat dari aspek material, aspek energy, orientasi bangunan, dan aspek utilitas. konsep penataan kampung nelayan yang dapat menjadi pemecahan masalah lingkungan kumuh serta membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat.	Menggunakan pendekatan Arsitektur Ekologi
Adityo Dwi Nugroho 2019	Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Studi Kasus Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari	Hasil penelitian adalah 6 penyebab kondisi kumuh: Karakteristik Sosial-budaya, tingkat urbanisasi, keterbatasan lahan, aksesibilitas, fasilitas dan infrastruktur, dan lemahnya kebijakan pemerintah. Dengan konsep pengembangan tepi air, kegiatan pengaturan permukiman diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal, secara bertahap meningkatkan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang berkelanjutan.	Menggunakan konsep pemanfaatan ruang

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Leylita Hariaty Gultom, Sunarti Sunarti 2005	Permukiman kumuh untuk mencapai livable settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang	Pengaruh pengaturan permukiman untuk mencapai permukiman layak huni di Kelurahan Tambakrejo Semarang.	Menggunakan konsep <i>liveable</i> atau layak huni
Prof. Ir. Lilianny S. Arifin, M.Sc, Ph.D. Ir. Hedy Constancia Indrani, MT Marsefio Sevyone Luhukay, S.Sos., M.Si 2012	Optimasi Desain Rumah Nelayan Sebagai Rumah Produktif (Home Based Enterprise Berdasarkan Effisiensi Lahan Terhadap Produktivitas dan Kesehatan	Membangkitkan potensi rumah nelayan menjadi rumah produktif dengan keterbatasan lahan serta pengetahuan akan kesehatan yang minim, maka optimasi desain rumah nelayan sebagai rumah produktif diharapkan mampu memberikan sebuah solusi yang tepat, baik terhadap budaya sebagai nelayan dan juga nilai lokal dari kampung nelayan bagi kota Surabaya.	Mengembangkan ranah <i>Home Based Enterprise</i>

Hasil analisa pada penelitian sebelumnya oleh A'yun dalam judul 'evaluasi tingkat kualitas hidup dengan kriteria *eco-settlement* pada permukiman nelayan di desa pesisir Tambak Wedi'. Bertujuan untuk memperoleh konsep untuk meningkatkan kualitas hidup (*liveability*) dengan kriteria *eco-settlement* pada permukiman nelayan di desa pesisir Tambak Wedi. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi kemungkinan restrukturisasi agar permukiman tersebut menjadi area yang layak huni dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kriteria *eco settlement* sendiri berfokus pada faktor – faktor lingkungan fisik pada permukiman tersebut.

Pada penelitian sebelumnya oleh Fachrudin dan Rahmadani dalam judul 'penataan kampung nelayan dengan pendekatan arsitektur ekologi di kelurahan bagan deli Kota Medan'. Menggunakan penerapan konsep ekologi pada penataan permukiman dengan melihat dari aspek material, aspek energy, orientasi bangunan, dan aspek utilitas. Dan menghasilkan konsep penataan kampung nelayan yang dapat memecahkan masalah lingkungan kumuh serta membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Dalam penelitian tersebut berangkat atau diawali dengan

menggunakan pendekatan arsitektur ekologi. Dimana pendekatan tersebut juga lebih focus pada kondisi ekologis lingkungan permukiman.

Berbeda dengan penelitian oleh Nugroho. Dalam judul ‘kajian pemanfaatan ruang kawasan pesisir studi kasus kawasan permukiman kumuh Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari’. Tujuan dari penelitian adalah penyebab kondisi kumuh terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penerapan konsep pengembangan tepi air, dimana kegiatan pengaturan permukiman diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal, secara bertahap meningkatkan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini cukup menarik, dengan mengkaji suatu daerah yang kumuh dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah keunggulan. Namun *linkage* atau hubungan dalam mengatasi kekumuhan dengan penerapan konsep tersebut belum didukung dengan pendapat dan karakter penghuni dari permukiman yang ada pada studi kasus penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gultom dan Sunarti. Dalam judul penelitian ‘permukiman kumuh untuk mencapai livable settlement di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang’. Penelitian ini mengkaji pengaruh dalam sebuah pengaturan pemukiman untuk mencapai pemukiman layak huni di Kelurahan Tambakrejo Semarang. Sehingga penelitian ini mengkaji kriteria liveable pada studi kaususnya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilianny, Indrani dan Luhukay. Optimasi desain rumah nelayan sebagai rumah produktif (home based enterprise) berdasarkan efisiensi lahan terhadap produktivitas dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk membangkitkan potensi rumah nelayan menjadi rumah produktif dengan keterbatasan lahan. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa pengetahuan dari masyarakat setempat akan kesehatan yang sangat minim. Kemudian dilakukannya optimasi desain rumah nelayan sebagai rumah produktif yang diharapkan mampu memberikan sebuah solusi yang tepat, baik terhadap budaya sebagai nelayan dan juga nilai lokal dari kampung nelayan.

Dari hasil analisa diatas. Dalam melakukan kajian pada permukiman kumuh pada kampung nelayan memiliki berbagai macam metode dan pendekatan yang berbeda. Namun dari isu atau permasalahan yang terjadi sekarang ini. Dengan melihat dari kondisi kota dan banyaknya pemukiman-pemukiman padat penduduk akibat dari urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar di negara maju. Dan hal ini menjadi masalah yang sering kali

sulit untuk di selesaikan. Hal tersebut bisa didasari oleh tingkat perekonomian masyarakat yang rendah. Dalam sumber lain (Muta'ali, 2016) menyimpulkan bahwa permukiman kumuh memiliki indikator sebagai berikut: (1) kurangnya pelayanan dasar; (2) rumah tidak layak huni; (3) tingkat kepadatan tinggi; (4) tingkat kesehatan rendah dan rawan bencana; (5) ketiadaan jaminan hak bermukim; dan (6) eksklusi sosial.

Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh juga mengalami kondisi yang kurang baik secara ekonomi namun hal tersebut juga dapat dibenahi. Hal ini didasari oleh sulit berpartisipasinya masyarakat terhadap aktifitas social seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktifitas sosial lainnya. Padahal permukiman adalah tempat yang harus menjamin kehidupan dan penghidupan. Oleh karna itu hal ini menjadi salah satu factor penting untuk pembangunan berkelanjutan di dunia. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Beberapa pakar memberikan pengertian kota atau perkotaan sebagai area terbangun yang berlokasi saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran dan terdiri dari bangunan-bangunan permukiman, komersial, industri, pemerintahan, prasarana transportasi, dan lain-lain.

Permukiman berkelanjutan adalah upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Hal ini sangat berkesinambungan terhadap kualitas hidup perkotaan yang memadukan tiga aspek *development: social development, economic* dan *enviromtmental protection*. Yakni rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu diperlukannya konsep *Sustainable Settlement* untuk menjadi dasar dan kriteria untuk menjadikan sebuah permukiman kumuh nelayan menjadi sebuah permukiman yang bebas dari kekumuhan dan mejadi permukiman nelayan yang sustainable.

2.8. Sintesa Kajian Pustaka

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena belum banyak penelitian yang memberikan output hasil penelitian berupa kriteria dan konsep untuk menangani

kekumuhan permukiman pesisir tambak, dimana Negara Indonesia adalah negara maritime yang dapat diartikan bahwa wilayah pesisir di Indonesia sangatlah banyak.

Beberapa kajian pustaka yang digunakan pada penjelasan dan pembahasan secara detail dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan penelitian. Kajian pustaka yang pertama terkait dengan permasalahan kekumuhan permukiman nelayan pesisir tambak yang secara garis besar membahas tentang faktor-faktor terjadinya kekumuhan dan bagaimana penanganannya menurut sumber dan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang pertama ini nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor kekumuhan yang terjadi pada permukiman pesisir tambak khususnya yang terjadi di Indonesia yang nantinya akan diperdalam dengan menggunakan observasi pada studi kasus.

Kajian pustaka yang kedua berkaitan gagasan awal konsep yang akan dirumuskan menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Sustainable settlements* merupakan gagasan awal yang dihasilkan dari konferensi UN Habitat. Dan tentu saja konsep tersebut dapat dijabarkan dan rumuskan untuk menangani faktor – faktor yang menjadi permasalahan pada permukiman kumuh pesisir tambak di Indonesia.

Kajian pustaka selanjutnya membahas tentang karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah permukiman pesisir tambak. Tentu saja hal ini menjadi faktor yang penting dalam menganalisis faktor kekumuhan yang terjadi melalui karakteristik para penghuni permukiman pesisir tambak tersebut. Dilakukannya studi pada penelitian terdahulu yang membahas penanganan permukiman nelayan. Dengan mengkaji beberapa penelitian tersebut menghasilkan gap of knowledge dari penelitian ini dan dasar dari pemilihan konsep mengapa dalam penelitian ini menggunakan konsep *sustainable settlements*.

Permukiman berkelanjutan adalah upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang dari faktor tersebut berkesinambungan terhadap kualitas hidup perkotaan yang menerapkan konsep *sustainable settlements* untuk menjadi dasar dan kriteria untuk menjadikan sebuah permukiman kumuh nelayan menjadi sebuah permukiman yang bebas dari kekumuhan dan mejadi permukiman nelayan yang sustainable. Berikut kajian literature serta kerangka penelitian ini digambarkan oleh diagram 2.1

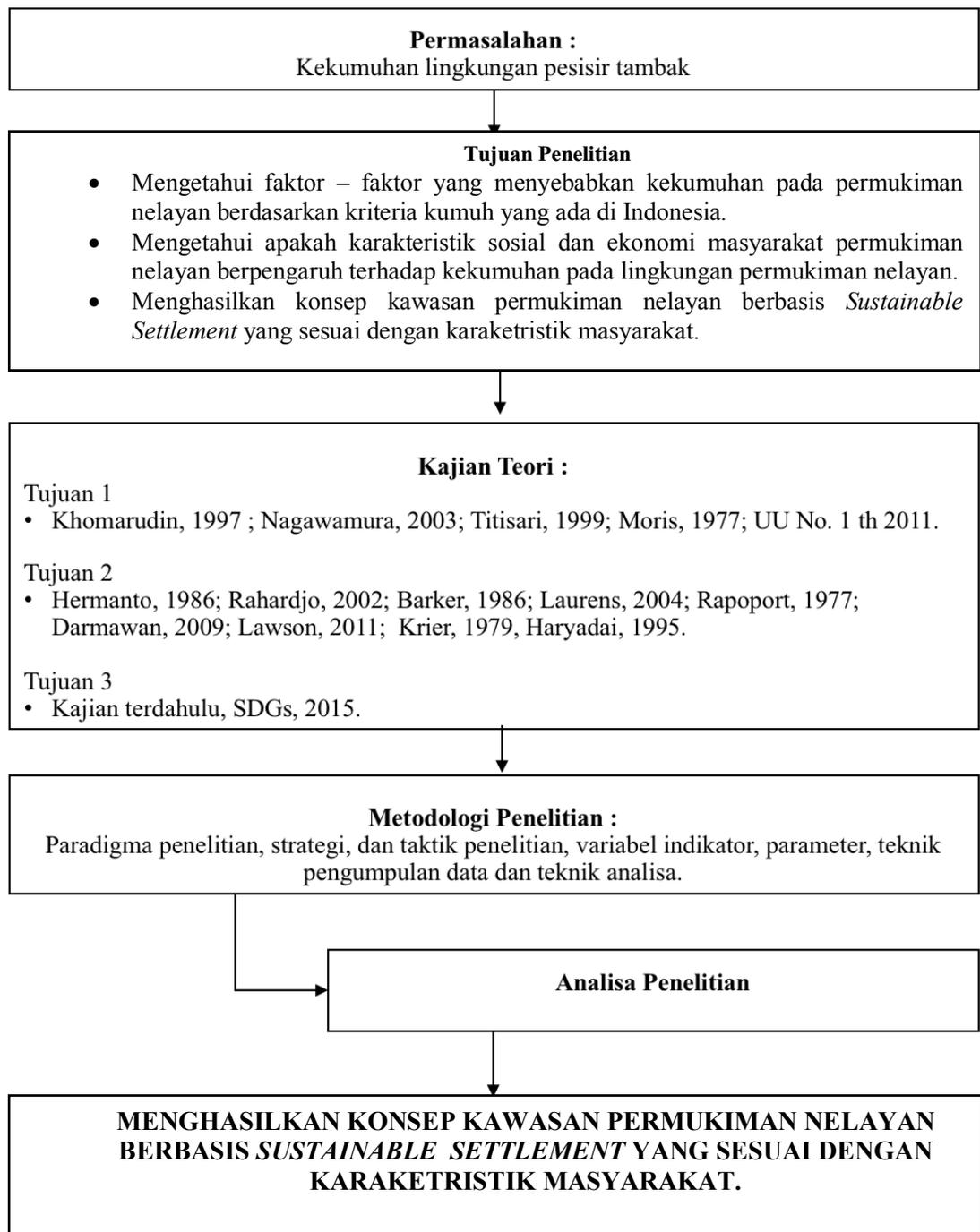


Diagram 2.1 Kajian literature dalam Kerangka Penelitian

Aspek yang diambil dari kajian pustaka pada bab ini terangkum dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1 Aspek dan Indikator dari Kajian Pustaka

Tujuan	Aspek	Sumber	Definisi operasional	Indikator
Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia.	Kepadatan penghuni	Khomarudin, 1997 Sinulingga, 2005	Lingkungan yg berpenghuni padat	Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha
	Kondisi ekonomi	Khomarudin, 1997	Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah	Tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat
	Kepemilikan tanah	Khomarudin, 1997	Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar Undang – Undang yang berlaku.	Kepemilikan hak milik pribadi lahan permukiman
	Karakter bangunan	Nawagamuwa 2003	Usia bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat	Bangunan mudah dipindah, Dibangun dengan bahan seadanya, Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh sejak awal).
	Karakter lingkungan dan Fasilitas Umum	Nawagamuwa 2003	Ketersediaan open space (ruang terbuka hijau) dan fasilitas umum	Ketersediaan open space dan Fasilitas Umum dalam radius 1 km
	Kondisi bangunan	PU Cipta Karya 2015- SNI 03-1733-2004	Bangunan yang memiliki standar keselamatan, keandalan bangunan, dan memenuhi kriteria gedung	Sistem struktur dan konstruksi Bangunan; dan Bahan bangunan.

Tabel 2.1 Aspek dan Indikator dari Kajian

	Aspek	Sumber	Definisi operasional	Indikator
	Aksesibilitas Jalan	PU Cipta Karya 2015-SNI 03-1733-2004	Jalan yang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan	Lebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan
	Layanan air minum	PU Cipta Karya 2015 SNI 03-1733-2004	Standar K4 (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)	Tersedianya jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah, Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.
	Drainase	PU Cipta Karya 2015 - SNI 03-1733-2004	Berkurangnya genangan	Terdapat gorong-gorong, pertemuan saluran, pintu air, pompa dan saluran pusat kota
	Air Limbah	PU Cipta Karya 2015 SNI 03-1733-2004	AL yang memenuhi standar kualitas, keterjangkauan dan terputusnya kontak langsung dengan limbah	Septik tank, bidang resapan dan jaringan pemipaan air limbah.
	Pengelolaan persampahan	PU Cipta Karya 2015	Pengelolaan Persampahan yang memenuhi standar	Terdapat 1 Tempat Pembuangan Sampah dalam 1 RW
	Pengamanan kebakaran	PU Cipta Karya 2015	Standar Penyediaan sarana pengamanan kebakaran	Terdapat sistem pencegahan kebakaran

	Aspek	Sumber	Definisi operasional	Indikator
Menghasilkan konsep kawasan permukiman nelayan berbasis Sustainable Settlement yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.	Aspek perbaikan	Hermanto, 1986; Rahardjo, 2002; Barker, 1986; Laurens, 2004; Rapoport, 1977;	Perbaikan pada permukiman secara fisik, social dan ekonomi Keseluruhan dalam cakupan seluruh aspek perbaikan permukiman kumuh dalam semua faktor.	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
	Aspek program	Hermanto, 1986; Rahardjo, 2002; Barker, 1986; Laurens, 2004; Rapoport, 1977;	Pembentukan program dalam perbaikan permukiman yang bebas kumuh Rasionalitas program perbaikan yang dirumuskan dan dapat diterima oleh warga setempat.	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
	Aspek Partisipasi	Hermanto, 1986; Rahardjo, 2002; Barker, 1986; Laurens, 2004; Rapoport, 1977;	Organisir masyarakat penghuni permukiman setempat. Banyaknya penduduk yang mau mengikut sertakan dirinya dalam program perbaikan kampungnya	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
Menghasilkan konsep kawasan permukiman nelayan berbasis Sustainable Settlement yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.	Prinsip-prinsip Sustainable Settlement	Co-operative Settlements & Traditional Affairs, 2018	Prinsip-prinsip Sustainable Settlement merupakan gagasan dari beberapa komunitas tersebut merupakan bagian dari sebuah perusahaan ataupun perserikatan negara-negara di dunia.	Transformasi spasial fisik Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup Fungsional, responsif dan desain yang inovatif

				<p>Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.</p> <p>Kehidupan kota yang terjangkau</p> <p>Kelangsungan finansial</p> <p>Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan</p> <p>Kelestarian lingkungan</p> <p>Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal</p>
--	--	--	--	---

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi dan menghasilkan konsep yang sesuai untuk diaplikasikan pada kampung pesisir agar bebas dari kekumuhan dan dapat menjadi kampung yang berkelanjutan sesuai dengan konsep *sustainable settlements*. Metode bisa diartikan merupakan suatu proses atau cara dalam mencapai tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu proses yang sudah fokus pada proses penelitian yang umum di seluruh rentang penelitian arsitektur (Groat & Wang, 2013). Bab tiga ini akan menjelaskan pemilihan metode penelitian, dimulai dari paradigma penelitian, strategi penelitian dan teknik penelitian.

3.1. Paradigma Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, terdapat paradigma yang dipakai oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism. Paradigma post-positivism suatu paradigma yang ditandai dengan keyakinan yang lebih beragam dari realitas eksternal yang hanya dapat diketahui dalam beberapa tingkat kemungkinan (Groat & Wang, 2013). Masih ada kemungkinan realitas eksternal yakni dari luar lingkup lingkungan permukiman namun bias juga pada fakta perekonomian, dan fakta social pada lingkungan permukiman yang ada pada studi kasus dan internal yakni kondisi lingkungan kumuh yang dapat mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism karena peneliti memandang bahwa objektivitas dari penelitian ini bukan merupakan hukum mekanistik yang bersifat tetap melainkan masih ada pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhinya. Seperti untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua terkait dengan perkembangan program perbaikan kampung, peneliti melakukan studi literatur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada beberapa narasumber terkait. Sehingga masih ada interpretasi dari narasumber yang dapat mempengaruhi penelitian. Sedangkan untuk mencapai tujuan yang ketiga terkait dengan masyarakat pada konsep, peneliti melakukan observasi, wawancara dan survei dengan menyebarkan kuisioner, sehingga objektivitas penelitian juga terpengaruh dari interpretasi peneliti dan interpretasi para responden.

3.2. Strategi Penelitian

Model desain penelitian yang sesuai adalah model yang pertama yaitu dua tahapan desain penelitian (*two-phase design*). Karena dalam penelitian ini terdapat dua tahapan penelitian, tahap yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab

permukiman kumuh berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini yakni di kawasan permukiman nelayan Tambak Cemandi. Sedangkan untuk tahap yang kedua adalah untuk mendeskripsikan evaluasi dari faktor-faktor yang terjadi akibat kekumuhan yang terjadi di permukiman nelayan, strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian studi kasus.

Tahapan penelitian pertama menggunakan strategi penelitian eksploratif, karena tujuan akhir pada tahapan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kawasan permukiman nelayan dengan berbasis *sustainable settlements*. Dimana pada tahap ini terdapat data primer yang didapatkan dari observasi, wawancara dan didukung dengan sumber data lain dari beberapa narasumber terkait. Sedangkan pada tahap kedua, strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian studi kasus (*case study*), karena tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeskripsikan secara lebih detail bagaimana program yang terkait di dalam konsep melalui observasi, wawancara dan survey.

3.3 Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan disesuaikan dengan metode penelitian yang dilakukan. Berikut detail dari teknik penelitian yang digunakan :

1. Teknik Penelitian pada Metode Kualitatif

Teknik penelitian yang digunakan pada metode penelitian kualitatif meliputi :

- 1) Interaktif, yaitu dengan mengetahui opini atau persepsi yang diperoleh dari pengguna atau masyarakat, melalui wawancara dan diskusi
- 2) Identifikasi, dengan melakukan kodifikasi, pengurangan dan verifikasi pada data-data yang telah diperoleh.
- 3) Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan pada Kawasan penelitian. Diantaranya meliputi:
 - Mengamati aktivitas masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian.
 - Mengamati upaya penyesuaian atau perubahan yang dilakukan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya untuk mendukung aktivitasnya.
 - Mengamati dan mengidentifikasi kondisi lingkungan permukiman masyarakat nelayan.

4) Deskriptif, dengan menggambarkan, mendokumentasikan dan menganalisisnya sesuai dengan apa yang ingin dicapai pada tujuan penelitian.

5) Teknik Penelitian Studi Kasus

Teknik penelitian yang digunakan pada metode penelitian studi kasus meliputi:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1) Observasi | 5) Analisis dokumen |
| 2) Survey | 6) Interpretasi |
| 3) Interview | 7) Explanation |
| 4) Deskriptif | |

3.3.1 Teknik Penentuan Sampel

Teknik Penentuan Sampel dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kasus yang membutuhkan pembahasan dan analisa yang lebih mendalam (Neuman, 2007). Penjelasan diatas menjadi alasan dalam penentuan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini. Untuk tahapan penelitian pertama yang menggunakan strategi penelitian identifikasi perkampungan pesisir kumuh, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan narasumber yang akan diwawancara secara mendalam terkait kondisi terkini dari kampung yang dijadikan studi kasus. Sedangkan untuk tahap penelitian kedua yang menggunakan strategi penelitian studi kasus, untuk melihat bagaimana kesesuaian kriteria dan konsep yang dibuat oleh peneliti terkait konsep kampung dengan *Sustainable Settlements* dengan opini masyarakat. Selain itu pada tahap ke dua teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden yang akan diwawancara maupun yang akan dijadikan sebagai sasaran pendistribusian kuisisioner.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Tambak Cemandi Sidoarjo yang bermukim di permukiman kumuh, karena tidak semua permukiman yang ada di kelurahan tersebut merupakan permukiman kumuh. Jumlah populasi penduduk pada wilayah penelitian ini adalah 227 jiwa dan untuk menentukan jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini dengan rumus pengambilan sampel dengan ukuran populasi terhitung menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana : N = Ukuran populasi n = Besar sampel yang dibutuhkan d = Standar error yang digunakan (0,1) Dengan rumus tersebut, kemudian dimasukkan jumlah penduduk dalam wilayah studi, yaitu sebesar 250 jiwa dan tingkat error yang diinginkan adalah 10%, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$n = 227 : (227(0,1)^2 + 1) = 72 = 72 \text{ responden.}$$

Berikut indikator dan parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Aspek dan Parameter Penelitian

Tujuan	Aspek	Definisi operasional	Indikator	Parameter
Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia.	Kepadatan penghuni	Lingkungan yg berpenghuni padat	Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha	Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha; dan Tidak Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha
	Kepemilikan tanah	Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar Undang – Undang yang berlaku.	Kepemilikan hak milik pribadi lahan permukiman	Milik pribadi, Milik Pemerintah, Tidak tahu kepemilikannya
	Karakter bangunan	Bangunan mudah dipindah, Dibangun dengan bahan seadanya, Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni.	1.Usia bangunan yang sudah terlalu tua, 2.tidak terorganisasi, 3. Minim ventilasi, pencahayaan dan 4. sanitasi yang tidak memenuhi syarat	1 poin sedikit kumuh 1 poin cukup kumuh 2 poin kumuh 3 Poin sangat kumuh
	Karakter lingkungan dan Fasilitas Umum	Ketersediaan open space (ruang terbuka hijau) dan fasilitas umum	Ketersediaan open space dan Fasilitas Umum dalam radius 1 km	Ada; dan Tidak Ada
	Kondisi bangunan	Bangunan yang memiliki standar keselamatan, keandalan bangunan, dan memenuhi kriteria gedung	sistem struktur dan konstruksi bangunan; dan bahan bangunan.	System struktur yang baik sesuai standar / tidak
	Aksesibilitas Jalan	Jalanyang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan	Lebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan	Ada; dan Tidak Ada
	Layanan air minum	Standar K4 (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, Keterjangkauan)	Tersedianya jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah, pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.	Ada; dan Tidak Ada

Tabel 3.1 Aspek dan Parameter Penelitian

	Aspek	Definisi operasional	Indikator	Parameter
	Drainase	Berkurangnya genangan	Terdapat gorong-gorong, pertemuan saluran, pintu air, pompa dan saluran pusat kota	Ada; dan Tidak Ada
	Air Limbah	AL yang memenuhi standar kualitas, keterjangkauan dan terputusnya kontak langsung dengan limbah	Septik tank, bidang resapan dan jaringan pemipaan air limbah.	Ada; dan Tidak Ada
	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan Persampahan yang memenuhi standar	Terdapat 1 Tempat Pembuangan Sampah dalam 1 RW	Ada; dan Tidak Ada
	Pengamanan kebakaran	Standar Penyediaan sarana pengamanan kebakaran	Terdapat sistem pencegahan kebakaran	Ada; dan Tidak Ada
	Tingkat Pendidikan masyarakat Prilaku masyarakat	Tingkat Pendidikan masyarakat	Kondisi jenjang Pendidikan yang dimiliki masyarakat nelayan tambak melalui Pendidikan formal.	Tingkat pendidikan Menurut UU Nomer 20 Tahun 2003, pendidikan formal di Indonesia terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
	Pendapatan masyarakat	Besarnya jumlah pendapatan masyarakat		Penghasilan / bulan menurut Asian Development Bank (2010) : Menengah bawah : 780.000 – 1.560.000, Menengah tengah : 1.560.000-3.900.000 , Menengah atas : 3.900.000-7.800.000 Kaya : >7800000

Tabel 3.1 Aspek dan Parameter Penelitian

	Aspek	Definisi operasional	Indikator	Parameter
		Kepedulian masyarakat	Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
Mengetahui apakah karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan berpengaruh terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman nelayan.	Aspek perbaikan	Perbaikan pada permukiman secara fisik, social dan ekonomi	Keseluruhan dalam capukan seluruh aspek perbaikan permukiman kumuh dalam semua faktor.	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
	Aspek program	Pembentukan program dalam perbaikan permukiman yang bebas kumuh	Rasionalitas program perbaikan yang dirumuskan dan dapat diterima oleh warga setempat.	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik
	Aspek Partisipasi	Organisir masyarakat penghuni permukiman setempat.	Banyaknya penduduk yang mau mengikut sertakan dirinya dalam program perbaikan kampungnya	Persetujuan masyarakat terhadap program <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik

Tabel 3.1 Aspek dan Parameter Penelitian

	Definisi operasional	Indikator	Parameter	Aspek
Menghasilkan konsep kawasan permukiman nelayan berbasis <i>Sustainable Settlement</i> yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.	Prinsip-prinsip <i>Sustainable Settlement</i>	Prinsip-prinsip Sustainable Settlement merupakan gagasan dari beberapa komunitas tersebut merupakan bagian dari sebuah perusahaan ataupun perserikatan negara-negara di dunia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi spasial fisik 2. Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup 3. Fungsional, responsif dan desain yang inovatif 4. Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas. 5. Kehidupan kota yang terjangkau 6. Kelangsungan finansial 7. Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan 8. Kelestarian lingkungan 9. Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal 	<p>Persetujuan masyarakat terhadap program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Kurang • Kurang • Cukup • Baik

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder. Survey primer dan sekunder dilakukan untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Data Primer, data yang diambil di lokasi penelitian diambil dengan cara melakukan observasi, wawancara, diskusi dan dokumentasi.
2. Data Sekunder, untuk mendukung penelitian ini juga diambil data sekunder seperti data-data dari kelurahan atau lingkungan setempat.

3.6. Alat pengambil data yang akan digunakan.

Alat-alat yang digunakan untuk mengambil data disesuaikan dengan metode penelitian yang dilakukan

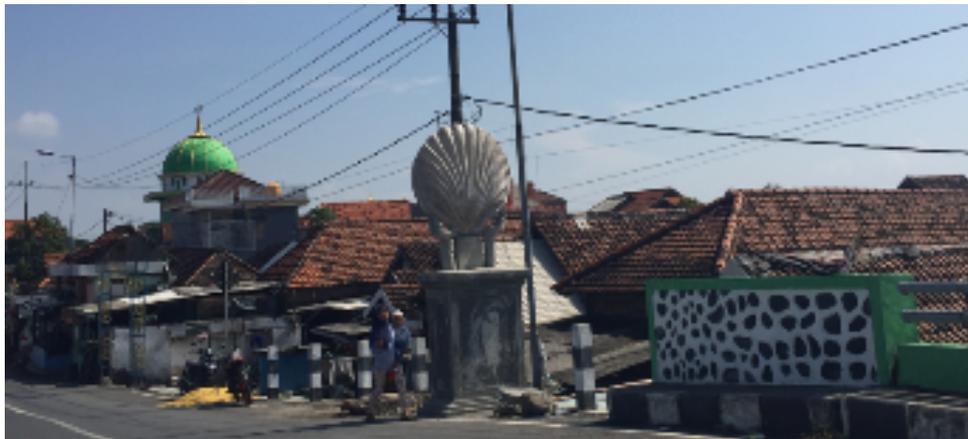
1. Alat yang digunakan untuk metode penelitian kualitatif adalah :
 - a. Kamera foto, kamera perekam
 - b. Data-data kualitatif dan kuantitatif dari pengguna atau lingkungan setempat.
 - c. Sampel
2. Alat yang digunakan untuk metode penelitian studi kasus adalah :
 - a. Alat-alat tulis
 - b. Kamera
 - c. Perekam
 - d. Hardware
 - e. Software

3.7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan kekumuhan di permukiman nelayan, melakukan evaluasi, serta menghasilkan sebuah konsep wilayah permukiman nelayan yang bebas kumuh dengan berbasis *sustainable settlements*. Lokasi yang kami jadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini berada di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia. Hal ini dikarenakan lokasi yang kami pilih memiliki kesesuaian terhadap kondisi dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sehingga dapat kami jadikan sebagai objek studi kasus. Lokasi penelitian dapat dilihat di gambar 3.1.



Gambar 3.1 : Studi Kasus D
 Sumber : Sekematik Penulis



Gambar 3.2 : Gerbang Permukiman Nelayan Tambak Cemandi
 Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 3.3. : Kondisi Fisik Rumah pada Permukiman Nelayan Tambak Cemandi
 Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 3.4 Kondisi Fisik Lingkungan pada Permukiman Nelayan Tambak Cemandi
Sumber : Dokumentasi Penulis



Gambar 3.5 : Kegiatan Ekonomi pada Permukiman Nelayan Tambak Cemandi
Sumber : Observasi Penulis



Gambar 3.6: Suasana Kegiatan Keseharian Warga pada Permukiman Nelayan Tambak Cemandi
Sumber : Observasi Penulis

3.8 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan tahapan penelitian yang pertama, strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian identifikasi kekumuhan, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan pada tahap ini adalah melalui observasi, kajian literatur dan wawancara. Oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk tahap yang kedua, strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian studi kasus, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan survei dengan mendistribusikan kuisioner. Sehingga teknik analisa data yang digunakan pada tahap ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, *forum group discussion*.

Fungsi FGD digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkannya pemahaman lebih dari satu sudut pandang, adanya perspektif yang berbeda dan dibutuhkannya komunikasi antar kelompok, untuk mendapatkan fakta-fakta secara lebih detail dan lebih mendalam. FGD juga dapat dilakukan untuk memverifikasi dari pengamatan dan analisa yang dilakukan peneliti. Sehingga dapat memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan. Disini peneliti memahami lebih lanjut keragaman perspektif di antara kelompok atau kategori masyarakat. Dan mendapatkan informasi berupa data kualitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan detail serta hasil dari penelitian yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan.

Tabel 3.2 Tabel Teknik Analisa

Tujuan	Aspek	Sub Aspek	Teknik ambilan Data	Teknik Analisa Data	Validasi Data	Perkiraan Hasil	
Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia.	Kepadatan penghuni permukiman nelayan	Lingkungan yang berpenghuni padat Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<50% penduduk yang memiliki hunian dengan kepadatan padat Melebihi 500 org per Ha, 250-400 jiwa/Ha	
	Kepemilikan tanah permukiman nelayan	Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar Undang – Undang yang berlaku.	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<25% penduduk yang memiliki Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar Undang – Undang yang berlaku	
	Karakter bangunan permukiman nelayan	Bangunan mudah dipindah, Dibangun dengan bahan seadanya, Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni.	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	>50% tbangunan dibangun dengan bahan seadanya,	
	Karakter lingkungan dan Fasilitas Umum	Ketersediaan open space (ruang terbuka hijau)		Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	>50% tersedi namun belum 100% difungsikan semestinya
		Ketersediaan fasilitas umum		Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	t>50% tersedi namun belum 100% difungsikan semestinya
	Kondisi bangunan di permukiman nelayan	Bangunan yang memiliki standar keselamatan		Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<25% penduduk yang memiliki sistem tandar keselamatan

Tabel 3.2 Tabel Teknik Analisa

	Aspek	Sub Aspek	Teknik ambilan Data	Teknik Analisa Data	Validasi Data	Perkiraan Hasil
	Aksesibilitas Jalan	Jalan yang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	>50% tersedi namun belum 100% difungsikan semestinya
	Layanan air minum	Tersedianya jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah, pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	>50% tersedi namun belum 100% difungsikan semestinya
	Drainase	Terdapat gorong-gorong, pertemuan saluran, pintu air, pompa dan saluran pusat kota	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	>50% tersedi namun belum 100% difungsikan semestinya
	Air Limbah	Tersedianya septik tank, bidang resapan dan jaringan pemipaan air limbah.	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<50% penduduk yang memiliki bidang resapan dan jaringan pemipaan air limbah.
	Pengelolaan persampahan	Terdapat 1 Tempat Pembuangan Sampah dalam 1 RW	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<50% penduduk yang mau membuang sampah pada tempat pembuangan sampah
	Pengamanan kebakaran	Terdapat sistem pencegahan kebakaran	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<25% pendudk yang memiliki sistem pencegahan kebakaran

	Aspek	Sub Aspek	Teknik ambilan Data	Teknik Analisa Data	Validasi Data	Perkiraan Hasil
	Tingkat Pendidikan masyarakat	Jumlah penduduk tidak bersekolah, lulusan SD, SMP, SMA hingga sarjana	Kajian literature, survey	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<50% penduduk yang sekolah hingga bangku SMA
	Pendapatan masyarakat	Jumlah penduduk yang tergolong, menengah bawah, menengah, menengah atas, kaya raya.	Kajian literature, observasi dan wawancara	Deskriptif kualitatif	Triangulasi	<50% penduduk yang tergolong menengah ke atas
	Kepedulian masyarakat	Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.	Kajian literature, observasi dan	Deskriptif kualitatif	<i>Forum Group Discussion</i>	> 50% Penduduk yang peduli dan sadar terhadap lingkungan.
Mengetahui apakah karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan berpengaruh terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman nelayan.	Aspek perbaikan	Banyaknya persetujuan warga akan evaluasi Keseluruhan dalam capukan selurh aspek perbaikan permukiman kumuh dalam semua faktor.	Kajian literature dan <i>in-depth-interview</i>	Deskriptif kualitatif	<i>Forum Group Discussion</i>	> 50% Penduduk yang setuju dan turut berpartisipasi dalam <i>Sustainable settlements</i>
	Aspek program	Banyaknya persetujuan warga akan evaluasi dalam Pembentukan program dalam perbaikan permukiman	Kajian literature dan <i>in-depth-interview</i>	Deskriptif kualitatif	<i>Forum Group Discussion</i>	> 50% Penduduk yang setuju dan turut berpartisipasi dalam penerapan konsep
	Aspek Partisipasi	Banyaknya persetujuan warga akan evaluasi Banyaknya penduduk yang mau mengikut sertakan dirinya dalam program perbaikan kampungnya	Kajian literature dan <i>in-depth-interview</i>	Deskriptif kualitatif	<i>Forum Group Discussion</i>	> 50% Penduduk yang setuju dan turut berpartisipasi dalam penerapan <i>Sustainable settlements</i>

	Aspek	Sub Aspek	Teknik ambilan Data	Teknik Analisa Data	Validasi Data	Perkiraan Hasil
Menghasilkan konsep kawasan permukiman nelayan berbasis <i>Sustainable Settlement</i> yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.	Prinsip-prinsip <i>Sustainable Settlement</i>	Banyaknya persetujuan warga akan Prinsip-prinsip Sustainable Settlement yang diusulkan	Kajian literature dan <i>in-depth-interview</i>	Deskriptif kualitatif	<i>Forum Group Discussion</i>	> 70% Penduduk yang setuju akan penerapan Sustainable Settlement. Dalam penanganan pengelolaan lingkungan permukiman yang diusulkan

3.9 Bagan Alur Analisa Penelitian

Berikut bagan alur analisa dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan dapat memudahkan dalam melakukan serta memahami runtutan analisa yang dilakukan.

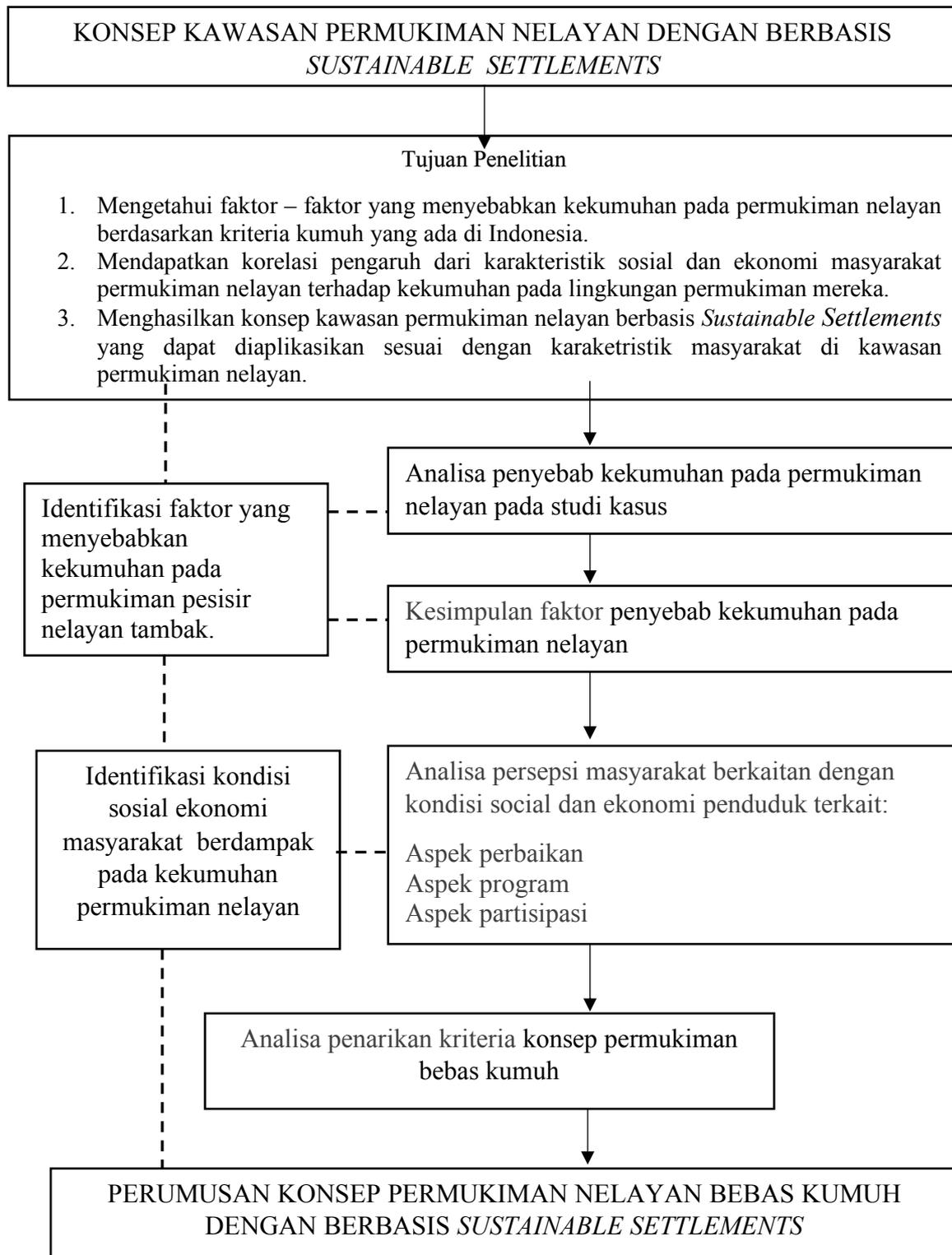
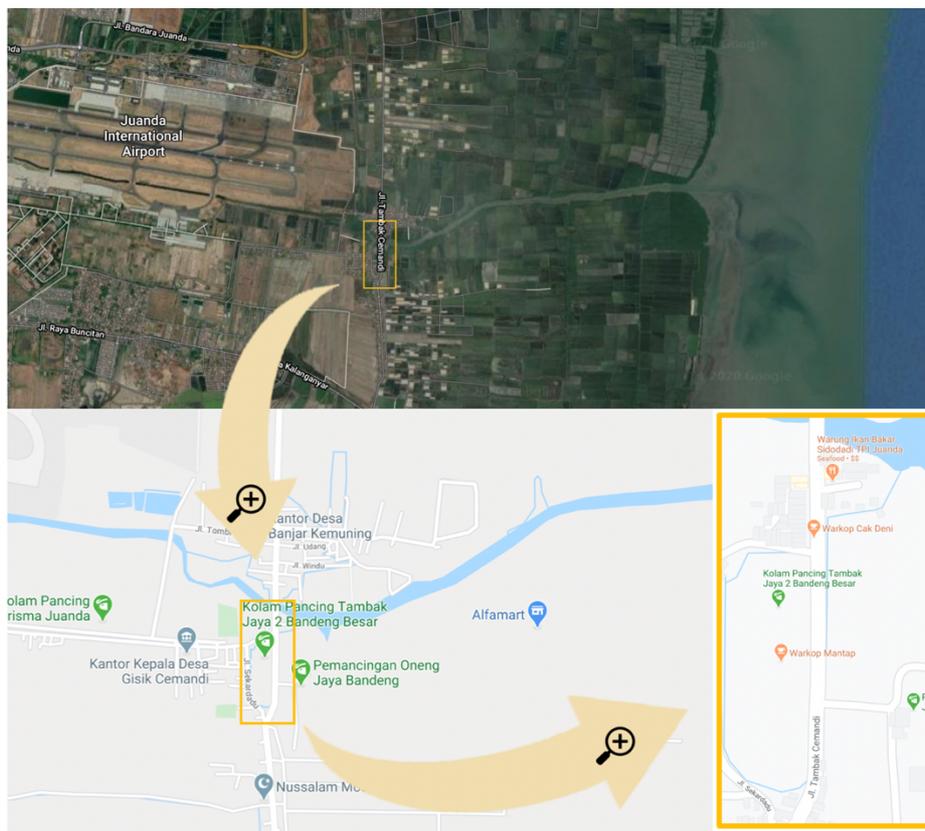


Diagram 3.1 Bagan Alur Analisa Penelitian

BAB VI GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1 Wilayah Administratif

Kawasan yang dijadikan objek studi kasus dalam penelitian “*Konsep Kawasan Permukiman Nelayan dengan Berbasis Sustainable Settlements*”. Merupakan satu karidor jalan yang menjadi akses utama dalam kawasan permukiman nelayan di Desa Tambak Cemandi. Berikut divisualisasikan pada gambar 4.1.



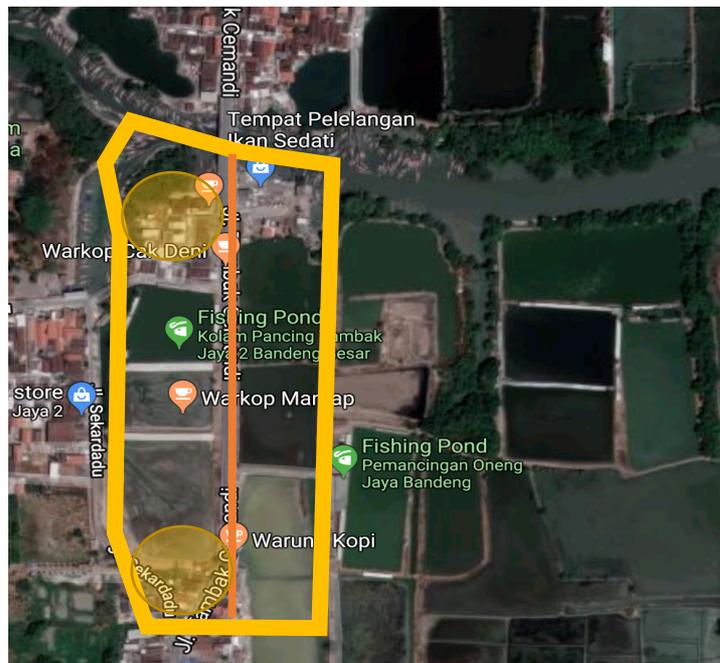
Gambar 4.1 Lokasi dan Batas Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidoarjo tepatnya berada pada Kecamatan Sedati. Luas wilayah area studi kasus yang akan diteliti kurang lebih 6 Ha. Batasan wilayah yang digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Area mangrove dan muara sandaran kapal nelayan
- Sebelah Timur : Kolam – kolam tambak dan laut
- Sebelah Barat : Desa Tambak Cemandi

Sebelah Selatan : Desa Tambak Cemandi

Sedangkan untuk permukiman yang ada tepat di koridor jalan Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo memiliki lahan kurang lebih seluas 1 Ha. Karena permukiman nelayan di Kawasan ini terpusat di dua titik yakni di ujung utara dan selatan koridor jalan Tambak Cemandi.

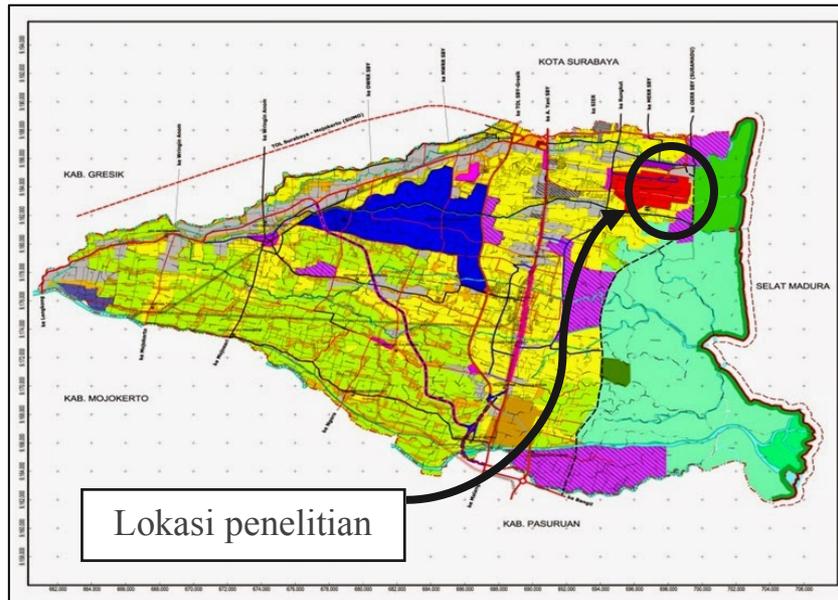


Gambar 4.1 Lokasi Permukiman Nelayan

4.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan yang ada pada kawasan penelitian “*Konsep Kawasan Permukiman Nelayan dengan Berbasis Sustainable Settlements*” ini adalah sebagai berikut :

- Warna Ungu : Kawasan permukiman pesisir
- Warna Kuning : Pusat kegiatan lokal
- Warna Abu- Abu : Zona industri
- Warna Kuning : Permukiman pedesaan



Gambar 4.2 RTRW Kabupaten Sidoarjo
 Sumber : Dinas PU Sidoarjo

Hal ini menjadi sangat menarik karena permukiman nelayan yang ada pada lingkup lokasi studi kasus, bukan sekedar permukiman nelayan namun lokasi tersebut juga memiliki peranan penting sebagai pusat kegiatan lokal dan juga perekonomian di wilayah tersebut.

4.3 Kondisi lingkungan di sekitar kawasan penelitian

Kondisi pada Kawasan yang dijadikan objek studi kasus dalam penelitian “*Konsep Kawasan Permukiman Nelayan dengan Berbasis Sustainable Settlements*”. Memiliki kondisi lingkungan yang tergolong kumuh pada kawasan lingkungan di sekitar permukiman nelayan di Desa Tambak Cemandi.



Gambar 4.3 Kondisi Lingkungan pada Landmark di Kawasan penelitian

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 4.4 Kondisi Lingkungan sekitar permukiman di Kawasan penelitian

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Sampah yang ada di lingkungan sekitar permukiman kebanyakan berada di pinggir kolam atau tambak, sungai dan di pinggir rumah. Hal inilah yang membuat kondisi kebersihan yang sangat buruk dan terlihat sangat kumuh.



Gambar 4.5 Kondisi Lingkungan pusat kegiatan di Kawasan penelitian

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kondisi di lingkungan sekitar permukiman tergolong sangat kumuh dengan melihat banyaknya sampah kondisi bangunan yang tidak tertata dan sesuai standar.

4.4 Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat perkembangan di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduknya, semakin tinggi pula permintaan kebutuhan sumberdaya yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mengalami perkembangan yang pesat.

Jumlah penduduk di Kawasan yang dijadikan objek studi kasus dalam penelitian “*Konsep Kawasan Permukiman Nelayan dengan Berbasis Sustainable Settlements*” 227 jiwa dengan luas lahan permukiman yang dihuni seluas 1 hektar. Berikut tabel 4.1 terkait jumlah penduduk yang tinggal dipermukiman pada lingkup studi kasus :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kawasan Studi

Jenis Kelamin	Usia				
	<5 th	5-12 th	13-20 th	21-55 th	>55 th
Laki - laki (121 Jiwa)	12	17	30	41	21
Perempuan (106 Jiwa)	13	13	27	32	23

Sumber: Permerintah Desa Tambak Cemandi, Sidoarjo

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki - laki dan perempuan dengan usia produktif yang paling banyak menghuni kawasan permukiman nelayan di kawasan studi. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang berusia lanjut juga tergolong tinggi. Berikut tabel 4.2 yang berisikan daftar status perbandinagn status pekrjaan para penduduk di permukiman Tambak Cemandi.

Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk di Kawasan Studi

Jenis pekerjaan	Usia dan Jenis Kelamin									
	<5 th		5-12 th		13-20 th		21-55 th		>55 th	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tidak Bekerja	12	13	4	2	2	2	-	5	8	10
Pelajar	-	-	13	11	14	7	-	-	-	-
Juragan Darat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Juragan Laut	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Buruh atau Pandega	-	-	-	-	6	-	8	-	-	-
Anggota Kelompok	-	-	-	-	4	-	15	-	5	-
Pemimpin Kelompok	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-
Wirausaha perikanan	-	-	-	-	2	8	6	17	-	8
Wirausaha diluar perikanan dan kelautan	-	-	-	-	-	6	6	7	3	5
Pegawai instansi tertentu diluar perikanan dan kelautan	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-

Sumber : Permerintah Desa Tambak Cemandi, Sidoarjo

4.5 Kondisi Fisik Rumah di Permukiman Kawasan Studi

Kawasan permukiman di wilayah penelitian ini memusat pada beberapa titik. Dalam mengidentifikasi permukiman kumuh dapat dilihat dari kondisi fisik permukimannya. Berikut adalah gambaran rumah-rumah nelayan yang ada di kawasan permukiman Tambak Cemandi Sidoarjo.



Gambar 4.6 Kondisi Fisik Rumah di Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Berikut beberapa poin penting yang dijadikan sebagai standar terangkum dalam tabel 4.3 terkait kondisi fisik permukiman di kawasan penelitian :

Tabel 4.3 Kondisi Fisik Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Faktor fisik	Kondisi	
	Baik	Kurang
Pencahayaan	-	√
Sirkulasi udara	-	√
Material bangunan	-	√
Bentuk bangunan rumah	-	√

Berikut uraian penjelasan dari kesimpulan observasi lapangan pada kawasan studi penelitian di rumah – rumah warga Kampung Nelayan Tambak Cemandi :

- **Bukaan dan pencahayaan alami**

Bukaan dan pencahayaan alami yang terdapat pada sebagian besar rumah penduduk di kawasan permukiman kumuh nelayan ini cukup kurang dikarenakan sosoran pada setiap rumah sangat panjang. Sehingga cahaya yang didapatkan tidak bisa masuk hingga ke dalam ruang tamu para penduduk. Setiap rumah memiliki jendela namun tidak semua warga membuka jendela mereka dikarenakan bau amis dari ikan hasil tangkapan laut agar tidak masuk ke dalam rumah. Hal ini banyak dijumpai pada rumah warga sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam rumah.

- **Sirkulasi udara**

Sirkulasi udara di kebanyakan rumah yang ada pada kawasan permukiman studi memiliki ventilasi kurang baik. Hal disebabkan bau “apek” atau tidak sedap karena ruangan yang kurang memiliki ventilasi di dalam rumah mereka. Sirkulasi udara yang tidak segar di dalam ruangan ini lah yang membuat kondisi rumah dikategorikan sebagai rumah kumuh.

- **Material bangunan**

Material bangunan yang digunakan pada sebagian besar para penduduk yang ada di wilayah permukiman nelayan pada studi kasus cukup beragam. Namun penggunaan material semi permanen seperti tiang bambu-pun masih tergolong didominasi wilayah permukiman ini. Kurangnya perawatan pada material bangunan dan komponen bangunan juga sangat kurang. Sehingga permukiman yang menggunakan material non-permanen atau semi fix-permanen usia banguannya pun cukup tua karena tidak terawat ,hal - hal ini lah yang cukup membahayakan keselamatan para penduduk yang tinggal di permukiman.

- **Bentuk bangunan**

Bentuk rumah yang ada pada kawasan permukiman memiliki bentuk atap pelana dan dibagian depan rumah memiliki teras dengan sosoran yan cukup panjang. Rumah di wilayah permukiman ini semuanya memiliki rumah 1 lantai. Dengan luasan bangunan yang berbeda-beda karena permukiman nelayan ini tumbuh dengan alami.

- Keselamatan bangunan

Berkaitan dengan konstruksi yang digunakan dalam sebagian besar bangunan yang ada di permukiman nelayan Tambak Cemandi. Terdapat beberapa ragam konstruksi rumah yang ada di Kawasan ini. Dari yang mulai lemah system konstruksinya hingga yang sudah memenuhi standart konstruksi bangunan. Sistemkonstruksi yang paling lemah yang ada permukiman ini adalah bangunan rumah yang memiliki fasad berupa anyaman bambu dan konstruksinya menggunakan bambu yang sudah memiliki usia bangunan yang cukup lama, sehingga keselamatan dari bangunan ini sangat dikhawatirkan. Seperti gambar 4.7 dari hasil obsevrasi kami berikut ini.



Gambar 4.7 Kondisi Keselamatan Bangunan Rumah di Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Sumber : Dokumentasi Peneliti

- Kemudahan akses ke bangunan

Berkaitan dengan system aksesibilitas yang dimiliki oleh bangunan rumah yang ada di desa permukiman nelayan Tambak Cemandi. Memiliki akses yang cukup mudah untuk menjangkau kawasan – kawasan lain yang ada di kawasan ini. Hal ini dikarenakan letak dari permukiman yang paling depan berada tepat pada koridor jalan utama. Yakni jalan tambak cemandi yang memiliki peran sebagai jalan utama penghubung Kawasan ini kawsan lain.

4.6 Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan pada wilayah kawasa studi ini dikarenakan bangunan rumah pada kawasan ini tumbuh secara natural. Sehingga memiliki jalan – jalan atau koridor yang tidak beraturan dengan sifat yang sangat natural atau tumbuh secara spontan dan alami selayaknya permukiman informal. Seperti yang saya gambarkan pada gambar 4.8 berikut ini.



Gambar 4.8 Kondisi Ketidakteraturan Bangunan Rumah di Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Kawasan permukiman ini tumbuh secara natural sehingga tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), kawasan ini juga tidak memiliki pengaturan dalam bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona karena tumbuh secara natural, sehingga kawasan permukiman nelayan yang dijadikan studi kasus ini juga tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL.

Karena Kawasan permukiman studi kasus ini tidak memiliki pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, memiliki ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan yang kurang memenuhi standar sebuah kualitas hunian yang bagus untuk dihuni.

4.7 Tingkat Kepadatan Bangunan

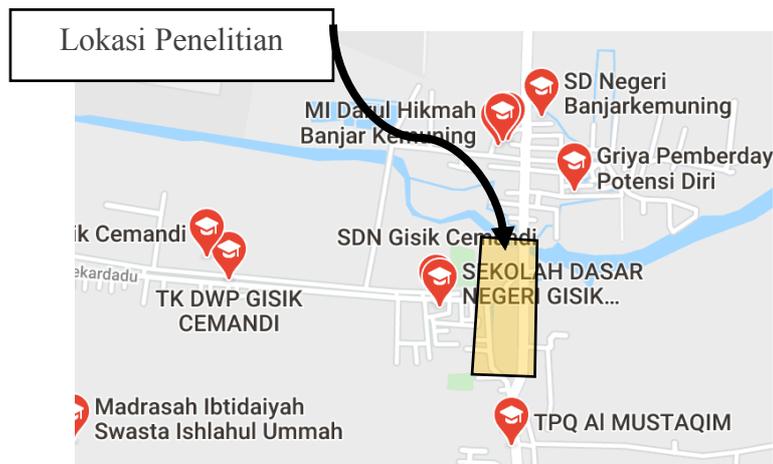
Tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi jika dilihat dari klasifikasi yang ditentukan oleh Dinas Permukiman dalam SNI 03-173-2004. Dengan ketentuan rencana tata ruang sebagai permukiman nelayan, dimana merupakan kondisi bangunan rumah yang dihuni oleh mayoritas sebagai nelayan pada permukiman yang terletak di desa Tambak Cemandi. Kawasan ini merupakan studi kasus dalam permukiman kumuh nelayan namun tidak dalam faktor kepadatan, karena area dari Kawasan kampung tambak cemandi ini masih memiliki banyak lahan. Sehingga tidak memiliki kepadatan yang tinggi. Untuk mengetahui beberapa aspek dari kepadatan bangunan. Kawasan Kampung Tambak Cemandi mempunyai luasan sekitar 1 ha yang terletak pada kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk yang menghuni Kampung Cemandi yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini sekitar 227 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sedang. Kebutuhan luas per meter persegi bagi setiap orang yang dapat dihitung melalui rumus. Luasan unit rumah m² dibagi dengan jumlah jiwa atau penduduk yang menempati dalam 1 rumah. sedangkan. Standar SNI 03-173-2004, dimana klasifikasi kepadatan penduduk sedang sekitar 151-200 jiwa/ha. Sedangkan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha.

4.8 Sarana dan Prasarana Pendukung Permukiman

Sebuah kawasan permukiman memiliki standar ketersediaan dan kesesuaian sarana dan prasarana pendukung permukiman. Sama halnya di wilayah penelitian ini sarana dan prasarana pendukung pada permukiman nelayan dalam studi kasus diidentifikasi dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI sebagai acuan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penentu suatu permukiman dapat tergolong sebagai permukiman kumuh. Berikut beberapa poin penting yang dijadikan sebagai standar.

4.8.1 Sarana Pendidikan

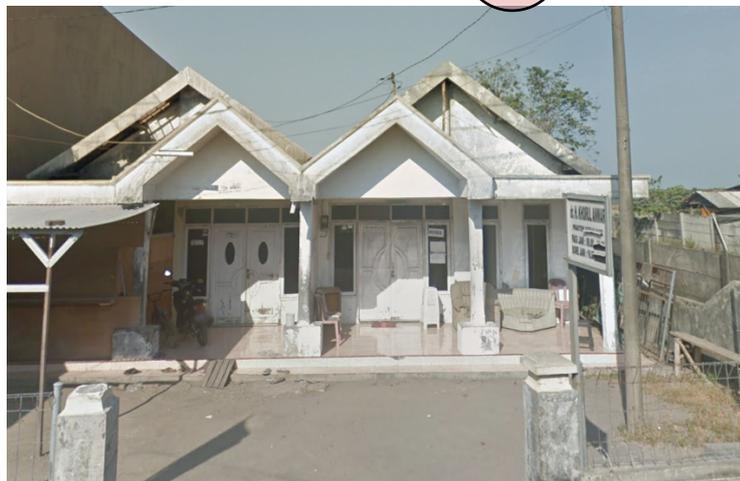
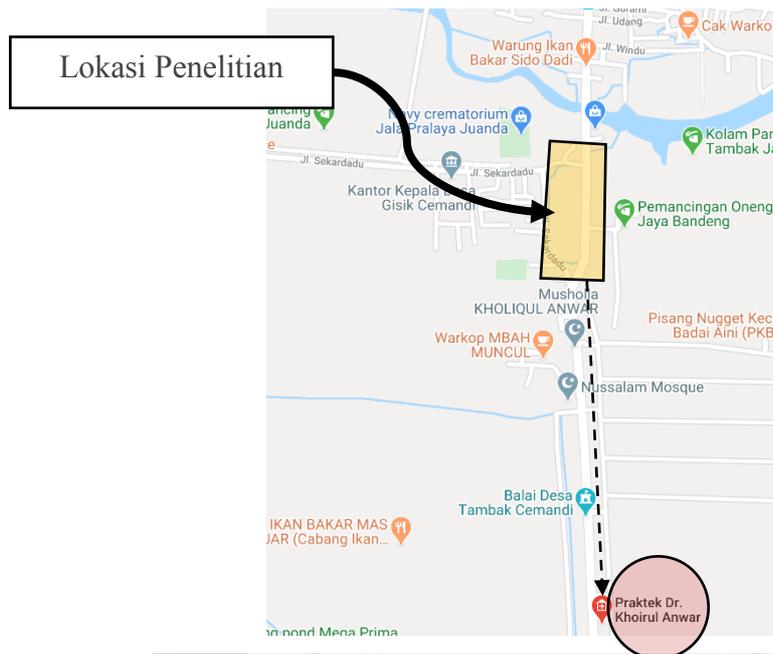
Dalam lingkup kawasan penelitian terdapat beberapa sarana Pendidikan terdekat yakni SDN Gisik Cemandi yang berada dalam radius kurang dari 1 km. Sedangkan sarana Pendidikan SMP, SMA cukup jauh dari lingkup kawasan penelitian berjarak lebih dari 5 km. hal ini juga sangat mempengaruhi kondisi tingkat pendidikan para penduduk yang tinggal di Desa Tambak Cemandi Sidoarjo. Berikut gambaran lokasi sarana pendidikan terdekat dari kawasan lokasi penelitian.



Gambar 4.7 Lokasi Sarana Pendidikan di Lingkup Kawasan Penelitian

4.8.2 Sarana Kesehatan

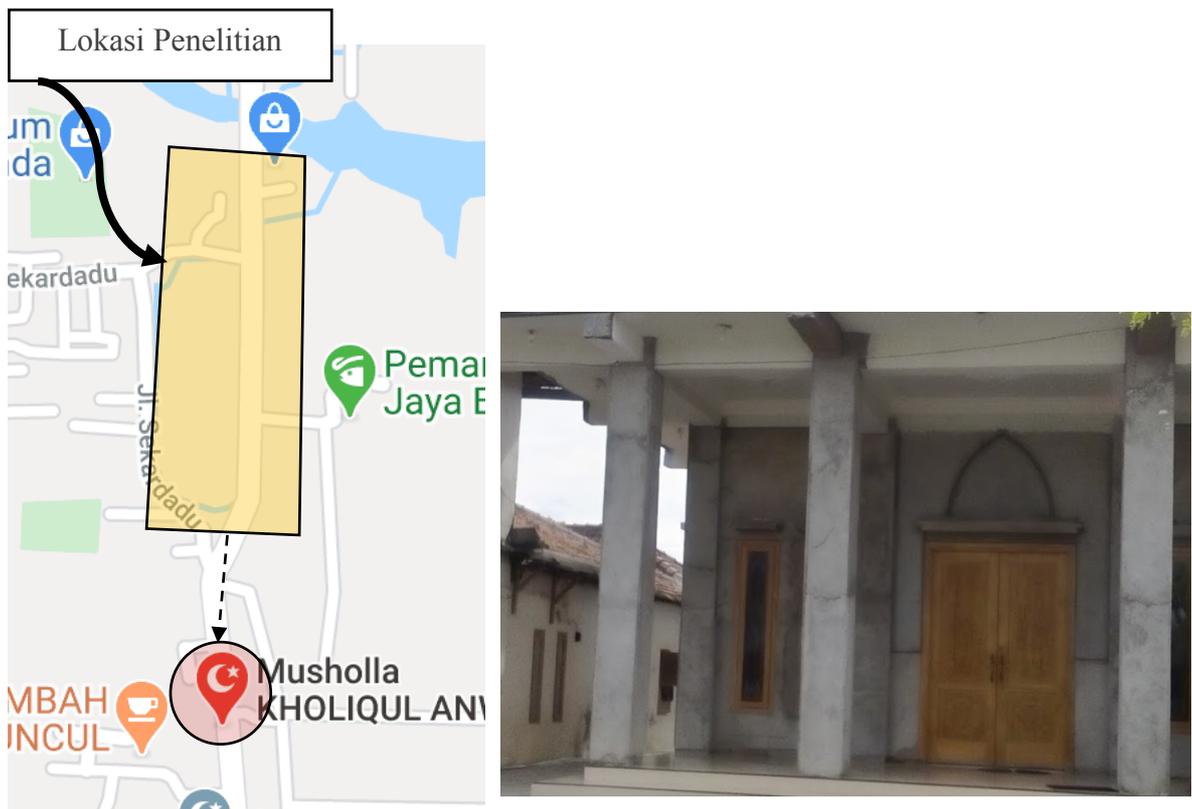
Sarana kesehatan belum tersedia di dalam lingkup kawasan penelitian. Hanya ada satu sarana kesehatan terdekat dari lingkup kawasan penelitian yang terletak di ujung jalan koridor Desa Cemandi. Sarana kesehatan berupa klinik dokter, yakni Klinik Praktek Dr. Khoirul Anwar dan kliniki ini berada dalam radius kurang lebih dari 2 km dari lokasi penelitian. Hal ini juga sangat disayangkan karena lokasi ini jauh dari Puskesmas. Dan sedikit banyak mempengaruhi kondisi akan tingkat kebersihan dan kesehatan para penduduk yang tinggal di Desa Tambak Cemandi Sidoarjo. Berikut gambar 4.8 lokasi sarana kesehatan di lingkup kawasan penelitian.



Gambar 4.8 Lokasi Sarana Kesehatan di Lingkup Kawasan Penelitian

4.8.3 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia di dalam lingkup kawasan penelitian merupakan sebuah musholla, dimana penduduk di lingkup kawasan penelitian merupakan penduduk muslim. Terdapat satu sarana peribadatan terdekat dari lingkup kawasan penelitian terletak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Kondisi yang cukup baik karena hasil renovasi swadaya oleh masyarakat membuat tampilan atau kondisi rumah ibadah yang berupa musholla ini terbilang bersih dan memadai. Berikut gambar 4.9 terkait lokasi dan gambaran sarana peribadatan yang terdekat dari kawasan penelitian.



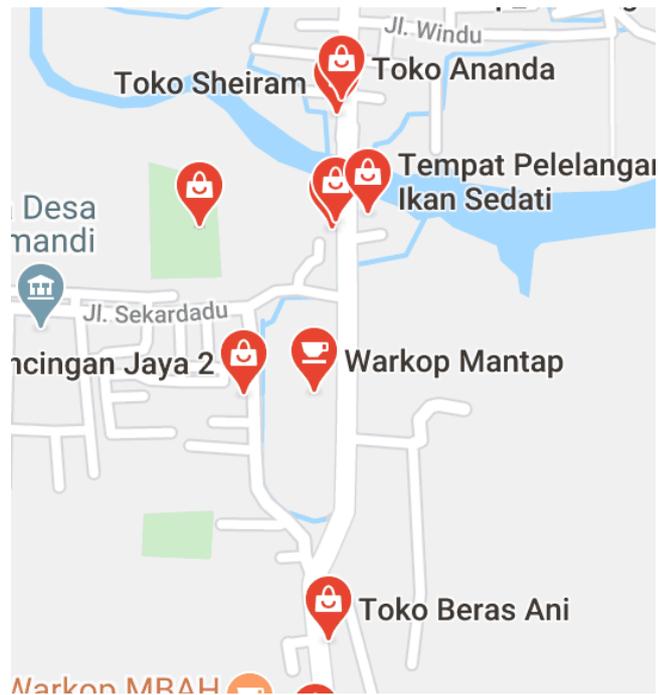
Gambar 4.9 Lokasi Sarana Peribadatan di Lingkup Kawasan Penelitian

4.8.4 Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang tersedia di dalam lingkup kawasan penelitian sangat lah beragam. Kondisi ini cukup baik karena hal ini akan memenuhi kebutuhan dari para penduduk yang ada di wilayah ini, meskipun mayoritas adalah seorang nelayan. Namun penyedia produk dan jasa juga sudah bisa memenuhi kebutuhan para warga yang lain. Berikut lokasi dan tabel jumlah dan jenis perdagangan dan jasa yang tersedia di kawasan penelitian pada tabel 4.4 sarana perdagangan dan jasa di kawasan penelitian.

Tabel 4.4 Sarana Perdagangan dan Jasa di Kawasan Penelitian

Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah
Toko Kebutuhan Pokok	3
Warung Makan	4
Penjual Pulsa	2
Penjual Ikan	17
Kolam Pemancingan	8



Gambar 4.10 Lokasi Persebaran Sarana Perdagangan dan Jasa di Kawasan Penelitian

4.8.5 Jaringan Jalan

Orientasi wilayah kawasan penelitian terletak di koridor jalan utama Tambak Cemandi. Sehingga jalur ini berfungsi sebagai jalur utama penghubung kawasan ini dengan kawasan yang lainnya. Kondisi ruas jalan utama di lingkup kawasan studi tergolong cukup baik dan mendukung kenyamanan dan keamanan transportasi yang ada. Sedangkan untuk jaringan jalan masuk ke area permukiman yang merupakan percabangan langsung dari jalan arteri primer dengan area permukiman sebagian memiliki kondisi kurang baik dengan perkerasan paving dan dimensi jalan yang tergolong minim. Pada kondisi eksisting, di wilayah perencanaan didominasi oleh jaringan jalan lokal atau lingkungan yang menghubungkan lingkungan permukiman dengan permukiman dan penghubung area permukiman dengan area tambak jalan yang tersedia belum memiliki perkerasan. Untuk mengetahui kondisi jaringan jalan berdasarkan fungsinya dapat dijabarkan pada gambar 4.11.



Gambar 4.11 Persebaran Jalan di Kawasan Penelitian

4.8.6 Air Bersih

Sarana penyediaan air bersih di suatu wilayah permukiman merupakan kebutuhan pokok bagi penduduknya. Mengingat kebutuhan manusia terhadap air merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendasar, misalnya untuk air minum, memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Kebutuhan air bersih sangat diperlukan sekali bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Berbagai macam sumber air bersih di wilayah Tambak Cemandi Sidoarjo sebagian besar berasal dari PDAM, sumur pompa, sumur biasa, mata air dan sungai. Untuk wilayah perencanaan hampir seluruh wilayah di kawasan penelitian memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM. Hal ini dikarenakan air sumur yang asin karena letak permukiman berdekatan dengan laut.

4.8.7 Persampahan

Sistem penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah studi kasus dapat dikatakan sangat buruk dimana tidak terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA). Pada umumnya masyarakat di kampung nelayan Tambak Cemandi membuang sampah dengan cara menimbun di

suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain.



Gambar 4.12 Persampahan di Kawasan Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Di sekitar kawasan permukiman nelayan Tambak Cemandi beberapa lingkungan air seperti pinggiran tambak, sungai muara juga dipenuhi oleh sampah rumah tangga penduduk sekitar. Hal ini tidak dapat dibenarkan dengan tidak adanya sistem pengelolaan dan pembuangan. Sehingga dapat mencemari lingkungan dan membawa banyak dampak negative bagi banyak faktor.

4.8.8 Jaringan Telepon

Salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat di kawasan penelitian adalah adanya pelayanan telepon. Jaringan pelayanan telepon yang ada di kawasan penelitian kurang di manfaatkan oleh pada penduduk. Hal ini dikarenakan para penduduk di kawasan ini kebanyakan menggunakan jaringan telepon seluler. Namun, masih ada beberapa rumah di kawasan penelitian yang masih menggunakan jaringan telepon, diantaranya para pengepul hasil tangkapan ikan atau juragan darat di permukiman wilayah permukiman nelayan Tambak Cemandi.

4.8.9 Jaringan Listrik

Penyediaan listrik untuk melayani kebutuhan penerangan penduduk di kawasan Tambak Cemandi saat ini difasilitasi oleh PLN sebagai penyedia listrik utama di

Indonesia dan hal ini sudah mampu menjangkau sebagian besar penduduk di seluruh kawasan permukiman nelayan Tambak Cemandi. Semua penduduk telah memanfaatkan fasilitas PLN sebagai sumber energi listrik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya instalasi PLN dan perkembangan jaringan listrik yang ada sekarang telah menjangkau seluruh wilayah permukiman di Tambak Cemandi

4.8.10 Sistem Drainase

Jaringan drainase yang ada di kawasan penelitian memiliki 3 (tiga) jenis saluran, antara lain saluran primer, semi permanen dan non permanen. Untuk jenis drainase yang ada di koridor jalankawasan Tambak Cemandi sebagian besar merupakan drainase permanen. Di sepanjang jalan rata-rata saluran drainasenya adalah semi permanen, karena perkerasan yang ada hanya di bagian permukaan saluran saja, sedangkan bagian dalam saluran tetap terbuat dari tanah. Wilayah-wilayah lainnya, banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.



Gambar 4.13 Drainase di Kawasan Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

Di sisi lain klasifikasi drainase berdasarkan fungsinya di kawasan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Drainase primer : berupa sungai dan muara
- Drainase sekunder : berada di tepi jalan utama tambak cemandi
- Drainase tersier : pada jalan permukiman penduduk

4.8.11 Pengelolaan Air Limbah

Kawasan permukiman nelayan Tambak Cemandi yang dijadikan sebagai objek studi kasus pada penelitian ini tidak memiliki pengelolaan air limbah. Semua saluran pembuangan air kotor langsung diarahkan dari rumah menuju parit dan berujung pada sungai dan muara. Hal ini lah yang membuat wilayah permukiman ini menjadi mempengaruhi kumuhnya lingkungan disekitar permukiman. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.14.



Gambar 4.14 Pengelolaan Air Limbah di Permukiman Nelayan Tambak Cemandi

4.8.12 Proteksi kebakaran

Proteksi kebakaran tidak ditemukan pada kawasan permukiman nelayan Tambak Cemandi yang dijadikan sebagai objek studi kasus pada penelitian ini. Semua rumah warga tidak memiliki proteksi kebakaran yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga tidak ditemukan, yakni alat proteksi kebakaran di sekitar wilayah permukiman ini. Hal ini yang membuat permukiman ini memiliki kondisi yang kurang baik terhadap system keselamatan yang ada di area permukiman.

BAB V

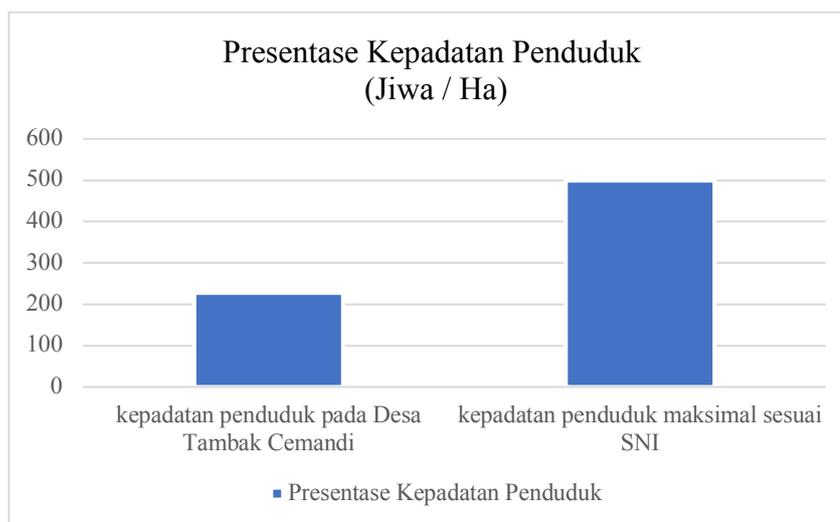
FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN PADA PERMUKIMAN NELAYAN

5.1 Hasil Identifikasi Penyebab Kekumuhan pada Permukiman Nelayan

Dalam menentukan faktor penyebab kekumuhan pada permukiman nelayan, penelitian ini menggunakan teknik analisa triangulasi dengan menganalisa dari tiga aspek yakni kondisi eksisting, hasil wawancara, studi literature dan peraturan atau standard yang berlaku. Sebelum melakukan analisa dalam mencapai tujuan pertama dalam penelitian ini, berikut hasil data yang telah didapatkan dalam penelitian ini :

- **Kondisi Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi kepadatan penghuni permukiman nelayan pada studi kasus :



Gambar 5.1 Kondisi Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Kawasan Kampung Tambak Cemandi mempunyai luasan sekitar 1 ha yang terletak pada kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk yang menghuni Kampung Cemandi yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini sekitar 227 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sedang.

- **Kondisi Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi kepemilikan tanah permukiman nelayan pada studi kasus :



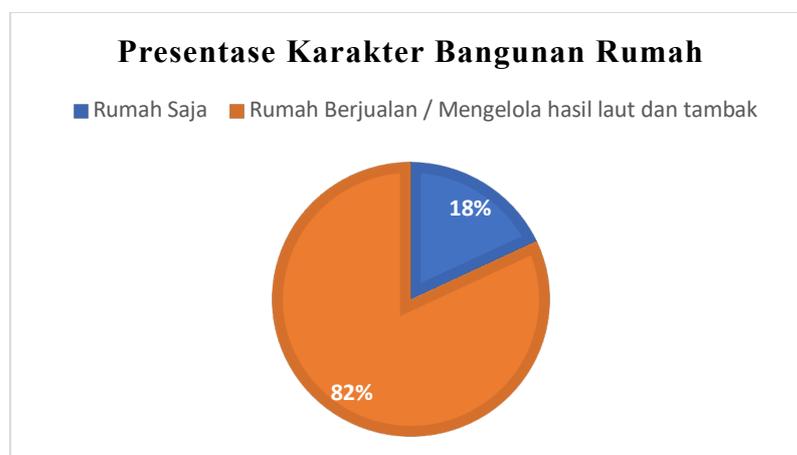
Gambar 5.2 Kondisi Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Dalam aspek ini kepemilikan tanah dari kawasan penelitian, memiliki status yang berbeda-beda, hasilnya 56% adalah sudah tanah mereka sendiri dan 44% adalah tanah sewa dari koperasi Juanda. Sejumlah 51 rumah, diantaranya 29 rumah hak milik dan sebagian rumah milik koperasi juanda.

- **Kondisi Karakter Bangunan Permukiman Nelayan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi karakter bangunan permukiman nelayan pada studi kasus :



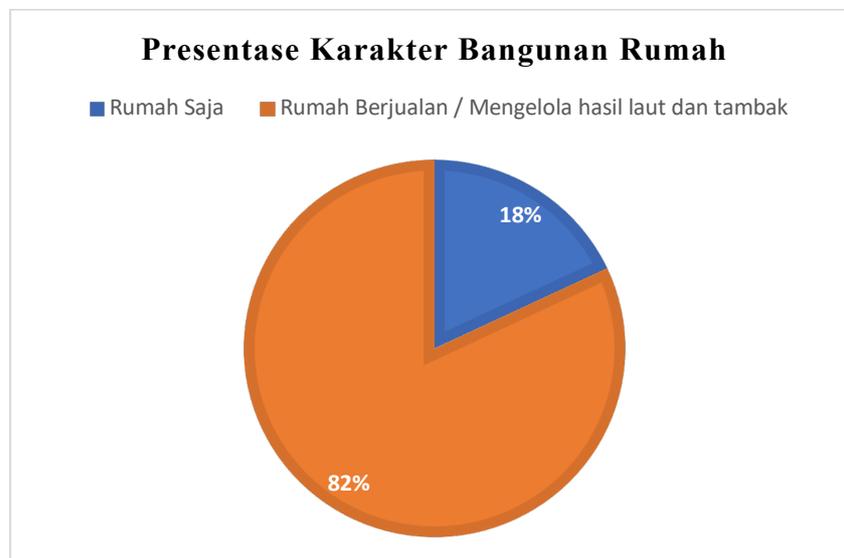
Gambar 5.3 Kondisi Karakter Bangunan Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Bentuk rumah yang ada pada kawasan permukiman memiliki bentuk atap pelana dan dibagian depan rumah memiliki teras dengan sosoran yang cukup panjang. Rumah di wilayah permukiman ini semuanya memiliki rumah 1 lantai. Sebagian besar mereka mengelola hasil tangkapan di teras dan ruang tamu rumah mereka. Rumah warga yang digunakan untuk mengelola hasil tangkapan sebanyak 82% dan sisanya hanya 18% yang tidak mengelola hasil tangkapan di area tempat tinggal mereka.

- **Kondisi Karakter Lingkungan dan Fasilitas Umum**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi karakter lingkungan dan fasilitas umum permukiman nelayan pada studi kasus :



Gambar 5.3 Kondisi Karakter Bangunan Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Kondisi di lingkungan sekitar permukiman tergolong sangat kumuh dengan melihat banyaknya sampah kondisi bangunan yang tidak tertata dan sesuai standar. Sampah yang ada di lingkungan sekitar permukiman kebanyakan berada di pinggir kolam atau tambak, sungai dan di pinggir rumah. Hal inilah yang membuat kondisi kebersihan yang sangat buruk dan terlihat sangat kumuh.

- **Kondisi Bangunan di Permukiman Nelayan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi bangunan di permukiman nelayan pada studi kasus :



Gambar 5.4 Kondisi Bangunan Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Kebanyakan kondisi bangunan rumah di kawasan permukiman secara mayoritas merupakan bangunan tua. Rumah – rumah nelayan di permukiman ini memiliki kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat kurang. Sebanyak 79% rumah merupakan bangunan tua dan memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang kurang baik. Dan sebanyak 21% mempunyai kondisi bangunan yang masih baru dan sudah direnovasi.

- **Kondisi Aksesibilitas Jalan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi aksesibilitas jalan permukiman nelayan pada studi kasus :

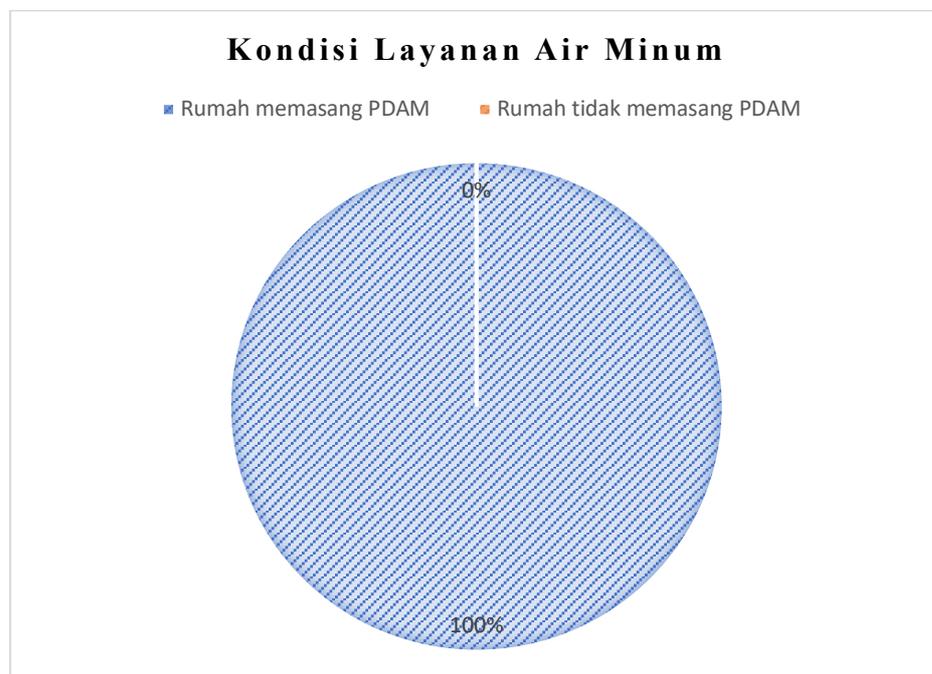
Tabel 5.1 Kondisi Aksesibilitas Jalan Desa Tambak Cemandi

Tipe Jalan	Lebar Jalan	Material Jalan
Jalan Utama	6 meter	Aspal
Jalan Utama Kampung	2 meter	Tanah
Jalan Gang Kampung	1,4 meter	Tanah

Kondisi ruas jalan utama di lingkup kawasan studi tergolong cukup baik dan mendukung kenyamanan. Sedangkan untuk jaringan jalan masuk ke area permukiman yang merupakan percabangan langsung dari jalan arteri primer dengan area permukiman sebagian memiliki kondisi kurang baik dengan perkerasan paving dan dimensi jalan yang tergolong minim. Jalan lokal yang tersedia antar rumah belum memiliki perkerasan.

- **Kondisi Layanan Air Minum**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi layanan air minum permukiman nelayan pada studi kasus :



Gambar 5.5 Kondisi Aksesibilitas Jalan Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Sumber air bersih di wilayah Tambak Cemandi Sidoarjo sebagian besar berasal dari PDAM, sumur pompa, sumur biasa, mata air dan sungai. Untuk wilayah perencanaan hampir seluruh wilayah di kawasan penelitian memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM.

- **Kondisi Drainase**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi drainase permukiman nelayan pada studi kasus :

Tabel 5.2 Kondisi Drainase Desa Tambak Cemandi

Perletakan Drainase	Kondisi Drainase	Material
Jalan Utama	1 meter	Semi permanen
Jalan Utama Kampung	40 cm	Semi permanen
Jalan Gang Kampung	30 cm	Semi permanen

Di sepanjang jalan rata-rata saluran drainasenya adalah semi permanen, karena perkerasan yang ada hanya di bagian permukaan saluran saja, sedangkan bagian dalam saluran tetap terbuat dari tanah. Wilayah-wilayah lainnya, banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.

- **Kondisi Air Limbah**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi pengelolaan air limbah permukiman nelayan pada studi kasus :

Tabel 5.3 Kondisi Air Limbah Desa Tambak Cemandi

Perletakan Saluran Air Limbah	Kondisi Saluran	Material
Jalan Utama	Langsung ke laut	Semi permanen
Jalan Utama Kampung	40 cm	Semi permanen
Jalan Gang Kampung	30 cm	Semi permanen

Pada kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan air limbah. Semua saluran pembuangan air kotor langsung diarahkan dari rumah menuju parit dan berujung pada sungai dan muara. Hal ini lah yang membuat wilayah permukiman ini menjadi mempengaruhi kumuhnya lingkungan disekitar permukiman.

- **Kondisi Pengelolaan Persampahan**

Berikut hasil data yang diperoleh terkait kondisi pengelolaan persampahan permukiman nelayan pada studi kasus :



Gambar 5.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan Permukiman Nelayan

Sumber : Dokumen Pribadi 2020

Sistem penanganan dan pengolahan sampah di wilayah studi kasus dapat dikatakan sangat buruk dimana tidak terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA). Pada umumnya masyarakat di kampung nelayan Tambak Cemandi membuang sampah dengan cara menimbun di suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain.

- **Kondisi Pengamanan kebakaran**

Semua rumah warga tidak memiliki proteksi kebakaran yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga tidak ditemukan, yakni alat proteksi kebakaran di sekitar wilayah permukiman ini. Hal ini yang membuat permukiman ini memiliki kondisi yang kurang baik terhadap system keselamatan yang ada di area permukiman.

5.2 Analisa Faktor Penyebab Kekumuhan pada Permukiman Nelayan

Dalam menentukan faktor penyebab kekumuhan pada permukiman nelayan, penelitian ini menggunakan teknik analisa triangulasi dengan menganalisa dari tiga aspek yakni kondisi eksisting, hasil wawancara, studi literature dan peraturan atau standard yang berlaku. Berikut analisa dalam mencapai tujuan pertama dalam penelitian ini :

5.2.1 Analisa Triangulasi Aspek Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan

Tabel 5.1 tabel analisa triangulasi aspek kepadatan penghuni permukiman nelayan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
Kawasan Kampung Tambak Cemandi mempunyai luasan sekitar 1 ha yang terletak pada kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jumlah penduduk yang menghuni Kampung Cemandi yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini sekitar 227 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sedang.	Standar SNI 03-173-2004, dimana klasifikasi kepadatan penduduk sedang sekitar 151-200 jiwa/ha. Sedangkan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha.	Masyarakat : Kondisi kepadatan penduduk menurut masyarakat tidak ada masalah, mereka merasa sudah terbiasa dengan jumlah penduduk dengan kondisi yang ada.

Analisa dan Diskusi

- (A) dan (B)

Berdasarkan kondisi eksisting yang ditinjau berdasarkan teori dan kebijakan terkait, tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha. Sedangkan penduduk yang ada pada wilayah studi berjumlah 227 jiwa/ha. Kelebihan 16 jiwa/ha dalam kawasan ini belum terlalu dirasakan kepadatannya. Oleh sebab itu kondisi permukiman di area pesisir memang masih terlihat renggang namun mengarah pada kondisi yang cukup kepadatannya.

- (B) dan (C)

Berdasarkan teori atau standar peraturan yang berlaku, Sedangkan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha. Sedangkan penduduk yang ada pada wilayah studi berjumlah 227 jiwa/ha. Kelebihan 16 jiwa/ha dalam kawasan ini belum terlalu dirasakan kepadatannya. Sehingga masyarakat tidak merasakan keberatan akan kondisi mereka.

- (A) dan (C)

Berdasarkan kondisi eksisting yang ditinjau berdasarkan teori dan kebijakan terkait, tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi. Dan juga masyarakat tidak merasakan keberatan akan kondisi mereka. Sehingga mereka merasa tidak perlu adanya pembenahan dalam kepadatan penduduk yg terjadi pada permukiman yang mereka tinggali.

Kesimpulan berdasarkan analisa di atas memperlihatkan bahwa kondisi permukiman nelayan di tambak cemandi tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha. Dikarenakan penduduk yang ada pada wilayah studi berjumlah 227 jiwa/ha. Kelebihan 16 jiwa/ha dalam kawasan ini belum terlalu dirasakan kepadatannya. Meski kondisi permukiman di area pesisir memang masih terlihat renggang namun mengarah pada kondisi yang cukup kepadatannya. **Sehingga perlu diadakannya pencegahan dalam penambahan jumlah rumah – rumah baru pada lahan yang sama karena dapat mengakibatkan kepadatan tinggi yang terpusat di area permukiman nelayan.**

5.2.2 Analisa Triangulasi Aspek Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan

Tabel 5.2 tabel analisa triangulasi aspek kepemilikan tanah permukiman nelayan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Dalam aspek ini kepemilikan tanah dari kawasan penelitian, memiliki status yang berbeda-beda, hasilnya 56% adalah sudah tanah mereka sendiri dan 44% adalah tanah sewa dari koprasi Juanda.</p> <p>Sejumlah 51 rumah, diantaranya 29 rumah hak milik dan sebagian rumah milik koperasi juanda.</p>	<p>Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 UU No 5 Th 1960 Undang-undang pokok agraria UUPA. HAK MILIK : adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi social.</p> <p>Pasal 35 ayat 1 UUPA HAK GUNA BANGUNAN : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.</p>	<p>Sebagian rumah warga merupakan rumah milik sendiri, dan sebagian lainnya rumah didirikan diatas tanah milik koperasi juanda. Sehingga masyarakat membayar sewa tahunan, karena tanah tidak dijual namun di sewakan dengan perjanjian per 10 tahun. Dengan biaya sewa bulanan berkisar Rp. 200,000. Masyarakat sebenarnya ingin membeli dengan cara mencicil pada koperasi namun pihak yang berwenang tidak ingin melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat.</p>
Analisa dan Diskusi		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Kondisi eksisting dimana kepemilikan rumah di area ini 56% adalah sudah tanah mereka sendiri dan 44% adalah tanah sewa dari koperasi Juanda. Berkaitan dengan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 UU No 5 Th 1960 Undang-undang pokok agraria UUPA. Hak milik 44% tanah yang ada di kawasan ini adalah bukan milik warga. • (B) dan (C) Sebagian rumah warga merupakan rumah milik sendiri, dan sebagian lainnya rumah didirikan diatas tanah milik koperasi juanda. Sehingga masyarakat membayar sewa tahunan, karena tanah tidak dijual namun di sewakan dengan 		

perjanjian per 10 tahun. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 35 ayat 1 UUPA Hak Guna Bangunan : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

- (A) dan (C)

Keresahan yang terjadi karena diantaranya 29 rumah hak milik dan sebagian 22 rumah milik koperasi juanda. Disini masyarakat sebenarnya ingin membeli dengan cara mencicil pada koperasi namun pihak yang berwenang tidak ingin melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat.

Kesimpulan berdasarkan analisa di atas memperlihatkan bahwa kondisi keresahan masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan di tambak dikarenakan penduduk yang sebenarnya ingin membeli dengan cara mencicil pada koperasi namun pihak yang berwenang tidak ingin melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat. Dalam kaca mata hukum seharusnya pihak koperasi Juanda mematuhi aturan dalam Pasal 35 ayat 1 UUPA Hak Guna Bangunan : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. **Sehingga perlu diadakannya negosiasi pada kontrak perjanjian dari sewa 10 tahun menjadi 30 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat lebih merasa aman dari adanya penggusuran atau perubahan sewaktu-waktu. Dan mengingat dari peta penggunaan lahan yang di keluarkan oleh pemerintah Sidoarjo sendiri bahwa benar di area tersebut adalah area untuk permukiman nelayan.**

5.2.3 Analisa Triangulasi Aspek Karakter Bangunan Permukiman Nelayan

Tabel 5.3 tabel analisa triangulasi aspek karakter bangunan permukiman nelayan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
Bentuk rumah yang ada pada kawasan permukiman memiliki bentuk atap pelana dan	Dalam Nawagamawa, 2003, adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan	Masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah mengaku menggunakan bangunan seadanya karena

<p>dibagian depan rumah memiliki teras dengan sosoran yang cukup panjang. Rumah di wilayah permukiman ini semuanya memiliki rumah 1 lantai. Sebagian besar mereka mengelola hasil tangkapan di teras dan ruang tamu rumah mereka.</p>	<p>yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.</p>	<p>mereka takut untuk merenovasi, rumah yang berada pada lahan bukan miliknya. Masyarakat yang memiliki tanah sendiri pun merasa nyaman dan menyesuaikan dengan yang lainnya.</p>
---	---	---

Analisa dan Diskusi

- (A) dan (B)
Karakter rumah nelayan yang terlihat kumuh salah satunya dikarenakan mereka mengelola hasil tangkapan di teras dan ruang tamu rumah mereka. Dikarenakan mereka tidak mengorganisir kegiatan sehari-hari yang mereka kerjakan. Seperti yang dikatakan Nawagamuwa, 2003, sebab adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi.
- (B) dan (C)
Dalam Nawagamuwa, 2003, sebab adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, memiliki 2 alasan yang saling berhubungan dari masyarakat setempat yakni, karena mereka tidak memiliki hak atas tanah mengaku menggunakan bangunan seadanya karena mereka takut untuk merenovasi, rumah yang berada pada lahan bukan miliknya. Dan yang memiliki tanah sendiri pun merasa nyaman dan menyesuaikan dengan yang lainnya.
- (A) dan (C)
Karakter rumah nelayan yang terlihat kumuh dan tua salah satunya dikarenakan mereka mengelola hasil tangkapan di teras dan ruang tamu rumah mereka. karena mereka tidak memiliki hak atas tanah mengaku menggunakan bangunan seadanya karena mereka takut untuk merenovasi, rumah yang berada pada lahan bukan miliknya. Dan yang memiliki tanah sendiri pun merasa nyaman dan menyesuaikan dengan yang lainnya.

Kesimpulan berdasarkan analisa diatas mindset masyarakat dan kurangnya pemahan akan karakter bangunan yang mereka tinggali berdapak pada kondisi kekumuhan. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat kekumuhan yang ada di wilayah kampung mereka. Memberi arahan terkait pembenahan kondisi rumah tinggal mereka sehingga mereka memiliki bangunan yang nyaman, menarik serta fungsional.** Nantinya akan berdampak di sektor ekonomi wisata atau yang lainnya.

5.2.4 Analisa Triangulasi Aspek Karakter Lingkungan dan Fasilitas Umum

Tabel 5.4 Tabel analisa triangulasi aspek karakter lingkungan dan fasilitas umum

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Kondisi di lingkungan sekitar permukiman tergolong sangat kumuh dengan melihat banyaknya sampah kondisi bangunan yang tidak tertata dan sesuai standar.</p> <p>Sampah yang ada di lingkungan sekitar permukiman kebanyakan berada di pinggir kolam atau tambak, sungai dan di pinggir rumah. Hal inilah yang membuat kondisi kebersihan yang sangat buruk dan terlihat sangat kumuh.</p>	<p>Nawagamuwa 2003, permukiman kumuh tidak tertata dan tidak memiliki open space ruang terbuka hijau dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga.</p>	<p>Masyarakat memiliki kebiasaan yang tidak mempedulikan lingkungan memang mereka mengaku turun temurun melakukan hal tersebut dan mereka sendiri menyadari bahwa tidakan tersebut tidak baik untuk lingkungan namun mengaku menyesuaikan dengan yang lainnya.</p>

Analisa dan Diskusi

- (A) dan (B)

Kondisi di lingkungan sekitar permukiman tergolong sangat kumuh dengan melihat banyaknya sampah kondisi bangunan yang tidak tertata dan sesuai standar. Nawagamuwa 2003, permukiman kumuh tidak tertata dan tidak memiliki standar.

- (B) dan (C)

Dalam Nawagamuwa 2003, permukiman kumuh tidak tertata dan tidak memiliki standar. Masyarakat memiliki kebiasaan yang tidak mempedulikan lingkungan memang mereka mengaku turun temurun melakukan hal tersebut dan mereka sendiri menyadari bahwa tidakan tersebut tidak baik.

- (A) dan (C)

Kondisi di lingkungan sekitar permukiman tergolong sangat kumuh dengan melihat banyaknya sampah kondisi bangunan yang tidak tertata dan sesuai standar. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan yang tidak mempedulikan lingkungan memang mereka mengaku turun temurun melakukan hal tersebut dan mereka sendiri menyadari bahwa tidakan tersebut tidak baik untuk lingkungan namun mengaku menyesuaikan dengan yang lainnya.

Kesimpulan berdasarkan analisa diatas kurangnya pemahan akan kualitas lingkungan dan bahaya akan kesehatan pada permukiman yang mereka tinggali berdapak pada kondisi kekumuhan. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi lingkungan yang buruk di wilayah kampung mereka. Memberikan arahan, serta saran akan kebijakan terkait pelanggaran yang dilakukan jika dapat kondisi kesehatan dan kebersihan yang buruk di lingkungan mereka sendiri.**

5.2.5 Analisa Triangulasi Aspek Kondisi Bangunan di Permukiman Nelayan

Tabel 5.5 Tabel analisa triangulasi aspek kondisi bangunan di permukiman nelayan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Kebanyakan kondisi bangunan rumah di kawasan permukiman secara mayoritas merupakan banguna tua. Rumah – rumah nelayan di permukiman ini memiliki kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat kurang.</p>	<p>Dalam Nawagamuwa, 2003, adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.</p>	<p>Mereka mengaku tidak memiliki persoalan dengan kondisi rumah mereka, karena mereka cuek dan kurang peduli akan lingkungan tempat tinggalnya.</p>
Analisa dan Diskusi		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Kebanyakan kondisi bangunan rumah di kawasan permukiman secara mayoritas merupakan banguna tua. Rumah – rumah nelayan di permukiman ini memiliki kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat kurang. Sedangkan alam Nawagamuwa, 2003, sebab adanya permukiman kumuh adalah: Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat. • (B) dan (C) Secara teori dan standar rumah yang ada di permukiman setempat memang merupakan tergolong sebagai permukiman kumuh dikarenakan kondisi masyarakat kurang peduli akan lingkungan tempat tinggalnya. • (A) dan (C) Kondisi bangunan rumah di kawasan permukiman secara mayoritas merupakan banguna tua. Rumah – rumah nelayan di permukiman ini memiliki kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat kurang hal ini diakibatkan kondisi masyarakat kurang peduli akan lingkungan tempat tinggalnya. 		

Kesimpulan berdasarkan analisa diatas mindset masyarakat dan kurangnya pemahan akan kualitas bangun yang mereka tinggali dapat berdampak pada kesehatan mereka sendiri dan berdampak menjadikan kondisi kekumuhan pada lingkungan rumah mereka. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi bangunan mereka yang tidak sesuai dengan standar, serta saran akan desain rumah yang sesuai standar sehingga dapat berdampak baik pada kondisi kesehatan dan kebersihan di lingkungan mereka sendiri.**

5.2.6 Analisa Triangulasi Aspek Aksesibilitas Jalan

Tabel 5.6 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Aksesibilitas Jalan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Kondisi ruas jalan utama di lingkup kawasan studi tergolong cukup baik dan mendukung kenyamanan. Sedangkan untuk jaringan jalan masuk ke area permukiman yang merupakan percabangan langsung dari jalan arteri primer dengan area permukiman sebagian memiliki kondisi kurang baik dengan perkerasan paving dan dimensi jalan yang tergolong minim. Jalan lokal yang tersedia antar rumah belum memiliki perkerasan.</p>	<p>PU Cipta Karya 2015- SNI 03-1733-2004</p> <p>Jalan yang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan.</p>	<p>Mereka mengeluhkan adanya perbaikan jalan pada jalan di dalam permukiman mereka yang belum memiliki perkerasan.</p> <p>Sedangkan sebagian mereka menganggap bukan tanah milik mereka sehingga mereka enggan bergotong royong memperbaiki fasilitas secara mandiri.</p>
<p>Analisa dan Diskusi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> (A) dan (B) <p>Kondisi jalan yang kurang baik dengan perkerasan paving dan dimensi jalan yang tergolong minim. Jalan lokal yang tersedia antar rumah belum memiliki perkerasan. Hal ini belum sesuai dengan PU Cipta Karya 2015- SNI 03-1733-2004. Terkait jalan yang memiliki standar keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan.</p>		

- (B) dan (C)

Terkait aturan tersebut warga sebagian mereka menganggap bukan tanah milik mereka sehingga mereka enggan bergotong royong memperbaiki fasilitas secara mandiri. Sehingga mereka mengeluhkan adanya perbaikan jalan pada jalan di dalam permukiman mereka yang belum memiliki perkerasan.

- (A) dan (C)

Kondisi jalan yang kurang baik dengan perkerasan paving dan dimensi jalan yang tergolong minim. Jalan lokal yang tersedia antar rumah belum memiliki perkerasan. Dikarenakan mereka menganggap bukan tanah milik mereka sehingga mereka enggan bergotong royong memperbaiki fasilitas secara mandiri. Sehingga mereka mengeluhkan adanya perbaikan jalan pada jalan di dalam permukiman mereka yang belum memiliki perkerasan.

Kesimpulan berdasarkan analisa diatas dari kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri. **Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, untuk warga yang tidak memiliki kepemilikan lahan, serta iuran ringan atau menyadarkan akan gotong royong antar warga** dalam perbaikan dengan tenaga yang mereka miliki sendiri.

5.2.7 Analisa Triangulasi Aspek Layanan Air Minum

Tabel 5.7 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Layanan Air Minum

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
Sumber air bersih di wilayah Tambak Cemandi Sidoarjo sebagian besar berasal dari PDAM, sumur pompa, sumur biasa, mata air dan sungai. Untuk wilayah perencanaan hampir seluruh wilayah di	Lingkungan permukiman kumuh (Khomarudin, 1997) memiliki prasarana yang kurang salah satunya adalah penyediaan air bersih. dan	Sebagian besar mereka menggunakan PDAM untuk air minum mereka. Dan untuk warga yang tanahnya bukan milik sendiri mereka memang enggan berlangganan PDAM biasanya mereka membeli dari warga lainnya yang

kawasan penelitian memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM.	PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 02/PRT/M/2016	memiliki pemasangan PDAM.
Analisa dan Diskusi		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Hampir seluruh wilayah di kawasan penelitian memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM. Hal ini sudah sesuai dengan teori maupun standart aturan yang berlaku. • (B) dan (C) Sesuai dengan teori maupun standart aturan yang berlaku, para warga sudah melakukan dan mencukupi kebutuhan primer nya sendiri akan kebutuhan air minum dengan menggunakan PDAM untuk air minum mereka. Dan untuk warga yang tanahnya bukan milik sendiri mereka biasanya membeli dari warga lainnya yang memiliki pemasangan PDAM • (A) dan (C) Hampir seluruh wilayah di kawasan penelitian memanfaatkan sumber air yang ada sebagai sumber air bersih dengan menggunakan PDAM. Para warga tidak ada kendala dan sudah melakukan dan mencukupi kebutuhan primer nya sendiri akan kebutuhan air minum dengan menggunakan PDAM untuk air minum mereka. Untuk warga yang tanahnya bukan milik sendiri mereka biasanya mmbeli dari warga lainnya yang memiliki pemasangan PDAM. 		

Kesimpulan berdasarkan analisa diatas **Para warga tidak ada kendala dan sudah melakukan dan mencukupi kebutuhan primer nya sendiri akan kebutuhan air minum dengan menggunakan PDAM untuk air minum** mereka. Warga yang tanahnya bukan milik sendiri mereka biasanya mmbeli dari warga lainnya yang memiliki pemasangan PDAM.

5.2.8 Analisa Triangulasi Aspek Drainase

Tabel 5.8 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Drainase

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Di sepanjang jalan rata-rata saluran drainasenya adalah semi permanen, karena perkerasan yang ada hanya di bagian permukaan saluran saja, sedangkan bagian dalam saluran tetap terbuat dari tanah. Wilayah-wilayah lainnya, banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.</p>	<p>PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 02/PRT/M/2016</p> <p>Terdapat gorong-gorong, pertemuan saluran, pintu air, pompa dan saluran pusat kota</p>	<p>Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait drainase yang benar sesuai standart, sehingga banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.</p>
<p>Analisa dan Diskusi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Saluran drainasenya tergolong semi permanen, karena perkerasan yang ada hanya di bagian permukaan saluran saja, sedangkan bagian dalam saluran tetap terbuat dari tanah. Wilayah-wilayah lainnya, banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen. Hal ini kurang sesuai dengan aturan standart yang berlaku. • (B) dan (C) Terkait peraturan yang berlaku, serta aturan dan standar dalam system drainase permukiman. Masyarakat belum melakukan hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait drainase yang benar sesuai standart. 		

- (A) dan (C)

Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait drainase yang benar sesuai standart, sehingga banyak menggunakan saluran drainase dengan kondisi non permanen.

Kesimpulan dari analisa dan dari kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri. **Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, atau pemerintah setempat untuk memperbaiki drainase di permukiman nelayan.**

5.2.9 Analisa Triangulasi Aspek Air Limbah

Tabel 5.1 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Air Limbah

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Pada kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan air limbah. Semua saluran pembuangan air kotor langsung diarahkan dari rumah menuju parit dan berujung pada sungai dan muara. Hak ini lah yang membuat wilayah permukiman ini menjadi mempengaruhi kumuhnya lingkungan disekitar permukiman.</p>	<p>PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 02/PRT/M/2016</p> <p>Tersedianya septik tank, bidang resapan dan jaringan pemipaan air limbah.</p>	<p>Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait pengolahan limbah yang benar sesuai standart dan masyarakat mengaku sudah terbiasa dan tidak memiliki kendala dalam kondisi yang ada di sekitarnya.</p>

Analisa dan Diskusi		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan air limbah. Semua saluran pembuangan air kotor langsung diarahkan dari rumah menuju parit dan berujung pada sungai dan muara. Hal ini lah yang membuat wilayah permukiman ini menjadi mempengaruhi kumuhnya lingkungan disekitar permukiman. Dan tidak sesuai dengan standar yang ada. • (B) dan (C) Berdasarkan standar dan aturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah tersebut. Dikarenakan masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait pengolahan limbah yang benar sesuai standart dan masyarakat mengaku sudah terbiasa dan tidak memiliki kendala dalam kondisi yang ada di sekitarnya. • (A) dan (C) Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait pengolahan limbah yang benar sesuai standart dan masyarakat mengaku sudah terbiasa dan tidak memiliki kendala dalam kondisi yang ada di sekitarnya. 		

Kesimpulan dari analisa diatas kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan air limbah. Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait pengolahan limbah yang benar sesuai standart. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, atau pemerintah setempat untuk memperbaiki pengolahan limbah yang baik di permukiman nelayan.**

5.2.10 Analisa Triangulasi Aspek Pengelolaan Persampahan

Tabel 5.1 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Pengelolaan Persampahan

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
<p>Sistem penanganan dan pengolahan sampah di wilayah studi kasus dapat dikatakan sangat buruk dimana tidak terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA).</p> <p>Pada umumnya masyarakat di kampung nelayan Tambak Cemandi membuang sampah dengan cara menimbun di suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain.</p>	<p>PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 02/PRT/M/2016</p> <p>Tersedianya pengelolaan persampahan, Terdapat 1 Tempat Pembuangan Sampah dalam 1 RW</p>	<p>Mereka mengaku tidak mau membayar iuran pengambilan sampah dikarenakan mereka sudah memiliki kebiasaan membuang sampah di dekat rumah mereka. Baik dengan cara menimbun di suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain.</p>
<p>Analisa dan Diskusi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • (A) dan (B) Masyarakat di kampung nelayan Tambak Cemandi membuang sampah dengan cara menimbun di suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain. Hal tersebut jauh dari standar aturan terkait persampahan yang ada. • (B) dan (C) 		

Terkait peraturan warga merasa acuh karena memiliki kebiasaan membuang sampah di dekat rumah mereka.

- (A) dan (C)

Masyarakat di kampung nelayan Tambak Cemandi membuang sampah dengan cara menimbun di suatu lokasi yang tidak terawat dan bila saat sudah penuh para warga akan membakar atau membuang sampah di lahan kosong yang lain. Karena memiliki kebiasaan membuang sampah di dekat rumah mereka dan mereka juga tidak mau membayar iuran.

Kesimpulan dari analisa diatas kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan persampahan. Masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait pengolahan sampah yang benar sesuai standart. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Dan sebaiknya terdapat aturan yang mengikat dan menindak tegas agar masyarakat setempat disiplin mengikuti standar dan aturan yang ada.**

5.2.11 Analisa Triangulasi Aspek Pengamanan Kebakaran

Tabel 5.1 Tabel Analisa Triangulasi Aspek Pengamanan Kebakaran

Kondisi Eksisting (A)	Teori, referensi dan kebijakan (B)	Hasil wawancara (C)
Semua rumah warga tidak memiliki proteksi kebakaran yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga tidak ditemukan, yakni alat proteksi kebakaran di sekitar wilayah permukiman ini. Hal ini yang membuat permukiman ini memiliki kondisi yang kurang baik terhadap system keselamatan yang ada di area permukiman.	PU Cipta Karya 2015 dan PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 02/PRT/M/2016 Terdapat sistem pencegahan kebakaran	Masyarakat lebih memilih tidak tahu menahu dengan aspek ini dalam sebuah permukiman. Karena kepedulian yang rendah terkait kebakaran. Dan mereka merasa aman, karena lingkungan sekitar mereka adalah tambak dan memiliki air yang berlimpah. Sehingga mereka tidak merasakan sebuah kepentingan dalam hal ini

Analisa dan Diskusi

- (A) dan (B)
Semua rumah warga tidak memiliki proteksi kebakaran yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan standar dan aturan yang ada.
- (B) dan (C)
Terkait standard an aturan yang berlaku masyarakat tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan hal ini.
- (A) dan (C)
Karena kepedulian yang rendah terkait kebakaran. Dan mereka merasa aman, karena lingkungan sekitar mereka adalah tambak dan memilik air yang berlimpah. Sehingga merka tidak merasakan sebuah kepentingan dalam

Kesimpulan dari analisa diatas kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki proteksi kebakaran dari pemerintah. Ditambah dengan masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait proteksi kebakaran yang benar sesuai standart. **Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait kondisi dan ketersediaan proteksi kebakaran bagi warganya.**

5.3 Faktor Penyebab Kekumuhan pada Permukiman Nelayan

Kesimpulan dari analisa triangulasi yang telah dilakukan diatas akan dirangkum kembali, sehingga dapat ditarik faktor – faktor apa sajakah yang tergolong dapat menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan. Berikut penarikan kesimpulan faktor penyebab kekumuhan terangkum dalam tabel 5.13.

Tabel 5.13. Kesimpulan Faktor Penyebab Kekumuhan

No.	Aspek atau Faktor	Hasil Identifikasi	Penyebab Kekumuhan
1.	Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan	Berdasarkan analisa di atas memperlihatkan bahwa kondisi permukiman nelayan di tambak cemandi tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha. Dikarenakan penduduk yang ada pada wilayah studi berjumlah 227jiwa/ha. Kelebihan 16 jiwa/ha dalam kawasan ini belum terlalu dirasakan kepadatannya. Meski kondisi permukiman di area pesisir memang masih terlihat renggang namun mengarah pada kondisi yang cukup kepadatannya. Sehingga perlu diadakannya pencegahan dalam penambahan jumlah rumah – rumah baru pada lahan yang sama karena dapat mengakibatkan kepadatan tinggi yang terpusat di area permukiman nelayan.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
2.	Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan	Kondisi keresahan masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan di tambak dikarenakan penduduk yang sebenarnya ingin membeli dengan cara mencicil pada koperasi namun pihak yang berwenang tidak ingin melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat. Dalam kacamata hukum seharusnya pihak koperasi Juanda mematuhi aturan dalam Pasal 35 ayat 1 UUPA Hak Guna Bangunan : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sehingga perlu diadakannya negosiasi pada kontrak perjanjian dari sewa 10 tahun menjadi 30 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat lebih merasa aman dari adanya penggusuran atau perubahan sewaktu-waktu.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.

No.	Aspek atau Faktor	Hasil Identifikasi	Penyebab Kekumuhan
3.	Karakter Bangunan Permukiman Nelayan	Diperlukannya pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat kekumuhan yang ada di wilayah kampung mereka. Memberi arahan terkait pembenahan kondisi rumah tinggal mereka sehingga mereka memiliki bangunan yang nyaman, menarik serta fungsional. Nantinya akan berdampak di sektor ekonomi wisata atau yang lainnya.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
4.	Karakter Lingkungan dan Fasilitas Umum	Diperlukannya pengarahan dan pemahaman akan kualitas lingkungan dan bahaya akan kesehatan pada permukiman yang mereka tinggali berdampak pada kondisi kekumuhan. Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi lingkungan yang buruk di wilayah kampung mereka. Memberikan arahan, serta saran akan kebijakan terkait pelanggaran yang dilakukan jika dapat kondisi kesehatan dan kebersihan yang buruk di lingkungan mereka sendiri.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
5.	Kondisi Bangunan di Permukiman Nelayan	Kurangnya pemahan akan kualitas bangunan yang mereka tinggali dapat berdampak pada kesehatan mereka sendiri dan berdampak menjadikan kondisi kekumuhan pada lingkungan rumah mereka. Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi bangunan mereka yang tidak sesuai dengan standar, serta saran akan desain rumah yang sesuai standar sehingga dapat berdampak baik pada kondisi kesehatan dan kebersihan di lingkungan mereka sendiri.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.

No.	Aspek atau Faktor	Hasil Identifikasi	Penyebab Kekumuhan
6.	Aksesibilitas Jalan	Dari kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri. Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, untuk warga yang tidak memiliki kepemilikan lahan, serta iuran ringan atau menyadarkan akan gotong royong antar warga dalam perbaikan dengan tenaga yang mereka miliki sendiri.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
7.	Layanan Air Minum	Para warga tidak ada kendala dan sudah melakukan dan mencukupi kebutuhan primer nya sendiri akan kebutuhan air minum dengan menggunakan PDAM untuk air minum mereka. Dan untuk warga yang tanahnya bukan milik sendiri mereka biasanya mmbeli dari warga lainnya yang memiliki pemasangan PDAM.	Tidak, dikarenak bukan penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
8.	Drainase	Dari kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri. Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, atau pemerintah setempat untuk memperbaiki drainase di permukiman nelayan.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
9.	Air Limbah	Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan air limbah. Masyarakat memiliki kepedulian yang rendah terkait pengolahan limbah yang benar sesuai standart. Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, atau pemerintah setempat untuk memperbaiki pengelolaan limbah yang baik di permukiman nelayan.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.

No.	Aspek atau Faktor	Hasil Identifikasi	Penyebab Kekumuhan
10.	Pengelolaan Persampahan	Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan persampahan. Masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait pengolahan sampah yang benar sesuai standart. Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Dan sebaiknya terdapat aturan yang mengikat dan menindak tegas agar masyarakat setempat disiplin mengikuti standar dan aturan yang ada.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.
11.	Pengamanan Kebakaran	Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki proteksi kebakaran dari pemerintah. Ditambah dengan masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait proteksi kebakaran yang benar sesuai standart. Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait kondisi dan ketersediaan proteksi kebakaran bagi warganya.	Iya, termasuk faktor dari penyebab kekumuhan permukiman nelayan.

- Dari hasil analisa diatas merupakan rincian dari tujuan pertaman dari penelitian ini mengenai faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam memperoleh hasil akhir dari penelitian ini yakni konsep kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Settlements* yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karakteristik masyarakat di kawasan permukiman nelayan. Dibutuhkannya analisa lebih dalam terkait karakteristik masyarakat dan persepsi masyarakat dalam hal perbaikan. Oleh karena itu dibutuhkan analisa yang berupa identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdampak pada kekumuhan permukiman nelayan pada bab selanjutnya.

BAB VI

IDENTIFIKASI KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BERDAMPAK PADA KEKUMUHAN PERMUKIMAN NELAYAN

Analisa Persepsi Masyarakat

Identifikasi terhadap kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal pada permukiman nelayan sehingga berdampak pada kekumuhan yang terjadi pada permukiman tersebut menggunakan analisa deskriptif yang berkaitan dengan persepsi masyarakat. Dalam kajian teori akan persepsi juga menyebutkan bahwa persepsi masyarakat yang tinggal di daerah setempat akan memiliki persepsi yang berbeda – beda terhadap apapun berdasarkan banyak aspek, seperti budaya bermukim, gaya hidup mereka bahkan kondisi social dan perekonomian masyarakat juga andil memberikan dampak pada persepsi yang mereka miliki akan kekumuhan pada tempat tinggal mereka dan lingkungan sekitar mereka.

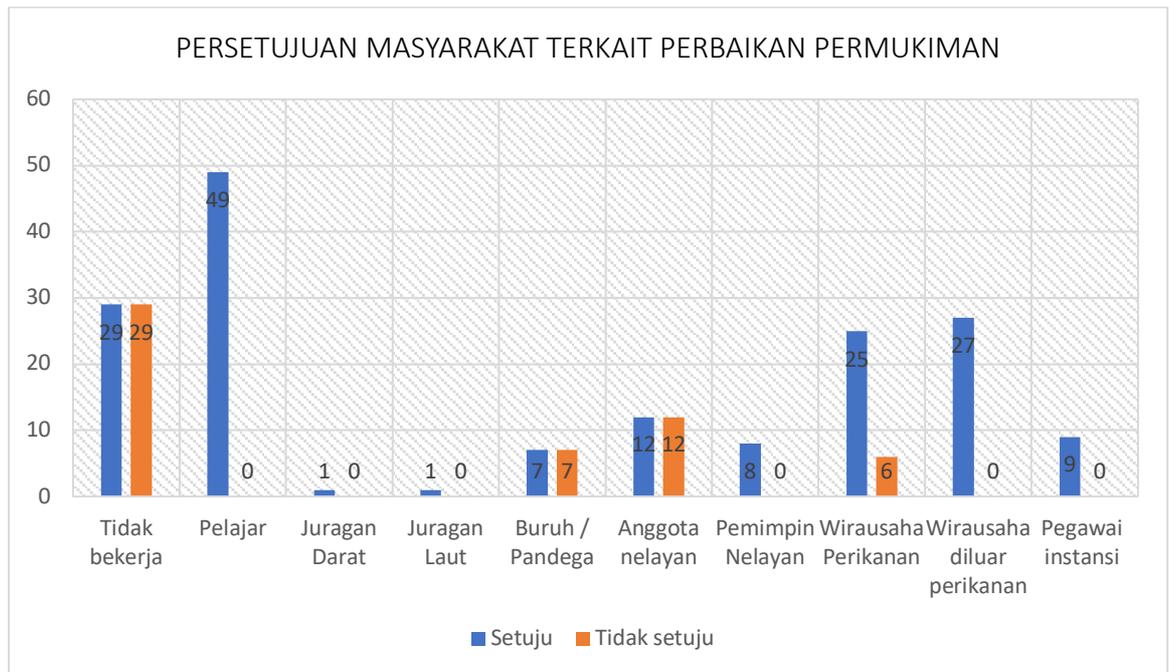
Hal tersebut juga terjadi pada persepsi yang dimiliki oleh masyarakat permukiman nelayan yang tergolong kumuh dari hasil identifikasi sebelumnya. Hal ini juga dapat dilihat dari kepedulian mereka dalam melihat seberapa pentingkah kekumuhan dan perbaikan kualitas tempat tinggal dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi social dan ekonomi masyarakat disini akan di bedakan dalam menganalisa persepsi akan kepedulian yang mereka miliki dalam upaya perbaikan kualitas tempat tinggal mereka.

Oleh karena itu terdapat beberapa aspek yang telah disusun, berdasarkan runtutan analisa, sebelum merumuskan konsep kawasan permukiman kumuh. Berikut aspek persepsi masyarakat akan perbaikan yang harus dilakukan di tempat tinggal mereka, analisa aspek program yang ditawarkan dalam melakukan perbaikan kualitas permukiman dimana mereka tinggal dan yang terakhir berupa aspek persepsi masyarakat dalam hal partisipatif jika program perbaikan tersebut terealisasi dan benar – benar dapat dilakukan oleh masyarakat dan juga pihak terkait.

6.1. Analisa Aspek Perbaikan

Aspek perbaikan akan dapat dirumuskan dari hasil dilakukannya analisa triangulasi pada tabel indikator kondisi kampung nelayan. Hal tersebut akan

dipertanyakan kembali kepada masyarakat setempat. Survei yang dilakukan pada responden akan diklasifikasikan berdasarkan perekonomian mereka. Sehingga dapat terlihat hasil dari prosentase persetujuan masyarakat setempat, dan tanggapan mereka secara umum serta dikaitkan dengan kajian literature yang digunakan. Berikut hasilnya terangkum dalam grafik 1.



- Tidak Bekerja 58 orang. Masyarakat yang tidak bekerja dan setuju terkait perbaikan berjumlah 29 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Pelajar 49 orang. Masyarakat pelajar dan setuju terkait perbaikan berjumlah 49 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Juragan Darat 1 orang. Masyarakat juragan darat dan setuju terkait perbaikan berjumlah 1 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Juragan Laut 1 orang. Masyarakat juragan laut dan setuju terkait perbaikan berjumlah 1 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Buruh atau Pandega 14 orang. Masyarakat buruh dan setuju terkait perbaikan berjumlah 7 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.

- Anggota Kelompok Nelayan 24 orang. Masyarakat anggota nelayan dan setuju terkait perbaikan berjumlah 12 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Pemimpin Kelompok Nelayan 8 orang. Masyarakat pemimpin nelayan dan setuju terkait perbaikan berjumlah 8 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Wirausaha perikanan 31 orang. Masyarakat wirausaha perikanan dan setuju terkait perbaikan berjumlah 25 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Wirausaha diluar perikanan dan kelautan 27 orang. Masyarakat wirausaha diluar bidang perikanan dan setuju terkait perbaikan berjumlah 27 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Pegawai instansi tertentu diluar perikanan dan kelautan 9 orang. Masyarakat pegawai instansi dan setuju terkait perbaikan berjumlah 9 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.

Dari hasil survey terhadap perspektif masyarakat terkait analisa perlunya perbaikan pada lingkungan tempat tinggalnya mayoritas penduduk setuju dengan rata2 diatas 50% persetujuan warga dan kemauan agar adanya perbaikan di kampung atau permukiman mereka.

Keterkaitan dengan kondisi sosial dan perekonomian warga dalam tahap mengidentifikasi hubungan kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal pada permukiman nelayan dapat berdampak pada kekumuhan yang terjadi pada permukiman tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari prosentasi dibawah 80% persetujuan yang didapatkan pada kelompok masyarakat yang memiliki financial ekonomi rendah berdasarkan klasifikasi mata pencaharian mereka. Buruh, anggota nelayan biasa dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan hanya 50% dari mereka yang memiliki kepedulian akan kualitas tempat tinggal mereka.

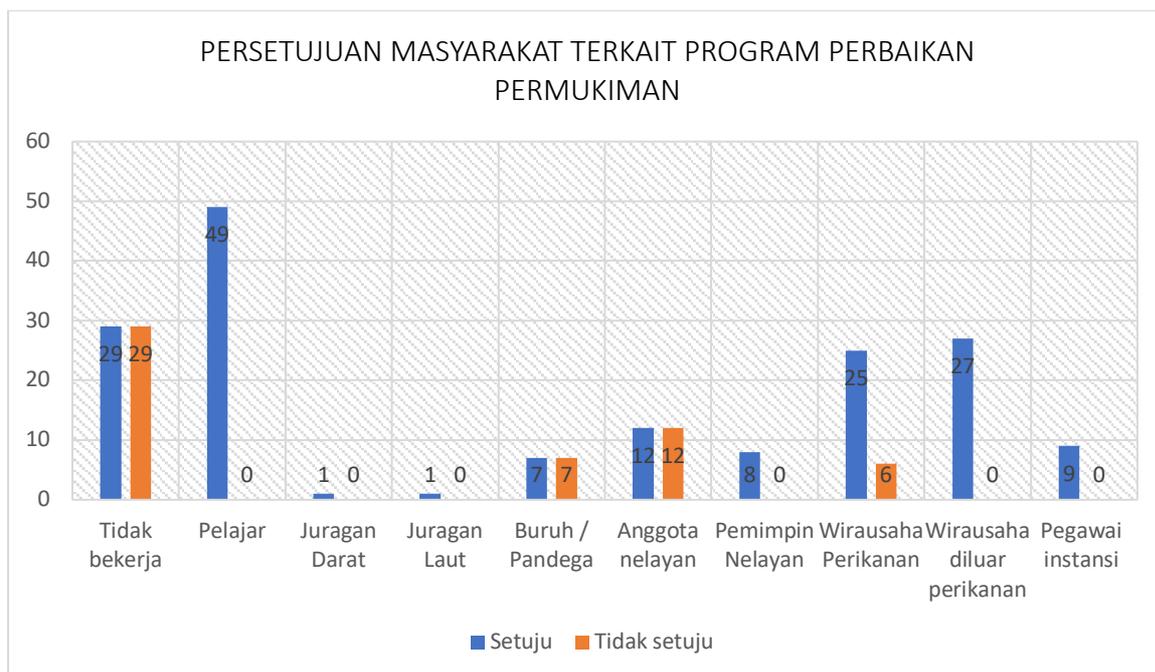
6.2 Analisa Aspek Program

Aspek program akan dapat dirumuskan dari hasil dilakukannya analisa aspek perbaikan, data perbaikan yang disepakati para stake holder merumuskan program perbaikan yang memungkinkan pada tabel sebelumnya. Selanjutnya akan dipertanyakan kembali kepada masyarakat setempat mengenai tanggapan warga dan persetujuan warga akan evaluasi dalam Pembentukan program dalam perbaikan permukiman.

Survei yang dilakukan pada responden akan diklasifikasikan berdasarkan perekonomian mereka seperti sebelumnya. Sehingga dapat terlihat hasil dari prosentase persetujuan masyarakat setempat, dan tanggapan mereka serta dikaitkan dengan kajian literature yang digunakan.

Aspek persepsi terhadap program dalam perbaikan permukiman nelayan ini akan dapat mudah dipahami dalam grafik 6.2 grafik analisa aspek program.

Grafik 6.2 Grafik Analisa Aspek Program



- Tidak Bekerja 58 orang. Masyarakat yang tidak bekerja dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah 29 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya perbaikan menginginkan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.

- Pelajar 49 orang. Masyarakat pelajar dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 49 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya diadakannya program perbaikan berjumlah mengingkikan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Juragan Darat 1 orang. Masyarakat juragan darat dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 1 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan mengingkikan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Juragan Laut 1 orang. Masyarakat juragan laut dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 1 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan mengingkikan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Buruh atau Pandega 14 orang. Masyarakat buruh dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 7 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan mengingkikan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek.
- Anggota Kelompok Nelayan 24 orang. Masyarakat anggota nelayan dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 12 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan mengingkikan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek.
- Pemimpin Kelompok Nelayan 8 orang. Masyarakat pemimpin nelayan dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 8 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan mengingkikan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Wirausaha perikanan 31 orang. Masyarakat wirausaha perikanan dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 25 orang. Tanggapan terkait adanya diadakannya program perbaikan berjumlah mengingkikan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Wirausaha diluar perikanan dan kelautan 27 orang. Masyarakat wirausaha diluar bidang diadakannya program perbaikan berjumlah dan setuju terkait perbaikan berjumlah 27 orang. Tanggapan terkait adanya diadakannya program perbaikan berjumlah mengingkikan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Pegawai instansi tertentu diluar perikanan dan kelautan 9 orang. Masyarakat pegawai instansi dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 9

orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya diadakannya program perbaikan dalam seluruh aspek.

Dari hasil survey terhadap perspektif masyarakat terkait analisa perlunya diadakannya program perbaikan pada lingkungan tempat tinggalnya mayoritas penduduk setuju dengan rata2 diatas 50% persetujuan warga dan kemauan agar diadakannya program perbaikan di kampung atau permukiman mereka.

Keterkaitan dengan kondisi sosial dan perekonomian warga dalam tahap mengidentifikasi hubungan kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal pada permukiman nelayan dapat berdampak pada kekumuhan yang terjadi pada permukiman tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari prosentasi dibawah 80% persetujuan yang didapatkan pada kelompok masyarakat yang memiliki financial ekonomi rendah berdasarkan klasifikasi mata pencaharian mereka. Buruh, anggota nelayan biasa dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan hanya 50% dari mereka yang memiliki kepedulian akan kualitas tempat tinggal mereka.

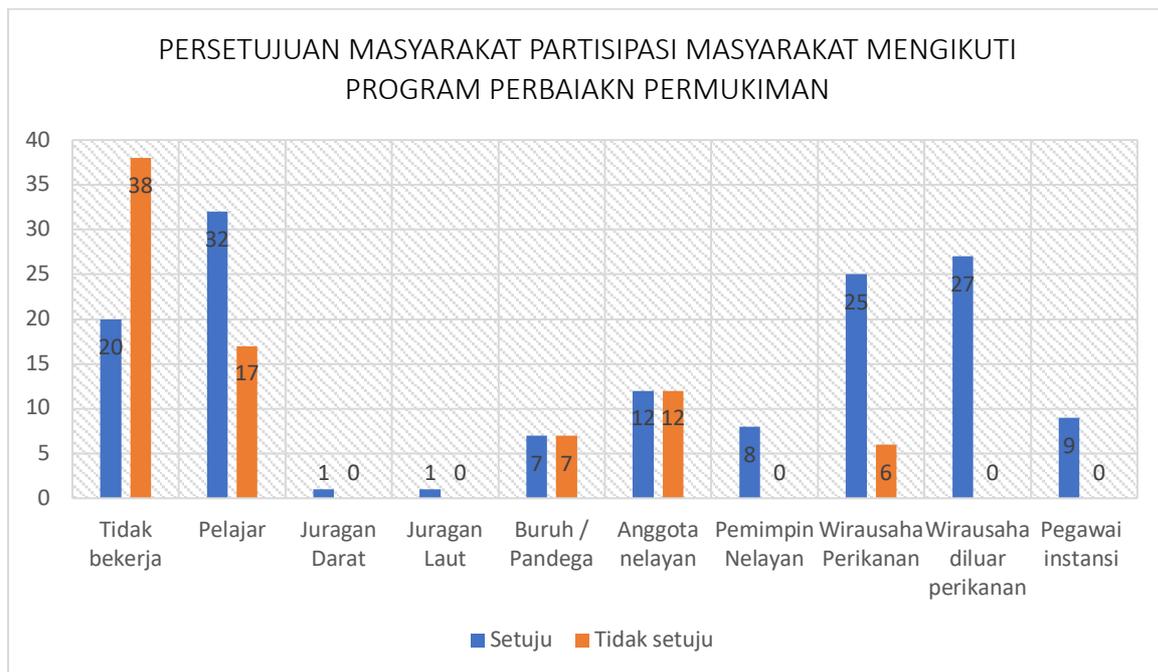
6.3 Analisa Aspek Partisipasi

Aspek partisipasi disini yang dimaksudkan adalah aspek persepsi dalam partisipasi yang dirumuskan dari hasil analisa yang dilakukan sebelumnya pada aspek program, data program perbaikan yang disepakati para stake holder pada tabel sebelumnya. Selanjutnya akan dipertanyakan kembali kepada masyarakat setempat mengenai tanggapan warga dan persetujuan warga akan partisipasi mereka dalam Pembentukan dan pelaksanaan kontribusi mereka melakukan program perbaikan permukiman dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Survei yang dilakukan pada responden akan diklasifikasikan berdasarkan perekonomian mereka seperti sebelumnya. Sehingga dapat terlihat hasil dari prosentase persetujuan masyarakat setempat, dan tanggapan mereka serta dikaitkan dengan kajian literature yang digunakan.

Aspek persepsi yang dimiliki masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti program perbaikan permukiman nelayan ini akan dapat mudah dipahami dalam grafik 6.3 yakni grafik analisa aspek partisipasi.

Grafik 6.3 Grafik Analisa Aspek Partisipasi



- Masyarakat yang tidak bekerja dan setuju terkait perbaikan berjumlah 20 orang saja. Tanggapan yang setuju untuk berpartisipasi dalam program perbaikan yang ada pada kampung mereka lebih sedikit dibanding 38 orang lainnya yang merasa keberatan dalam berpartisipasi. Mayoritas diantara mereka yg tidak mau berpartisipasi dikarenakan mereka sudah lanjut usia dan mereka yang masih belum cukup umur. Pelajar 49 orang. Masyarakat pelajar dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 49 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya diadakannya program perbaikan berjumlah menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Masyarakat pelajar dan setuju terkait perbaikan berjumlah 32 orang. Tanggapan yang setuju untuk berpartisipasi dalam program perbaikan yang ada pada kampung mereka lebih banyak dibanding 17 orang lainnya yang merasa keberatan dalam berpartisipasi. Mayoritas diantara mereka yg tidak mau berpartisipasi dikarenakan mereka yang masih belum cukup umur. Juragan Laut 1 orang. Masyarakat juragan laut dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 1 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum.
- Masyarakat juragan darat dan setuju terkait program perbaikan berjumlah 1 orang.

Tanggapan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam program perbaikan yang ada pada kampung mereka. Namun mereka lebih memilih secara finansial dibanding partisipasi dalam bentuk tenaga. Anggota Kelompok Nelayan 24 orang. Masyarakat anggota nelayan dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 12 orang. Tanggapan terkait adanya perbaikan menginginkan adanya diadakannya program perbaikan berjumlah dalam seluruh aspek.

- Masyarakat juragan laut dan setuju terkait program perbaikan berjumlah 1 orang. Tanggapan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam program perbaikan yang ada pada kampung mereka. Namun mereka lebih memilih secara finansial dibanding partisipasi dalam bentuk tenaga. Wirausaha perikanan 31 orang. Masyarakat wirausaha perikanan dan setuju terkait diadakannya program perbaikan berjumlah berjumlah 25 orang. Tanggapan terkait adanya diadakannya program perbaikan berjumlah menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek.
- Masyarakat wirausaha perikanan dan setuju terkait perbaikan berjumlah 25 orang. Tanggapan mayoritas yang menyetujui adanya program menginginkan adanya perbaikan dalam seluruh aspek yang sudah dirangkum dalam tabel.
- Masyarakat pegawai instansi dan setuju terkait perbaikan berjumlah 9 orang. Tanggapan mereka yang setuju untuk berpartisipasi dalam program perbaikan yang ada pada kampung mereka.

Dari hasil survey terhadap perspektif masyarakat terkait analisa partisipatif para warga menunjukkan hasil yang berbeda dari aspek sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa dari mereka merasa keberatan untuk turut berpartisipasi. Dari data yang ada di lapangan masyarakat yang kurang peduli akan kualitas lingkungannya adalah sebagian mereka yang memiliki kondisi finansial atau perekonomian rendah.

Namun terlepas dari hal tersebut warga juga masih banyak yang setuju dibanding dengan yang kurang setuju. Kebanyakan dari mereka menginginkan agar diadakannya program perbaikan di kampung atau permukiman mereka. Keterkaitan dengan kondisi sosial dan perekonomian warga dalam tahap mengidentifikasi hubungan kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal pada permukiman nelayan dapat berdampak pada kekumuhan yang terjadi pada permukiman tersebut.

6.4 Kesimpulan Terkait Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berdampak pada Kekumuhan Permukiman Nelayan

Berdasarkan analisa diatas, terkait identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdampak pada kekumuhan permukiman nelayan dapat disimpulkan terkait persepsi masyarakat akan kekumuhan yang ada pada lingkungan permukimannya.

Masyarakat yang dikatagorikan sebagai masyarakat mampu dan tidak mampu yang akan dibedakan dalam tabel saat analisa FGD yakni berdasarkan kesepakatan Bersama antar warga. Menurut persepsi para warga dan peneliti berdasar sumber income dari masing-masing kelompok penghuni permukiman. Dimana yang tergolong mampu adalah kalangan juragan darat, juragan laut, pegawai instansi, pemimpin nelayan, wirausaha perikanan dan diluar perikanan. Dan yang lainnya yakni anggota nelayan, buruh dan yang tidak bekerja merupakan golongan tidak mampu di mayoritas permukiman nelayan. Berikut hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kesimpulan Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berdampak pada Kekumuhan Permukiman Nelayan

Aspek Persepsi	Persepsi Warga Mampu	Persepsi Warga Kurang Mampu
Perbaikan	100% dari warga menyetujui, dan menginginkan adanya perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka.	50% dari warga menyetujui, dan menginginkan adanya perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepekaan dan kesadaran akan kesehatan lingkungan permukiman mereka. Namun mereka ingin mendapatkan bantuan yang nyata dari pihak pemerintah.
<p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikasi pengaruh dari kondisi social dan perekonomian masyarakat berpengaruh pada tingkat kekumuhan permukiman tempat tinggal mereka. Hal tersebut dikarenakan <i>life style</i> yang memang berbeda. Sehingga persepsi masyarakat untuk dilakukannya perbaikan masih sangat kurang di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. - Perlunya pengarahan akan kondisi dampak negative dari kekumuhan yang ada di tempat tinggal mereka. Sehingga masyarakat dapt sepenuhnya sepakat untuk diadakannya perbaikan akan kondisi kekumuhan yang ada di permukiman tempat tinggal mereka. 		

Aspek Persepsi	Persepsi Warga Mampu	Persepsi Warga Kurang Mampu
Program	100% dari warga menyetujui, dan menginginkan adanya program perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka.	50% dari warga menyetujui, dan menginginkan adanya perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepekaan dan kesadaran akan kesehatan lingkungan permukiman mereka.
<p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi persepsi masyarakat dengan kemungkinan adanya program dalam perbaikan permukiman mereka cukup sama dengan hasil identifikasi pada aspek persepsi masyarakat untuk memperbaiki permukiman tempat tinggal mereka. Indikasi ini tentunya dipengaruhi dari kondisi social dan perekonomian masyarakat berpengaruh pada tingkat kekumuhan permukiman tempat tinggal mereka. Hal tersebut dikarenakan yang memang berbeda. Sehingga persepsi masyarakat untuk dilakukannya program untuk perbaikan masih sangat kurang di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. - Perlunya peng gagasan konsep program perbaikan atau konsep perbaikan permukiman kumuh terutama di kampun nelayan karena notabene nya para warganya lebih banyak menghabiskan waktu di laut/ tambak/ pasar ikan. Sehingga mereka dapat senang hati menerima dan menjalani program tersebut. Disesuaikan dengan waktu yang mereka miliki dan juga kesepakatan para warga yang ada di kampung tersebut. 		
Aspek Persepsi	Persepsi Warga Mampu	Persepsi Warga Kurang Mampu
Partisipatif	80% dari warga menyetujui, dan mau untuk turut berpartisipasi dalam program perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka. Di poin inilah banyak terjadi penurunan persetujuan dikarenakan banyak yang tidak mau terbebani, baik secara fisik maupun waktu.	Kurang dari 50% dari warga menyetujui, dan mau untuk turut berpartisipasi dalam program perbaikan untuk kampung tempat tinggal mereka. Di poin inilah banyak terjadi penurunan persetujuan dikarenakan banyak yang tidak mau terbebani, baik secara tenaga fisik, finansial maupun waktu mereka.

Kesimpulan :

- Identifikasi persepsi masyarakat dengan kemungkinan mereka diminta untuk turut berpartisipasi pada program perbaikan permukiman ini memiliki hasil yang menurun daripada aspek sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan diantara mereka keberatan dan takut untuk meninggalkan pekerjaannya untuk berpartisipasi. Indikasi ini tentunya dipengaruhi dari kondisi social dan perekonomian masyarakat.
- Perlunya konsep program perbaikan atau konsep perbaikan permukiman kumuh yang dapat mengatur waktu para warga yang harus berpartisipasi agar mereka tetap dapat melakukan aktifitas mereka seperti biasa.
- Hal ini sangat dimungkinkan apabila program memiliki time schedule yang baik dan fleksibel mengikuti kesanggupan para warga. Sehingga mereka dapat senang hati menerima dan menjalani program tersebut.

Dari hasil analisa diatas merupakan dan jawaban dari tujuan penelitaian yang kedua yakni korelasi pengaruh dari karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman mereka. Dari hasil analisa pada tujuan pertaman dalam menganalisa mengenai faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan kriteria kumuh yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam memperoleh hasil akhir dari penelitian ini yakni konsep kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Settlements* yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karaketristik masyarakat di kawasan permukiman nelayan. Dilakukannya penjabran dan penarikan hasil rincian konsep pada bab selanjutnya sehingga penelitian ini memperoleh hasil penelitian yang mendetail berdaskan hasil analisa tujuan pertama dan kedua. Selanjutnya hasil penjabaran konsep dipaparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima konsep perbaikan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Berikut analisa dan penjabaran dari konsep kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Settlements* yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karaketristik masyarakat di kawasan permukiman nelayan dijelaskan pada bab selanjutnya.

BAB VII

PERUMUSAN KONSEP PERMUKIMAN NELAYAN BEBAS KUMUH DENGAN BERBASIS *SUSTAINABLE SETTLEMENTS*

7.1 Analisa Perumusan Kriteria Permukiman Nelayan yang Bebas Kumuh dengan Berbasis *Sustainable Settlements*

Penentuan konsep akhir dari penelitian ini membutuhkan faktor – faktor yang telah dianalisa kemudian di kaji ulang dengan kriteria yang dimiliki oleh UN yakni *Sustainable Settlements* dalam menentukan kriteria dalam menentukan konsep akhir dari penelitian ini. Dalam menentukan faktor – faktor dari kriteria yang sudah dianalisa dengan kriteria yang sesuai dengan rujukan *Sustainable Settlements*, keduanya akan dianalisis untuk dijadikan sebuah kriteria menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan validasi data melalui tahapan *forum group discussion*. Berikut prinsip dari konsep *Sustainable Settlements* :

1. Transformasi spasial fisik
2. Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup
3. Fungsional, responsif dan desain yang inovatif
4. Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.
5. Kehidupan kota yang terjangkau
Memiliki kehidupan kota yang dapat dijangkau di setiap permukiman.
6. Kelangsungan finansial
7. Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan
8. Kelestarian lingkungan
9. Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal

Dengan cara ini ditujukan agar memperoleh hasil yang maksimal dan mendalam dengan kesepakatan para *stake holder* kampung yang menjadi responden sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menghasilkan suatu rumusan kriteria dalam perbaikan kampung nelayan yang bebas kumuh.

7.1.1 Perumusan kriteria pada konsep *Sustainable Settlements*

Kriteria atau prinsip – prinsip dari acuan *Sustainable Settlements* dipaparkan terlebih dahulu kepada narasumber dalam wawancara bersama, untuk mengetahui pendapat dan persetujuan para stake holder dan perwakilan warga kampung nelayan terhadap poin-poin perbaikan kampung nelayan pada studi kasus. Berikut ini merupakan penjabaran dan hasil dari wawancara berdasarkan prinsip-prinsip kriteria dalam konsep *Sustainable Settlements* :

1. Transformasi spasial fisik

Perubahan bentuk ruang dan fisik bangunan tempat tinggal mengarah ke desain yang lebih baik dan layak untuk dihuni. Suatu perbaikan permukiman memerlukan transformasi spasial fisik agar permukiman tersebut lebih layak untuk dihuni. Perbaikan permukiman nelayan agar dapat terbebas dari kekumuhan melibatkan perbaikan dalam bentuk transformasi atau perubahan pada spasial atau keruangan dan perubahan pada fisik permukiman nelayan tersebut.

Transformasi spasial sendiri yang dapat dilakukan di permukiman nelayan yakni dengan perbaikan space atau ruang-ruang kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dapat dimanfaatkan sebagai ruang yang memiliki nilai lebih seperti space untuk menjemur ikan bersama atau kegiatan lain seperti untuk pengasapan ikan Bersama dan yang lainnya yang dapat menjadi daya tarik warga sekitar kampung. Sehingga dapat meningkatkan *income* warga setempat.

Transformasi fisik dalam perbaikan kampung nelayan yang ada pada studi kasus dapat dilakukan dengan perbaikan pada gapura atau *main gate* dari kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Perbaikan pada fisik bangunan TPI (tempat pelelangan ikan) milik warga setempat yang kondisi fisiknya tidak layak. Hal tersebut dapat diperbaiki, diusulkan kepada pemerintah setempat dan dilakukan dengan gotong royong warga kampung nelayan. Sehingga harapannya setelah dilakukannya transformasi spasial fisik pada kampung nelayan, kampung ini bisa menjadi kampung yang lebih baik lagi, kampung yang bebas kumuh serta *sustainable*.

2. Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup

Penyediaan infrastruktur pendukung sebuah permukiman yang layak dan memiliki manajemen pengaturan sebuah permukiman. Permukiman Tambak Cemandi Sidoarjo belum memiliki infrastruktur yang layak serta manajemen lingkungan yang baik. Hal ini dilihat dari kondisi fisik permukiman dan lingkungan eksisting. Sebuah permukiman yang *sustainable* tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang layak serta manajemen lingkungan yang baik.

Infrastruktur sudah ada dan tersedia pada studi kasus, kondisi fisik infrastruktur seperti: jalan, jembatan dan gapura yang seadanya masih dapat difungsikan cukup baik. Namun hal ini perlu dilakukannya pembaharuan, perbaikan agar kondisi fisik kampung ini menjadi lebih baik dan terawat. Serta perlunya perawatan secara berkala dalam manajemen lingkungan dan infrastruktur yang sudah diperbaiki nantinya agar kondisinya terjaga dan menjadi kampung yang *sustainable*.

3. Fungsional, responsif dan desain yang inovatif

Memiliki desain yang fungsional, responsif dan desain yang juga inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Memiliki desain permukiman yang terintegrasi secara fungsi serta responsive terhadap potensi yang dimiliki serta memiliki desain yang inovatif. Perbaikan lingkungan permukiman yang *sustainable*. Dapat dilihat dari segi fungsi, respond dan dari segi desain dari kebutuhan ruang dan desain permukiman tersebut. Jika poin dari kriteria ini dapat dipenuhi maka sebuah kota dapat dikatakan *sustainable*.

Kondisi yang ada pada lokasi studi yakni kampung Tambak Cemandi Sidoarjo memiliki kondisi permukiman yang fungsional namun tidak memiliki desain yang responsive dan inovatif. Terlihat dari bangunan rumah dan sekitar permukiman di desa Tambak Cemandi Sidoarjo memerlukan adanya perbaikan dari segi desain. Baik dari segi desain rumah warga yang ada di permukiman. Dan juga desain permukiman Kampung Tambak Cemandi itu sendiri. Dalam segi desain yang harusnya merespon dari fungsi rumah – rumah warga yang ada di kampung nelayan. Dibutuhkannya desain yang dapat mewadahi aktivitas masyarakat penghuni desa Tambak Cemandi Sidoarjo sehingga kampung nelayan ini memiliki desain yang menarik dan dapat menarik perhatian warga sekitar.

Desain permukiman dari kampung nelayan ini juga sangat dibutuhkan dikarenakan kampung ini memiliki ciri khas sebagai kampung nelayan yang menyediakan dan menjual berbagai hasil tangkapan dari laut dan dari tambak yang dihasilkan oleh warga setempat. Namun sangat disayangkan karena kampung nelayan tambak cemandi belum memiliki desain yang baik, yang merespon serta kurang fungsionalis. Oleh karena itu berdasarkan prinsip kriteria dari *Sustainable Settlement*, dibutuhkan penataan dan desain dari permukiman nelayan sehingga kampung nelayan menjadi kampung yang maju, memiliki desain yang merespon potensinya sebagai kampung nelayan, serta berfungsi sebagai permukiman yang dapat menguatkan perekonomian dari masyarakat setempat.

4. Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.

Memiliki aksesibilitas yang jelas dan dapat dijangkau dan menjangkau layanan fasilitas yang ada di setiap permukiman. System aksesibilitas masyarakat akan suatu tempat ke tempat lain juga menjadi faktor yang penting dalam membangun sebuah lingkungan kota yang sustainable. Ketersediaan ruang public atau ruang hijau perkotaan yang aman dan inklusif bagi masyarakatnya juga sangat diperlukan. Sebuah kota memiliki unsur *path* yang berarti jalan atau akses yang memudahkan masyarakat berkumpul pada suatu tempat didalam sebuah kota. Dalam lingkup permukiman sebuah kawasan permukiman memiliki jalan dari gang – gang kampung menuju taman atau lapangan atau tempat yang lainnya yang dapat digunakan masyarakat setempat yang tinggal dikawasan itu dapat bersosialisasi satu sama lain dan merasakan udara yang segar dan hijau bebas dari polusi dan lain sebagainya. Jika poin dari kriteria ini dapat dipenuhi maka sebuah kota dapat dikatakan *sustainable*.

Kampung nelayan Tambak Cemandi yang digunakan sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini merupakan kawasan yang memiliki akses ke ruang publik dan hijau yang aman dan inklusif menurut para *stake holder*. Hal tersebut dikarenakan kampung nelayan pada studi kasus memiliki ruang public seperti area mangrove, area sandaran perahu nelayan dan area pinggir tambak. Di tempat – tempat tersebutlah masyarakat setempat saling bersosialisasi, bertukar informasi dan melakukan aktifitas sosial lainnya. Akses yang mudah menuju jalan dari gang – gang permukiman warga nelayan menuju spot – spot ruang terbuka hijau ini tergolong jelas. Namun yang disayangkan kondisi jalan yang ada pada kampung nelayan Tambak Cemandi masih memerlukan perbaikan, terkait jalanan yang belum terpaving dan masih berupa tanah yang diberi pengerasan berupa kerikil dan limbah kulit kerang hasil dari kampung ini, yang digunakan sehari hari oleh warga yang tinggal di kampung ini.

Meskipun demikian hal yang harus diperhatikan disini, kampung nelayan desa Tambak Cemandi memerlukan perbaikan pada kondisi jalan yang merupakan akses ke ruang public dan ruang hijau di kawasan kampung tersebut, karena letak kampung yang sangat berada di pinggir dan dekat dengan laut. Bisa gotong royong membenahi jalan yang digunakan mereka menggunakan pengerasan jalan yang mudah menyerap air seperti balok paving. Hal ini demi keamanan warga agar dapat melintasi jalan setapak dengan aman. Selain hal tersebut yang harus diperhatikan agar kampung tambak cemandi menjadi kampung yang sustainable,

perawatan akan fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau atau ruang public dapat dibenahi agar masyarakat penduduk setempat dapat menikmati tempat berkumpul di area perkampungan mereka dengan aman dan nyaman. Dengan memperbaiki fasilitas public dan aksesibilitasnya dapat menjadikan poin penting agar kampung Tambak Cemandi semakin berkembang dan dapat menjadi sebuah kampung pesisir atau kampung nelayan yang menerapkan konsep *sustainable*.

5. Kehidupan kota yang terjangkau

Memiliki kehidupan kota yang dapat dijangkau di setiap permukiman. Kota yang *sustainable* merupakan kota yang di dalamnya berisi perumahan yang aman dan terjangkau. Aman dilihat dari aspek keamanan fisik dan sosial. Aman atau *security* dari sebuah rumah, perumahan atau kampung berarti tempat tinggal tersebut aman dari bahaya yang berasal dari luar baik yang mengancam fisik maupun ancaman sosial maupun psikologis dari sebuah rumah atau kampung. Kehidupan di Desa Tambak Cemandi padastudi kasus tergolong memiliki kehidupan yang terjangkau. Hal tersebut dikarenakan permukiman tersebut dikategorikan memiliki kehidupan terjangkau bagi warga atau masyarakat yang tinggal di dalamnya karna mencakup beberapa hal. Yakni harga bangunan dan harga tanah dari sebuah wilayah, kondisi mayoritas sebuah kota maupun dalam sector perumahan atau perkampungan. Jika kriteria tersebut dipenuhi maka sebuah kota dapat dikatakan *sustainable*.

6. Kelangsungan finansial

Permukiman yang *sustainable* dapat melangsungkan aktifitas finansial atau yang biasa disebut *home based enterprise* dalam sebuah lingkup permukiman itu sendiri. Permukiman nelayan memiliki mayoritas sebagai rumah yang menerapkan fungsi *home based enterprise* sehingga kelangsungan finansial dari perkampungan nelayan Tambak Cemandi Sidoarjo berjalan dengan baik serta sudah memiliki sumber mata pencaharian yang melimpah di sekitar permukiman mereka. Oleh karena itu menurut masyarakat setempat aspek kelangsungan finansial di daerah ini sudah cukup baik.

7. Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan

Menjadikan sebuah permukiman di dalam atau bagian dari suatu kota yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Hal tersebut mencakup banyak

sector baik disektor permukiman masyarakatnya, sector perekonomiannya, sektor budaya maupun system transportasi yang ada di sebuah permukiman yang juga bagian dari sebuah kota. Perencanaan oleh pemerintah terkait dapat dilakukan berdasarkan potensi maupun problematika yang dapat dilihat dari dalam tatanan sebuah permukiman atau kampung tersebut. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan berjalan sesuai rencana dan kriteria yang telah ditentukan maka kota tersebut dapat dikatakan *sustainable*.

Kampung nelayan Tambak Cemandi yang digunakan sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini merupakan kawasan yang memiliki potensi dan problematika yang menantang menurut para *stake holder*. Hal tersebut dikarenakan kampung nelayan pada studi kasus ini memiliki potensi yang sangat besar menjadi kampung yang maju dengan potensi wilayahnya, kawasan permukiman yang berada di pesisir kota Sidoarjo dan berada tidak jauh dari bandara Juanda Surabaya ini, merupakan kawasan yang sangat menarik dan dapat menjadi kawan permukiman yang terkenal akan hasil perikanan yang diperoleh masyarakat setempat dari hasil nelayan laut dan juga nelayan tambak yang ada di kampung tersebut. Namun disamping potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kawasan ini, terdapat juga permasalahan yang masih dimiliki terkait kendala, faktor internal maupun faktor eksternal dari kampung Tambak Cemandi ini. Diantaranya kendala yang berasal dari sektor internal adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya kepekaan masyarakat terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Kendala dari sektor eksternal kampung Tambak Cemandi ini terletak pada support dari pemerintah yang masih dirasa kurang dalam upaya memajukan kawasan yang sangat berpotensi menjadi kampung yang mandiri dan berkarakter karena letak geografis dan kondisi sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Dengan demikian hal yang harus diperhatikan disini, kampung nelayan desa Tambak Cemandi dapat dikembangkan menjadi kampung yang memiliki karakter dan keunggulan dari sektor sosial, budaya serta perekonomiannya apabila terdapat stimulator dan arahan-arahan untuk warga agar dapat memperbaiki kekurangan yang mereka miliki, baik dari segi kesadaran terhadap lingkungan alam yang ada disekitar tempat tinggal mereka maupun disektor lain. Perencanaan dan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dapat di jadikan panduan dan dapat dikembangkan kembali sebagai dasar perencanaan daerah secara mikro di kawasan permukiman

kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Dengan adanya manajemen mendetail dari rencana pembangunan suatu wilayah juga dapat menjadikan poin yang sangat penting agar kampung tambak cemandi semakin berkembang dan dapat menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan lokal dari masyarakat di luar kampung ini. atau kota sebelah, dan juga dapat mengembangkan sector perekonomian warga di permukiman nelayan.

8. Kelestarian lingkungan

Menjadikan sebuah permukiman yang di dalamnya melakukan secara disiplin bagian dari kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi eksiting lingkungan yang ada pada studi kasus yakni di desa tambak cemandi Sidoarjo memiliki kondisi yang buruk sehingga diperlukannya perbaikan pemukiman dan lingkungan sekitarnya. Kondisi persampahan dan lingkungan alam seperti sungai dan pesisir laut juga memiliki kondisi lingkungan yang buruk. Masyarakat setempat mengakui sudah terbiasa membuang sampah ke laut dibandi di kumpulkan dahulu di tempat pembuangan akhir. Sehingga diperlukannya manajemen permukiman oleh stake holder dan ketua RT – RW setempat untuk memberlakukan aturan yang tegas untuk menjalankan perbaikan permukiman melalui aspek kelestarian lingkungan.

Sehingga permukiman di desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ini dengan cara pemberian saran dan arahan kepada warga setempat dan juga para stake holder dalam membuat aturan warga setempat di segi menjaga kelestarian lingkungannya. Kesepakatan antara warga dan juga stake holder diperlukan agar dalam pelaksanaan konsep tersebut, warga dapat menerima dan mau menjalankan dengan sebagaimana mestinya.

9. Ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal

Menjadikan sebuah permukiman bebas kumuh yang mandiri secara ekonomi dan penciptaan lapangan kerja local serta disiplin dalam melakukan kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Kampung pesisir pada studi kasus merupakan kampung yang sudah mandiri dalam bidang perekonomian. Perekonomian mayoritas warga di desa Tambak Cemandi memanfaatkan potensi alam yang mereka dapatkan, baik dari hasil laut dan budidaya tambak para warga. Warga setempat menjual langsung ikan yang mereka dapatkan di TPI (tempat pelelangan ikan) dan di depan rumah-rumah mereka.

Sehingga bisa dikatakan permukiman di desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ekonomi dan penciptaan lapangan kerja local ini dengan cara mengembangkan penjualan mereka melalui media online dan arahan kepada warga

setempat serta para stake holder kampung dalam pembinaan warga setempat di segi UMKM (usaha masyarakat kecil dan menengah). Melalui bantuan pemerintah dan juga LSM (Lembaga sosial masyarakat) warga dapat memperoleh arahan dan binaan yang diperlukan agar dalam pelaksanaan konsep ini warga dapat menerapkan dan mengembangkan perekonomian mereka secara mandiri.

Berikut ringkasan dari hasil analisa diskripti mengenai penjabaran poin – poin kriteria dari konsep *Sustainable Settlements* diatas akan dijelaskan pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 Kriteria pada konsep *Sustainable Settlements*

Kriteria pada konsep <i>Sustainable Settlements</i>	Hasil diskusi dalam wawancara terkait kondisi studi kasus	Kesimpulan Berdasarkan Kesepakatan
Transformasi spasial fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan space atau ruang-ruang kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dimanfaatkan sebagai ruang yang memiliki nilai lebih seperti space untuk menjemur ikan bersama atau kegiatan lain seperti untuk pengasapan ikan • Transformasi fisik dalam perbaikan kampung nelayan yang ada pada studi kasus dapat dilakukan dengan perbaikan pada gapura atau <i>main gate</i> dari kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Perbaikan pada fisik bangunan TPI (tempat pelelangan ikan) milik warga setempat yang kondisi fisiknya tidak layak. 	Diperlukan pembenahan terkait aspek transformasi spasial fisik.
Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur sudah ada dan tersedia pada studi kasus, kondisi fisik infrastruktur seperti: jalan, jembatan dan gapura yang seadanya. Namun hal ini perlu dilakukannya pembaharuan, perbaikan agar kondisi fisik kampung ini menjadi lebih baik dan terawat. Perlunya perawatan secara berkala dalam memajemen lingkungan dan infrastruktur permukiman pesisir. 	Diperlukan Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup
Desain yang inovatif fungsional, responsif dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkannya desain yang dapat mewadahi aktivitas masyarakat sehingga kampung nelayan ini memiliki desain yang menarik dan dapat menarik perhatian warga sekitar. • Desain permukiman dari kampung nelayan ini juga sangat dibutuhkan dikarenakan kampung ini memiliki ciri khas sebagai kampung nelayan yang menyediakan dan menjual berbagai hasil tangkapan dari laut dan dari tambak yang dihasilkan oleh warga setempat. 	Diperlukan Desain yang fungsional, responsif dan inovatif

Kriteria pada konsep <i>Sustainable Settlements</i>	Hasil diskusi dalam wawancara terkait kondisi studi kasus	Kesimpulan Berdasarkan Kesepakatan
Akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tambak Cemandi memerlukan perbaikan pada kondisi jalan yang merupakan akses ke ruang public dan ruang hijau di kawasan kampung tersebut, karena letak kampung yang sangat berada di pinggir dan dekat dengan laut, masyarakat dapat gotong royong membenahi jalan yang digunakan mereka menggunakan pengerasan jalan yang mudah menyerap air seperti balok paving. Hal ini demi keamanan warga agar dapat melintasi jalan setapak dengan aman. Selain hal tersebut yang harus diperhatikan agar kampung tambak cemandi menjadi kampung yang sustainable, perawatan akan fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau atau ruang public. 	<p>Diperlukan</p> <p>Perbaikan terkait akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas.</p>
Kehidupan kota yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> Kehidupan di Desa Tambak Cemandi pada studi kasus tergolong memiliki kehidupan yang terjangkau. Hal tersebut dikarenakan permukiman tersebut dikategorikan memiliki kehidupan terjangkau bagi warga atau masyarakat yang tinggal di dalamnya karena mencakup beberapa hal. Yakni harga bangunan dan harga tanah dari sebuah wilayah, kondisi mayoritas sebuah kota maupun dalam sector perumahan atau perkampungan. 	<p>Tidak diperlukannya</p> <p>Aspek kehidupan kota yang terjangkau dalam konteks permukiman nelayan</p>
Kelangsungan finansial	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman nelayan memiliki mayoritas sebagai rumah yang menerapkan fungsi <i>home based enterprise</i> sehingga kelangsungan finansial dari perkampungan nelayan Tambak Cemandi Sidoarjo berjalan dengan baik serta sudah memiliki sumber mata pencaharian yang melimpah di sekitar permukiman mereka. Oleh karena itu menurut masyarakat setempat aspek kelangsungan finansial di daerah ini sudah cukup baik. 	<p>Tidak diperlukannya</p> <p>Aspek Kelangsungan finansial dalam konteks permukiman nelayan</p>
Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota yang keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dapat di jadikan panduan dan dapat dikembangkan kembali sebagai dasar perencanaan daerah secara mikro di kawasan permukiman kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Dengan adanya manajemen mendetail dari rencana pembangunan suatu wilayah juga dapat menjadikan poin yang sangat penting agar kampung tambak cemandi semakin berkembang dan dapat menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan lokal dari masyarakat di luar kampung ini. 	<p>Tidak diperlukannya</p> <p>Aspek manajemen kota yang efektif dan keuangan kota yang keberlanjutan</p>

Kriteria pada konsep <i>Sustainable Settlements</i>	Hasil diskusi dalam wawancara terkait kondisi studi kasus	Kesimpulan Berdasarkan Kesepakatan
Kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi persampahan dan lingkungan alam seperti sungai dan pesisir laut juga memiliki kondisi lingkungan yang buruk. Masyarakat setempat mengakui sudah terbiasa membuang sampah ke laut dibandi di kumpulkan dahulu di tempat pembuangan akhir. Sehingga diperlukannya manajemen permukiman oleh stake holder dan ketua RT – RW setempat untuk memberlakukan aturan yang tegas untuk menjalankan perbaikan permukiman melalui aspek kelestarian lingkungan. • Sehingga permukiman di desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ini dengan cara pemberian saran dan arahan kepada warga setempat dan juga para stake holder dalam membuat aturan warga setempat di segi menjaga kelestarian lingkungannya. Kesepakatan antara warga dan juga stake holder diperlukan agar dalam pelaksanaan konsep tersebut, warga dapat menerima dan mau menjalankan dengan sebagaimana mestinya. 	<p>Diperlukan</p> <p>Perbaikan terkait aspek kelestarian lingkungan dalam tahap perbaikan permukiman nelayan</p>
Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian mayoritas warga di desa Tambak Cemandi memanfaatkan potensi alam yang mereka dapatkan, baik dari hasil laut dan budidaya tambak para warga. Warga setempat menjual langsung ikan yang mereka dapatkan di TPI (tempat pelelangan ikan) dan di depan rumah-rumah mereka. • Sehingga bisa dikatakan permukiman di desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ekonomi dan penciptaan lapangan kerja local ini dengan cara mengembangkan penjualan mereka melalui media online dan arahan kepada warga setempat serta para stake holder kampung dalam pembinaan warga setempat di segi UMKM (usaha masyarakat kecil dan menengah). 	<p>Tidak diperlukannya</p> <p>Aspek ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lokal dalam tahap perbaikan permukiman nelayan</p>

7.1.2 Kriteria dan konsep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep

Sustainable Settlements

Kriteria yang akan dijabarkan menjadi konsep dari penelitian ini terdiri dari beberapa hasil analisa. Data pertama yakni terkait faktor – faktor yang dianalisa dari kriteria permukiman kumuh sesuai standar SNI dengan kondisi yang ada pada studi kasus yakni permukiman nelayan Tambak Cemandi Sidoarjo. Data ke dua yakni poin penting kriteria hasil analisa terkait hubungan antara kondisi kekumuhan dengan konsis social dan ekonomi masyarakat setempat. Dan data yang ke tiga menggunakan data hasil dari forum group discussion para stake holder kampung studi kasus, terkait kondisi kampung dengan poin atau aspek – aspek dari konsep *Sustainable Settlement* yang telah disepakati oleh UN dan seluruh dunia.

Dari data – data diatas akan kami jabarkan dalam sebuah tabel untuk meruntutkan poin – poin atau aspek yang menjadi kriteria sebuah konsep kampung nelayan yang bebas kumuh dan berbasis konsep *Sustainable Settlements*. Yang nantinya dari poin kriteria tersebut akan dijabarkan kembali konsep – konsep detail dari poin – poin kriteria yang dihasilkan. Berikut hasil analisa kriteria terangkum dalam tabel berikut ini.

Analisa Kriteria dan Kosep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep *Sustainable Humman Settlements*

Tabel 7.2 Analisa Kriteria dan Kosep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep *Sustainable Settlements*

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan	Kondisi permukiman di area pesisir memang masih terlihat renggang namun mengarah pada kondisi yang cukup kepdatannya. Sehingga perlu diadakannya pencegahan dalam penambahan jumlah rumah – rumah baru pada lahan yang sama karena dapat mengakibatkan kepadatan tinggi yang terpusat di area permukiman nelayan.	Berdasarkan analisa di atas memperlihatkan bahwa kondisi permukiman nelayan di tambak cemandi tergolong tinggi sekitar 201-400 jiwa/ha. Kelebihan 16 jiwa/ha dalam kawasan ini belum terlalu dirasakan kepdatannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penambahan penduduk. • Pencatatan migrasi penduduk setempat. • Sosialisasi kepada warga terkait aturan standar yang berlaku.
Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan	<p>Pasal 35 ayat 1 UUPA Hak Guna Bangunan : hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.</p> <p>Kondisi keresahan masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan di tambak dikarenakan penduduk yang sebenarnya ingin membeli dengan cara mencicil pada koperasi namun pihak yang berwenang tidak ingin melepaskan tanah tersebut untuk masyarakat.</p>	Sehingga perlu diadakannya negosiasi pada kontrak perjanjian dari sewa 10 tahun menjadi 30 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat lebih merasa aman dari adanya penggusuran atau perubahan sewaktu-waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Diadakannya negosiasi pada kontrak perjanjian dari sewa 10 tahun menjadi 30 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. • Pencatatan status kepemilikan tanah penduduk setempat secara periodik.

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Karakter Bangunan Permukiman Nelayan	Diperlukannya pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat kekumuhan yang ada di wilayah kampung mereka.	Memberi arahan terkait pembenahan kondisi rumah tinggal mereka sehingga mereka memiliki bangunan yang nyaman, menarik serta fungsional. Nantinya akan berdampak di sektor ekonomi wisata atau yang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat kekumuhan yang ada di wilayah kampung mereka. • Dan memberikan preseden rumah contoh yang layak huni.
Karakter Lingkungan dan Fasilitas Umum	Diperlukannya pengarahan dan pemahaman akan kualitas lingkungan dan bahaya akan kesehatan pada permukiman yang mereka tinggali berdampak pada kondisi kekumuhan.	Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi lingkungan yang buruk di wilayah kampung mereka. Memberikan arahan, serta saran akan kebijakan terkait pelanggaran yang dilakukan jika dapat kondisi kesehatan dan kebersihan yang buruk di lingkungan mereka sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat kekumuhan pada lingkungan sekitar tempat tinggal kampung mereka. • Dan memberikan preseden contoh lingkungan permukiman dan fasilitas umum yang layak huni
Kondisi Bangunan di Permukiman Nelayan	Kurangnya pemahan akan kualitas banguan yang mereka tinggali dapat berdampak pada kesehatan mereka sendiri dan berdampak menjadikan kondisi kekumuhan pada lingkungan rumah mereka.	Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi bangunan mereka yang tidak sesuai dengan standar, serta saran akan desain rumah yang sesuai standar sehingga dapat berdampak baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat bangunan mereka yang tidak sesuai dengan standar. • Dan memberikan preseden desain rumah yang sesuai standar yang layak huni

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Aksesibilitas Jalan	Kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri	Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, untuk warga yang tidak memiliki kepemilikan lahan, serta iuran ringan atau menyadarkan akan gotong royong antar warga dalam perbaikan dengan tenaga yang mereka miliki sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat ketidak layakan aksesibilitas jalan yang tidak sesuai dengan standar. • Dan memberikan preseden jalan yang sesuai standar
Drainase	Kondisi eksisting yang kurang sesuai standar dikibatkan oleh persepsi masyarakat yang buruk akan lingkungannya sendiri.	Disini sebaiknya terdapat penyampaian aspirasi warga kepada pihak pemilik lahan, atau pemerintah setempat untuk memperbaiki drainase di permukiman nelayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat ketidak layakan system drainase yang tidak sesuai dengan standar. • Dan memberikan preseden system drainase yang sesuai standar.

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Pengelolaan Persampahan	Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki pengelolaan persampahan. Masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait pengolahan sampah yang benar sesuai standart.	Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Dan sebaiknya terdapat aturan yang mengikat dan menindak tegas agar masyarakat setempat disiplin mengikuti standar dan aturan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat ketidak layakan pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar. • Dan memberikan preseden pengelolaan persampahan yang sesuai standar
Pengamanan Kebakaran	Kawasan permukiman pada studi kasus tidak memiliki proteksi kebakaran dari pemerintah. Ditambah dengan masyarakat memiliki kepedulian yang sangat rendah terkait proteksi kebakaran yang benar sesuai standart.	Sehingga mereka memerlukan pemahaman terkait sebab akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait kondisi dan ketersediaan proteksi kebakaran bagi warganya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan dan pemahaman akan sebab akibat yang ditimbulkan akibat ketidak layakan pengamanan kebakaran yang tidak sesuai dengan standar. • Dan memberikan preseden yang sesuai dengan standar
Peningkatan kualitas social masyarakat	Kondisi kualitas social masyarakat masih perlu ditingkatkan, rendahnya kualitas social masyarakat suatu wilayah akan mempengaruhi perkembangan dan citra tersederi bagi wilayah tersebut.	Sehingga perlunya masyarakat untuk meningkatkan kualitas social mereka. Agar wilayah tersebut dapat berkembang sejalan dengan kreativitas masyarakatnya.	Memberikan pelatihan pelatihan pada masyarakat yang tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga secara periodic. Serta kegiatan social gerakan peduli lingkungan.
Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat	Kondisi kualitas perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat dari suatu wilayah akan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut.	sehingga perlu adanya bimbingan bagi para masayarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.	Memberikan pelatihan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat yang tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga secara periodic.

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Pemahaman persepsi warga terkait program kampung bebas kumuh	Perlunya peng gagasan konsep program perbaikan atau perbaikan permukiman kumuh terutama di kampun nelayan karena notabene nya para warganya lebih banyak menghabiskan waktu di laut/ tambak/ pasar ikan.	Perlunya konsep program perbaikan atau penataan permukiman kumuh yang dapat mengatur waktu para warga yang harus berpartisipasi agar mereka tetap dapat melakukan aktifitas mereka seperti biasa.	Program perbaikan kampung yang memiliki time schedule yang baik dan fleksibel mengikuti kesanggupan para warga. Sehingga mereka dapat senang hati menerima dan menjalani program tersebut.
Transformasi spasial fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan space atau ruang-ruang kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dimanfaatkan sebagai ruang yang memiliki nilai lebih seperti space untuk menjemur ikan bersama atau kegiatan lain seperti untuk pengasapan ikan • Transformasi fisik dalam perbaikan kampung nelayan yang ada pada studi kasus dapat dilakukan dengan perbaikan pada gapura atau <i>main gate</i> dari kampung Tambak Cemandi Sidoarjo. Perbaikan pada fisik bangunan TPI (tempat pelelangan ikan) milik warga setempat yang kondisi fisiknya tidak layak. 	<p>Diperlukan pembenahan terkait aspek transformasi spasial fisik. Perbaikan space atau ruang-ruang kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.</p> <p>Transformasi fisik dalam perbaikan kampung nelayan yang ada pada studi kasus dapat dilakukan dengan perbaikan pada gapura atau <i>main gate</i> dan bangunan TPI (tempat pelelangan ikan).</p>	<p>Perbaikan space atau ruang-ruang kosong di desa Tambak Cemandi Sidoarjo yang belum tertata sebagai space warga untuk menjemur ikan dan melakukan pengasapan.</p> <p>Perbaikan fisik kampung nelayan yang ada pada studi kasus dapat dilakukan dengan perbaikan pada perubahan atau transformasi fisik gapura atau <i>main gate</i> dan bangunan TPI yang menjadi ikon kampung nelayan di desa Tambak Cemandi Sidoarjo.</p>

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastuktur sudah ada dan tersedia pada studi kasus, kondisi fisik infrastruktur seperti: jalan, jembatan dan gapura yang seadanya masih dapat difungsikan cukup baik. Namun hal ini perlu dilakukannya pembaharuan, perbaikan agar kondisi fisik kampung ini menjadi lebih baik dan terawat. Serta perlunya perawatan secara berkala dalam memajemen lingkungan dan infrastruktur permukiman pesisir. 	Infrastuktur sudah ada dan tersedia pada studi kasus, kondisi fisik infrastruktur seperti: jalan, jembatan dan gapura yang seadanya masih dapat difungsikan cukup baik namun harus dilakukan perbaikan agar lebi maksimal.	Perlu dilakukannya perbaikan atau pembaharuan, agar kondisi fisik kampung ini menjadi lebih baik dan terawat. Serta perlunya perawatan secara berkala dalam memajemen lingkungan dan infrastruktur permukiman pesisir.
Desain yang inovatif fungsional, responsif dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkannya desain yang dapat mewadahi aktivitas masyarakat penghuni desa Tambak Cemandi Sidoarjo sehingga kampung nelayan ini memiliki desain yang menarik dan dapat menarik perhatian warga sekitar. • Desain permukiman dari kampung nelayan ini juga sangat dibutuhkan dikarenakan kampung ini memiliki ciri khas sebagai kampung nelayan yang menyediakan dan menjual berbagai hasil tangkapan dari laut dan dari tambak yang dihasilkan oleh warga setempat. 	Diperlukan desain yang dapat mewadahi aktivitas masyarakat penghuni desa Tambak Cemandi Sidoarjo sehingga kampung nelayan ini memiliki desain yang menarik dan dapat menarik perhatian warga sekitar.	Perlunya perbaikan pada desain rumah – rumah warga yang ada pada permukiman nelayan, sehingga dapat mewadahi aktivitas masyarakat penghuni desa Tambak Cemandi Sidoarjo sehingga kampung nelayan ini memiliki desain yang menarik dan dapat menarik perhatian warga sekitar.

Aspek	Kondisi dan Studi literatur	Kriteria	Konsep
Kemudahan akses dan jangkauan layanan dan fasilitas.	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tambak Cemandi memerlukan perbaikan pada kondisi jalan yang merupakan akses ke ruang public dan ruang hijau di kawasan kampung tersebut, karena letak kampung yang sangat berada di pinggiran dan dekat dengan laut, masyarakat dapat gotong royong membenahi jalan yang digunakan mereka menggunakan pengerasan jalan yang mudah menyerap air seperti balok paving. Hal ini demi keamanan warga agar dapat melintasi jalan setapak dengan aman. Selain hal tersebut yang harus diperhatikan agar kampung tambak cemandi menjadi kampung yang sustainable, perawatan akan fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau atau ruang publik. 	Diperlukan perbaikan terkait akses mudah dan dekat dalam jangkauan layanan dan fasilitas. Seperti halnya perbaikan pada kondisi jalan yang merupakan akses ke ruang public dan ruang hijau di kawasan kampung tersebut.	Diperlukan perbaikan terhadap aksesibilitas di dalam permukiman nelayan Tambak Cemandi Sidoarjo. Dengan membenahi jalan yang digunakan mereka menggunakan pengerasan jalan yang mudah menyerap air seperti balok paving. Hal ini demi keamanan warga agar dapat melintasi jalan setapak dengan aman. Selain hal tersebut yang harus diperhatikan agar kampung tambak cemandi menjadi kampung yang sustainable, perawatan akan fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau atau ruang publik.
Kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi persampahan dan lingkungan alam seperti sungai dan pesisir laut juga memiliki kondisi lingkungan yang buruk. Masyarakat setempat mengakui sudah terbiasa membuang sampah ke laut dibandi di kumpulkan dahulu di tempat pembuangan akhir. Sehingga diperlukannya manajemen permukiman oleh stake holder dan ketua RT – RW 	Diperlukan perbaikan terkait aspek kelestarian lingkungan dalam tahap perbaikan permukiman nelayan. Kondisi lingkungan permukiman yang <i>sustainable</i> harus dapat menjaga kelestarian kondisi lingkungan di sekitar permukiman. Tidak adanya sampah yang berserakan, banyaknya	Diperlukannya manajemen permukiman oleh stake holder dan ketua RT – RW setempat untuk memberlakukan aturan yang tegas untuk menjalankan perbaikan permukiman melalui aspek kelestarian lingkungan. Sehingga permukiman di Desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ini dengan

	<p>setempat untuk memberlakukan aturan yang tegas untuk menjalankan perbaikan permukiman melalui aspek kelestarian lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehingga permukiman di desa Tambak Cemandi dapat menerapkan aspek ini dengan cara pemberian saran dan arahan kepada warga setempat dan juga para stake holder dalam membuat aturan warga setempat di segi menjaga kelestarian lingkungannya. Kesepakatan antara warga dan juga stake holder diperlukan agar dalam pelaksanaan konsep tersebut, warga dapat menerima dan mau menjalankan dengan sebagaimana mestinya. 	<p>penghijauan dan saluran air yang bersih dan mengalir menandakan lingkungan permukiman yang sehat.</p>	<p>menjaga kelestarian lingkungannya agar terhindar dari sampah yang berserakan. Memiliki penghijauan yang cukup sehingga Kawasan tidak gersang serta saluran air yang mengalir dan bersih.</p>
--	---	--	---

7.2 Konsep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep *Sustainable Settlements*

Tahap analisis terakhir dalam penelitian ini adalah merumuskan konsep pengembangan kawasan permukiman nelayan yang bebas kumuh dengan konsep *Sustainable Settlement*. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melalui tahapan *forum group discussion* sebagai sarana untuk memperoleh konsep pengembangan tersebut. Dalam proses analisis triangulasi ini, acuan utama dalam perumusan konsep adalah kriteria yang di dapat kan dari faktor-faktor yang yang berpengaruh dalam permukiman nelayan yang bebas kumuh dengan konsep *Sustainable Settlement*. Selanjutnya dilihat bagaimana faktor-faktor tersebut ditemukan dalam kondisi eksisting wilayah setempat. Berikut kdetail onsep yang memerlukan adanya preseden atau sketsa konsep .

- **Konsep rumah nelayan layak huni aspek desain yang inovatif fungsional, responsif dan**

Berikut konsep rumah nelayan layak huni yang sesuai dengan standar dengan memisahkan area berjulan dan rumah pribadi. Sehingga kegiatan penyimpanan atau penjualan ikan hasil perolehan atau tangkapan tidak membaaur menjadi satu dengan rumah inti. Berikut gambar konsep rumah nelayan layak huni pada gambar 7.1.



Gambar 7.1. Konsep rumah nelayan layak huni

Konsep terkait rumah nelayan yang layak huni terkait dengan material yang digunakan. Masih banyak yang menggunakan material semi permanen seperti bamboo sesek dan kondisinya sudah tidak layak huni. Penambahan ruang kosong di sebelah teras rumah dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan maupun tempat penjemuran ikan seperti pada gambar 7.2 perspektif konsep rumah nelayan layak huni.



Gambar 7.2 perspektif konsep rumah nelayan layak huni

- **Konsep lingkungan permukiman layak huni dalam aspek kelestarian lingkungan**

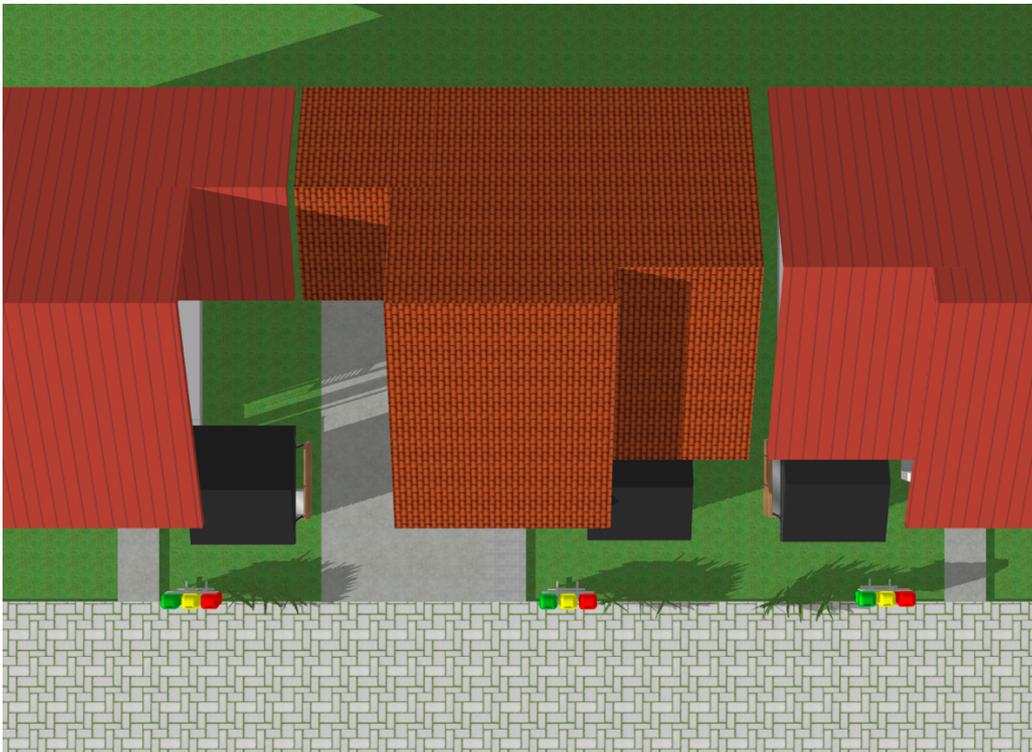
Konsep lingkungan permukiman layak huni yang sangat menjadi perhatian pada objek studi kasus adalah tidak adanya system persampahan yang berjalan. Hal tersebut tentunya dikarenakan minimnya pengetahuan akan resiko pada kesehatan dan kebersihan lingkungan serta diri sendiri. Usulan dalam mengatasi hal ini selain melakukan pengarah dan pembuatan aturan yang keras akan larangan membuang sampah sembarangan. Maka perlu juga adanya kewajiban setiap rumah warga memiliki tempat sampah yang disediakan didepan rumah mereka sehingga petugas dapat mudah mengambil sampah setiap harinya seperti pada gambar 7.3 Konsep lingkungan permukiman layak huni.



7.3 Konsep lingkungan permukiman layak huni.

- **Konsep akses jalan yang sesuai standar dalam aspek Kemudahan akses dan jangkauan layanan dan fasilitas.**

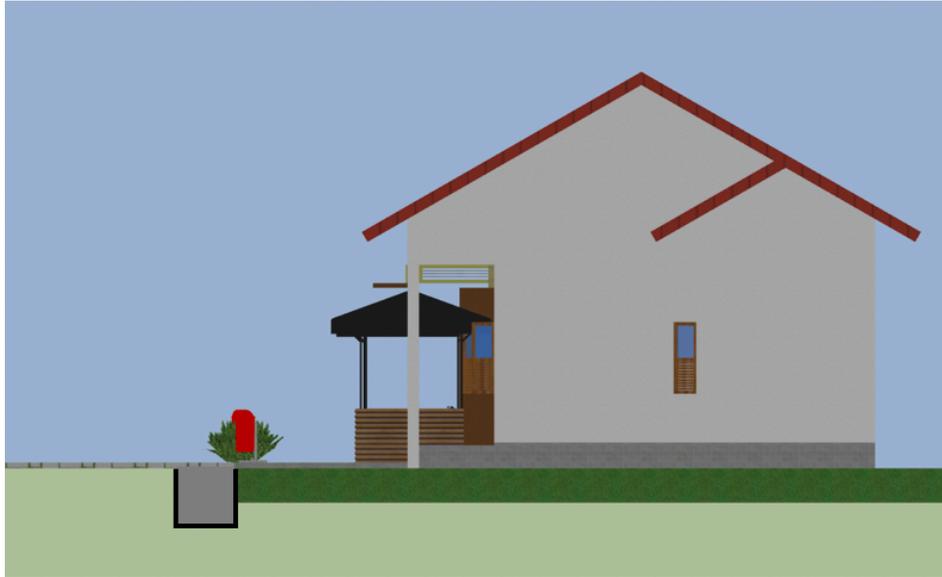
Jalan pada eksisting studi kasus belum memadai karena menggunakan pengerasan berupa kerikil, seharusnya menggunakan jalan dengan paving seperti pada gambar 7.4.



Gambar 7.4 Konsep akses jalan yang sesuai standar.

- **Konsep drainase yang sesuai standar dalam aspek kelestarian lingkungan.**

Memiliki drainase yang berada di bawah permukaan jalan, dan tertutup serta memiliki ukuran yang memadai dan sesuai standar seperti pad gambar 7.5 terkait konsep drainase.



Gambar 7.5 Konsep Drainase

- **Konsep pengelolaan persampahan yang sesuai standar dalam aspek kelestarian lingkungan.**

Tersedianya tempat pembuangan sampah akhir yang sesuai standar, kondisi eksisting studi kasus saat ini menggunakan lahan kosong untuk membuang sampah rumah tangga mereka dan tumpukan sampah juga banyak terdapat di pinggir jalan. Berikut seharusnya kampung memiliki tempat pembuangan sampah yang sesuai standar seperti pada gambar 7.6.



Gambar 7.6 Konsep pengelolaan persampahan yang sesuai standar

- **Konsep sarana untuk para pemuda seperti sanggar atau rumah baca Desain yang inovatif fungsional, responsif dan inovatif.**

Konsep pemanfaatan area tambak untuk dijadikan fasilitas public yakni gazebo apung. Dimana gazebo apung dapat dimanfaatkan oleh semua warga dan juga pemuda untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan desain konsep seperti pada gambar 7.7.



Gambar 7.7 Konsep sarana fasilitas umum

7.3 Prioritas Penanganan dalam Konsep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep *Sustainable Settlements* dari Persepsi atau Kebutuhan Masyarakat di Lokasi Studi

Hasil analisa diatas merupakan penjabaran dari konsep *Sustainable Settlement* dengan dikorelasikan dari tujuan penelitaian yang pertama yakni hasil analisa faktor – faktor penyebab kekumuhan berdasarkan kriteria kumuh dan kondisi eksisting. Meskipun demikian dalam menangani permasalahan kekumuhan pada permukiman nelayan ini dibutuhkan tahapan atau prioritas dalam mengambil tindakan dalam menanganai kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan. Korelasi yang perlu difahamkan terkait kondisi sumber daya manusia atau penghuni dari permukiman nelayan yang ada pada studi kasus. Pada analisa di bab sebelumnya yang membahas tentang pengaruh dari karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat permukiman nelayan terhadap kekumuhan pada lingkungan permukiman. Dari hasil analisa tersebut menjadi acuan dalam menyusun tahapan atau prioritas dalam mengambil tindakan dalam menanganai kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan yang sudah disesuaikan dengan berbasis *Sustainable Settlements*.

Tahapan atau prioritas dalam mengambil tindakan dalam menanganai kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan yang sudah disesuaikan dengan berbasis *Sustainable Settlement* yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karaketristik masyarakat di kawasan permukiman nelayan dijelaskan pada tabel 7.3 berikut ini.

Tabel 7.3 Tahapan Prioritas dalam Kosep Permukiman Nelayan Bebas Kumuh dengan Konsep *Sustainable Settlement*

Tahapan Prioritas	Konsep	Keterangan
Tahap pemahaman persepsi warga setempat terkait kosep perbaikan	Pemahaman persepsi warga terkait program kampung bebas kumuh	Tahapan awal yang digunakan untuk membangun persepsi warga dan mendalami dan mengarahkan warga setempat akan pentingnya
	Peningkatan kualitas social masyarakat	

	Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat	perbaikan kekumuhan yang ada pada permukiman kumuh.
Tahap pendataan dan legalitas warga permukiman setempat	Kepadatan Penghuni Permukiman Nelayan	Tahap ini dilakukan untuk mencegah kesalahan sebelum melakukan perbaikan pada permukiman setempat
	Kepemilikan Tanah Permukiman Nelayan	
Tahap perbaikan rumah warga permukiman setempat	Karakter Bangunan Permukiman Nelayan	Tahap ini adalah tahap inti yakni perlunya dilakukan untuk perbaikan rumah kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan juga kebutuhan mereka.
	Kondisi Bangunan di Permukiman Nelayan	
	Desain yang inovatif fungsional, responsif dan	
Tahap perbaikan fasilitas umum permukiman kumuh	Kemudahan akses dan jangkauan layanan dan fasilitas.	Tahap ini adalah tahap inti setelah dilakukannya perbaikan rumah kumuh warga. Lingkungan dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya perbaikan. Agar menjadi lingkungan yang bebas kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan konsep <i>Sustainable Settlement</i>
	Aksesibilitas Jalan	
	Drainase	
	Pengelolaan Persampahan	
	Pengamanan Kebakaran	
	Perumahan yang aman dan terjangkau	
	Penyediaan infrastruktur yang layak dan manajemen siklus hidup	
	Transformasi spasial fisik	
	Kelestarian lingkungan	

<p>Tahap pemahaman pemeliharaan berkelanjutan permukiman bebas kumuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan kota yang terjangkau • Memiliki kehidupan kota yang dapat dijangkau di setiap permukiman. • Manajemen kota yang efektif dan keuangan kota keberlanjutan • Ekonomi dan Penciptaan lapangan kerja lokal 	<p>Tahap ini adalah tahap akhir setelah perbaikan rumah kumuh dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya pemahaman pemeliharaan agar dapat menjadi kampung bebas kumuh yang berkelanjutan sesuai dengan standarisasi dan konsep <i>Sustainable Settlement</i> dan dapat dijalankan oleh warga setempat.</p>
---	--	---

Hasil dari analisa terahir pada penelitian ini adalah penyusunan tahapan atau prioritas dalam mengambil tindakan dalam menanganai kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan yang sudah disesuaikan dengan berbasis *Sustainable Settlement* yang sudah dijelaskan pada tabel 7.3. Terdapat 5 tahap atau priopritas dalam dalam mengambil tindakan dalam menanganai kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan.

Tahap pemahaman persepsi warga setempat terkait kosep perbaikan yakni Tahapan awal yang sangat penting dan digunakan untuk membangun persepsi warga dan mendalami dan mengarahkan warga setempat akan pentingnya perbaikan kekumuhan yang ada pada permukiman kumuh. Kondisi kekumuhan juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan warganya, dan dihuni oleh mayoritas penduduk dengan tingkat perokonomian yang rendah. Oleh sebab itu tahap pemahaman persepsi warga setempat terkait kosep sangat penting untuk dilakukan agar warga dapat menerima dengan baik dan juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dan kondisi dari penghuni permukiman kumuh tersebut.

Tahap pendataan dan legalitas warga permukiman setempat. Tahap ini dilakukan untuk mencegah kesalahan sebelum melakukan perbaikan pada permukiman setempat. Pada penelitian ditemukan beberapa warga yang belum memiliki legalitas akan tempat tinggal mereka. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan usulan perbaikan permukiman kumuh karena belum memiliki hak milik.

Pada kondisi ini para pengurus desa dapat memberikan pertimbangan dan penjelasan lebih dalam sebelum melakukan perbaikan.

Tahap perbaikan rumah warga permukiman setempat. Tahap ini adalah tahap inti yakni perlunya dilakukan untuk perbaikan rumah kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan juga kebutuhan mereka. Masyarakat yang menghuni permukiman kumuh. Memiliki kondisi bangunan tempat tinggal yang jauh dari standar. Perbaikan rumah diperlukan agar masyarakat dapat mengubah kondisi rumah mereka yang sangat berdampak pada kesehatan, kebersihan bahkan perekonomian dikarenakan pada dasarnya mayoritas rumah warga nelayan menjual ikan di depan rumah mereka. Hal tersebut dapat dibenahi sesuai dengan usulan konsep agar lebih menarik dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Tahap perbaikan fasilitas umum permukiman kumuh. Tahap ini adalah tahap inti setelah dilakukannya perbaikan rumah kumuh warga. Lingkungan dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya perbaikan. Agar menjadi lingkungan yang bebas kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan konsep *Sustainable Settlement* Masyarakat yang menghuni permukiman kumuh. Memiliki kondisi lingkungan dan fasilitas umum yang kurang dari standar. Perbaikan lingkungan dan fasilitas umum diperlukan agar masyarakat dapat memperbaiki lingkungan mereka yang sangat berdampak pada kesehatan, kebersihan bahkan perekonomian dikarenakan pada lingkungan permukiman nelayan memiliki daya tarik di bidang perekonomian khususnya sentra penjualan hasil laut dan tambah yang diperoleh dari mayoritas warga nelayan yang menjual dan mencari ikan di laut langsung di jual di depan rumah mereka. Hal tersebut dapat dibenahi sesuai dengan usulan konsep agar lebih menarik dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Tahap pemahaman pemeliharaan berkelanjutan permukiman bebas kumuh Tahap ini adalah tahap akhir setelah perbaikan rumah kumuh dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya pemahaman pemeliharaan agar dapat menjadi kampung bebas kumuh yang berkelanjutan sesuai dengan standarisasi dan konsep *Sustainable Settlement* dan dapat dijalankan oleh warga setempat.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil analisis terakhir dalam penelitian ini adalah merumuskan konsep pengembangan kawasan permukiman nelayan yang bebas kumuh dengan konsep *Sustainable Settlement*. Hasil dari analisa terakhir pada penelitian ini adalah penyusunan tahapan atau prioritas dalam mengambil tindakan dalam menangani kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan yang sudah disesuaikan dengan berbasis *Sustainable Settlement* yang sudah dijelaskan pada tabel di bab sebelumnya.

Tujuan yang pertama penelitian ini yakni mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kekumuhan pada permukiman nelayan berdasarkan SNI kriteria kumuh yang ada di Indonesia. Dan telah dianalisa berdasarkan hasil penelitian pada studi kasus di Kampung Nelayan Tambak Cemandi Sidoarjo memiliki hasil kesimpulan penelitian meliputi beberapa faktor yakni : kepadatan penghuni permukiman nelayan, kepemilikan tanah permukiman nelayan, karakter bangunan permukiman nelayan, karakter lingkungan dan fasilitas umum, kondisi bangunan di permukiman nelayan, kondisi aksesibilitas jalan pada permukiman nelayan, kondisi drainase pada permukiman nelayan, pengolahan persampahan pada permukiman nelayan, dan terdapat pengamanan kebakaran di pada permukiman nelayan.

Tujuan penelitian ini yang kedua yakni mengenai keterkaitan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap kekumuhan pada permukiman nelayan. Dengan menggali informasi dari berbagai narasumber yang mewakili masing – masing kelompok masyarakat yang ada pada permukiman nelayan digolongkan berdasarkan kondisi social dan ekonomi mereka menghasilkan tiga poin penting yang dijadikan kriteria dalam sebuah konsep permukiman nelayan yang bebas kumuh. Berikut konsep yang dihasilkan berkaitan dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat :

- Peningkatan kualitas sosial masyarakat

Dari hasil analisa semakin bagus atau berintegritas kualitas social sekelompok masyarakat akan berdampak pada behaviour atau perilaku mereka dalam melakukan tindakan apapun termasuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya.

- Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat

Dengan analisa kemauan warga pada kampung yang dijadikan studi kasus memperbaiki kualitas lingkungan saja, hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada perekonomian warganya. Untuk warga yang berpenghasilan lebih tinggi juga memiliki kesadaran dan kemauan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar permukiman mereka. Hal tersebut menjadikan acuan bahwa, suatu program perbaikan kampung. Hendaknya juga dapat mengangkat perekonomian kampung tersebut. Agar mereka lebih mandiri dan lebih dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal mereka terbebas dari kekumuhan.

Dari hasil tujuan penelitian yang pertama dan hasil analisa tujuan penelitian yang kedua menjadai acuan dalam menyusun konsep dari kawasan permukiman nelayan yang bebas kumuh sesuai dengan berbasis *Sustainable Settlement*. Didapatkan dengan mengkaji dari kriteria yang dimiliki konsep *Sustainable Settlement* dari UN dengan kondisi eksisting dan divalidasi dengan forum group discussion dengan para *stake holder* atau para pengurus kampung. Menghasilkan konsep berupa usulan kebijakan dan peraturan untuk daerah setempat yang dapat *manage* para warga. Sehingga masyarakat setempat dapat menerima dan melaksanakan program memperbaiki kampung mereka agar terbebas dari kekumuhan dan dapat menjadi kampung yang *sustainable*. Diantaranya yakni terkait : Peningkatan kualitas social masyarakat. Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat. Perumahan yang aman dan terjangkau. Pemahaman persepsi warga terkait program kampung bebas kumuh. Sistem transportasi yang terjangkau dan berkelanjutan. Urbanisasi berkelanjutan yang inklusif. Melindungi warisan budaya dan alam dunia. Mengurangi dampak buruk bencana alam. Mengurangi dampak lingkungan kota. Menyediakan akses ke ruang publik dan hijau yang aman dan inklusif. Dan juga perencanaan pembangunan nasional dan regional yang kuat.

Diantarnya konsep desain yang dihasilkan dari penelitian ini untuk menjadi sebuah kawasan permukiman nelayan yang bebas kumuh adalah berikut ini :

- Konsep rumah nelayan layak huni. Yakni dengan sketsa konsep rumah nelayan layak huni yang sesuai dengan standar dengan memisahkan area berjualan dan rumah pribadi. Sehingga kegiatan penyimpanan atau penjualan hasil tangkapan laut.
- Konsep terkait kelayakan rumah nelayan yang pada aspek material dan konstruksi yang digunakan. Masih banyak yang menggunakan material semi permanen seperti bamboo sesek dan kondisinya sudah tidak layak huni. Sehingga digambarkan sebuah konsep bangunan yang sesuai standar dan terjangkau untuk para masyarakatan kampung nelayan.
- Konsep terkait drainase yang berada di bawah permukaan jalan, dan tertutup serta memiliki ukuran yang memadai dan sesuai standar SNI.
- Konsep pengelolaan persampahan yang sesuai standar. Ketersediaannya tempat pembuangan sampah akhir yang sesuai standar SNI. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksisting studi kasus membuang sampah mereka disembarang tempat dan disekitar permukiman mereka terdapat banyak tumpukan sampah di pinggir jalan.
- Konsep sarana untuk para pemuda seperti sanggar atau rumah baca. Konsep sketsa pemanfaatan area tambak untuk dijadikan fasilitas public yakni gazebo apung. Dimana gazebo apung dapat dimanfaatkan oleh semua warga rapat atau berekreasi dan juga untuk para pemuda mengembangkan kreativitas mereka.

Dalam melakukan penanganan dalam perbaikan permukiman terdapat 5 tahap atau prioritas dalam dalam mengambil tindakan dalam menangani kekumuhan yang ada pada permukiman nelayan. Tahap pemahaman persepsi warga setempat terkait konsep perbaikan yakni :

- Tahapan awal yang sangat penting dan digunakan untuk membangun persepsi warga dan mendalami dan mengarahkan warga setempat akan pentingnya perbaikan kekumuhan yang ada pada permukiman kumuh.
- Tahap pendataan dan legalitas warga permukiman setempat. Tahap ini dilakukan untuk mencegah kesalahan sebelum melakukan perbaikan pada permukiman setempat. Pada penelitian ditemukan beberapa warga yang belum memiliki legalitas akan tempat tinggal mereka.

- Tahap perbaikan rumah warga permukiman setempat. Tahap ini adalah tahap inti yakni perlunya dilakukan untuk perbaikan rumah kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan juga kebutuhan mereka.
- Tahap perbaikan fasilitas umum permukiman kumuh. Tahap ini adalah tahap inti setelah dilakukannya perbaikan rumah kumuh warga. Lingkungan dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya perbaikan. Agar menjadi lingkungan yang bebas kumuh yang sesuai dengan standarisasi dan konsep *Sustainable Settlement*.
- Tahap pemahaman pemeliharaan berkelanjutan permukiman bebas kumuh Tahap ini adalah tahap akhir setelah perbaikan rumah kumuh dan fasilitas umum warga tentunya perlu adanya pemahaman pemeliharaan agar dapat menjadi kampung bebas kumuh yang berkelanjutan sesuai dengan standarisasi dan konsep *Sustainable Settlement* dan dapat dijalankan oleh warga setempat.

8.2 Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- Pemerintah mulai dari pemerintah setempat pengurus desa sampai dengan pemerintah provinsi harusnya dapat mendukung program usulan dalam perbaikan kampung nelayan yang masih kumuh dan tidak layak huni. Dari analisa yang sudah dilakukan di penelitian ini harapannya pemerintah dapat membantu dan menstimulasi kegiatan – kegiatan masyarakat, khususnya untuk memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal mereka, dapatg melalui berbagai program yang diusulkan pada konsep temuan di dalam penelitian maupun pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas umum untuk membantu menjadikan kawasan permukiman nelayan yang layak huni dan *sustainable*.
- Masyarakat permukiman pesisir harusnya dapat dengan saling mengingatkan masyarakat lain yang masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya kualitas lingkungan yang baik, sehat dan bebas kekumuhan. Karena hal tersebut juga akandapat berdampak pada perekonomian mereka apabila kampungnya menjadi maju dan dilirik oleh masyarakat luar di lingkup sektor kampung wisata.
- Lembaga sosial masyarakat, sangat lah dibutuhkan perannya pada perealisasiian program - program perbaikan kampung seperti ini. Dengan konsep – konsep yang diusulkan, banyak diperlukannya pengarahan untuk masyrakat awan dan menyadarkan lalu menggerakkan mereka agar dapat berubah mau memperbaiki lingkungan permukiman yang mereka tinggali.
- Untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan permukiman nelayan, disarankan agar mengambil responden dari masyarakat langsung. Adanya pemilihan atau segmentasi dalam mengambil data dapat dijadikan penelitian baru mengenai analisa - analisa preferensi masyarakat sesuai segmentasi mereka dalam cara mereka bertempat tinggal di wilayah pesisir sehingga mendukung hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun, Qurrotul. 2016. Evaluasi Tingkat Kualitas Hidup dengan Kriteria Eco-Settlement pada Permukiman Nelayan di Desa Pesisir Tambak Wedi. EMARA Indonesian Journal of Architecture. Surabaya.

Baud-Bovy, and Lawson . (1998). Tourism and Recreation Handbook of Planning and Design. London: Architectural Pres.

Carr, Stephen. 1992. Public Space,Cambridge . Cambridge : University Press.

Christiawan, Putu Indra , I Gede Budiarta. 2017. Entitas Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Dahuri, R., et al. (2001) Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisirdan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita, Bogor.

Darmawan, E, 2009, Ruang Publik dalam Arsitektur Kota, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Dimitra, Sonya, Nany Yuliasuti. 2012. Potensi Kampung Nelayan sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas. Semarang : Jurnal Teknik Pwk Volume 1

Fachrudin, Hilma Tamiami . 2019. Penataan Kampung Nelayan dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan.

Groat L and Wang D, (2013), Architectural Research Methods – Second Edition. Canada, USA : John Wiley and Sons Inc.

Hajrah, Andi. 2016. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan bagi Pengembangan Kawasan Pesisir di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Uin Alauddin Makassar

Haryadi dan B. Setiawan .1995. Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. PPPSL Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta.

Haviland, William A. 1967. Antropolohi. Jakarta : Erlangga.

Hermanto. 1986. Analisis Pendapatan dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan di Desa Pantai. Studi Kasus di Muncar, Banyuwangi. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

Indriani, Luhukay. 2012. Enterprise Berdasarkan Effisiensi Lahan Terhadap Produktivitas dan Kesehatan. UGM. Yogyakarta

JB.Watson. 1924. Behaviorism. WEST Press.

Khomarudinm. 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta.

Krier, Leon, 1992, Architecture and Urban Design, ST. Martin Press, New York .

Krier, Rob, 1979, Urban Space,Rizzoli International Publication, London.

Laurens, Joyce Marcella. 2004. Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta: PT. Grasindo. Morris, Desmond. 1977. A Fied Guide Human Behavior. New York : N.Abrams Inc.

Nawagamuwa, Arawinda. 2003. Slum, Squatter Areas and Informal Settlement, 9th. International Conference On Sri Lanka Studies, Matara, Sri Lanka, and Nils Viking.

Nugroho, Adityo dwi. 2019. Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Studi Kasus Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 .

Prasti, annisa, widyastuti. 2015. Kondisi Fisik dan Kualitas Permukiman Kawasan Pesisir Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Tadaluko: Jurnal Ilmiah Untad Vol. 3.

PU. Cipta Karya . 2004. Penanganan Pemukiman Kumuh.

Rahardjo, priyanto. 2002. Nelayan Nusantara Sebuah Filsafah Kehidupan. Institut Pertanian Bogor.

Rapoport, Amos. 1977. Human Aspects of Urban Form: Towards A Man-Enviromental Approach to Urban Form And Design, Pergamon Press: New York.

Roger, Trancik. 1986. Finding Lost Space, Theories of urband design. New York: Van Nostrand Reindhold Co.

Septanti, Dewi, Rahmadiyahanti. Maritime Culture Indicators for the Development of Fishermen's Settlement. International Journal of Innovative Science and Research Technology : ISSN 2456 2165

Sunarti, Gultom . 2005. Pengaruh Penataan Permukiman Kumuh untuk Mencapai Livable Settlement di Kelurahan Tambakrejo Semarang.

Surayin. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Sulistyarso, Bayu Arifianto, Muhammad,Haryo. 2016. Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan Pendekatan Eco-Settlements. Surabaya : Jurnal Teknik ITS Vol 5

Titisari, Ema Yunita dan Farid Kurniawan, 1999. Kajian Permukiman Desa Pinggiran Kota; mengukur tingkat kekeumuhan; Kampung institut teknologi sepuluh november, Surabaya.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007

Wardono, Budi, Fauzi. 2015. Total Faktor Produktivitas dan Indeks Instabilitas Perikanan Tangkap: Kasus di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Ejournal-balitbang

Yonaldi, Sepris. 2006. Pendirian Rumah Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir. Padang : Universitas Padang .

